

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



PEMERINTAH PROVINSIJAMBI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Jambi menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2016.

LKPD yang disusun ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan Standar akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. LKPD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, beban, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas.

Disadari bersama bahwa keberhasilan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri akan dapat berhasil dan berdaya guna apabila aspek perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan di bidang pemerintahan dan keuangan saling memberikan umpan balik.

Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bagian dari salah satu jawaban dari serangkaian kebijakan kemandirian suatu daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Dalam rangka mewujudkan terlaksananya pembangunan dan kemasyarakatan, maka pemerintah senantiasa memprogramkan segala kegiatan berdasarkan atas skala prioritas, mengingat kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat dan kompleks sedangkan dana relatif terbatas. Berdasarkan skala prioritas tersebut maka Pemerintah Daerah menjabarkan program/kegiatan pembangunan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang salah satu isinya mewajibkan pemerintah daerah membuat LKPD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan APBD, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

LKPD Provinsi Jambi disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Penggunaan dana sebagai sumber pembiayaan kegiatan Pemerintah Daerah harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

LKPD Pemerintah Provinsi Jambi TA 2016 pada hakikatnya merupakan perwujudan kewajiban Gubernur Jambi kepada DPRD atas pelaksanaan APBD TA 2016. Oleh karena itu dengan penyusunan Laporan Keuangan Provinsi Jambi ini dapat memberikan informasi mengenai kinerja keuangan daerah dan diharapkan dapat bermanfaat untuk peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jambi.

LKPD Pemerintah Provinsi Jambi disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi selama satu periode pelaporan. Pemerintah Provinsi Jambi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan antara lain:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan tingkat ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari:

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran merupakan salah satu komponen laporan keuangan Pemerintah Daerah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3) Neraca

Neraca pemerintah daerah merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu.

4) Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Daerah yang tercermin dalam Pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional Pemerintah Daerah.

5) Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan dan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

7) Catatan atas Laporan Keuangan

Merupakan penjelasan terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas, termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan serta kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah atau satuan organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

1.2. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Keuangan Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016;
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 04 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016.
13. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016;
14. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016.
15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Gubernur Jambi No 25 Tahun 2016 Tentang Kebijakan akuntansi Persediaan.

17. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.

1.3. Sistematika Penulisan atas Laporan Keuangan

Unsur Laporan Keuangan ini menggunakan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Menyajikan informasi pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD pada akhir tahun anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran Pendapatan, Belanja, Surplus/Defisit, dan Pembiayaan dengan realisasinya dalam periode satu tahun.

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari realisasi Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit- LRA dan Pembiayaan yang dibandingkan dengan Anggarannya sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 01 Tahun 2016 tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan ini menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos seperti Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya, Lain-lain dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

3. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode mengenai Aset (kekayaan), Kewajiban (utang) dan Ekuitas dari suatu entitas. Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri atas Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.

Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- 1) **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;
- 2) **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah;
- 3) **Ekuitas** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara total Aset dengan total Kewajiban pemerintah daerah.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyediakan informasi seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, beban dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan Pos-pos:

- 1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- 2) Beban dari kegiatan operasional;
- 3) Surplus/defisit dari Operasi;
- 4) Kegiatan Non Operasional;
- 5) Surplus/Defisit sebelum pos Luar Biasa;
- 6) Pos luar biasa; dan
- 7) Surplus/defisit-LO.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah;
- 2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan Pos-pos:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya: 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, dan 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap;
- 4) Ekuitas akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan, yang memuat penjelasan naratif maupun rincian dari angka yang tercantum dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. Di samping itu juga mencakup informasi mengenai ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan hal-hal lainnya. CaLK dibuat untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- 2) Informasi tentang Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;

- 3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelepasan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 4) Informasi tentang dasar penyajian laporan Keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 5) Rincian penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- 6) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan dan;
- 7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

1.4. Entitas

Untuk TA 2016, entitas dalam Pemerintah Provinsi Jambi yang tercakup dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat KORPRI, Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan, Inspektorat Provinsi, Badan, Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Komisi Penyiaran dan Informasi Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan Badan Layanan Umum Daerah.

1. Badan

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 2) Badan Lingkungan Hidup Daerah;
- 3) Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 5) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- 6) Badan Kepegawaian Daerah;
- 7) Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- 8) Badan Ketahanan Pangan;
- 9) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan;

- 10) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 11) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah ;
- 12) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

2. Dinas

- 1) Dinas Pendidikan;
- 2) Dinas Kesehatan;
- 3) Dinas Pekerjaan Umum;
- 4) Dinas Perhubungan;
- 5) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 6) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- 7) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 8) Dinas Pemuda dan Olah raga;
- 9) Dinas Pendapatan Daerah;
- 10) Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
- 11) Dinas Perkebunan;
- 12) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 13) Dinas Kehutanan;
- 14) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 15) Dinas Kelautan dan Perikanan;
- 16) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- 17) Dinas Komunikasi dan Informasi.

3. Sekretariat :

- 1) Sekretariat DPRD;
- 2) Sekretariat Daerah;
- 3) Sekretariat Korpri;
- 4) Sekretariat KPID;
- 5) Sekretariat Badan Koordinasi dan Penyuluhan.

4. Kantor
 - 1) Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi;
 - 2) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yaitu Akademi Farmasi.
6. Badan Layanan Umum Daerah
 - 1) Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher;
 - 2) Rumah Sakit Jiwa Daerah;
 - 3) Akademi Analisis Kesehatan.

1.5. Kebijakan Konversi

Mengingat penyusunan dan penyajian APBD Provinsi Jambi TA 2016 dan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, maka untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 bahwa LKPD sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penyusunan dan penyajian LKPD Provinsi Jambi TA 2016 dilakukan dengan melakukan konversi kepada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

Konversi yang dilakukan mencakup jenis laporan, basis akuntansi, pengungkapan posLaporanKeuangan, struktur APBD (Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan), klasifikasi anggaran (Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan), serta Catatan atas Laporan Keuangan. Konversi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dilakukan dengan cara melacak kembali (*trace back*) pos-pos laporan keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dengan pos-pos laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan. Pelaksanaan konversi pos-pos laporan keuangan didasarkan pada Buletin Teknis Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Konversidan khusus untuk penyajian belanja daerah didasarkan pada Buletin Teknis Nomor 4 Tahun 2006

tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, dimana dilakukan reklasifikasi untuk Belanja Operasional dan Belanja Modal.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. Ekonomi Makro

Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2016 memberikan gambaran ekonomi makro tahun 2016 dan pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Gambaran ekonomi tersebut dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahun 2016.

Pelaksanaan pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi tidak terlepas dari kebijakan yang ditempuh, baik dari sisi efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan melalui target APBD dan realisasinya, maupun dilihat dari efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung.

2.1.1. Kondisi Perekonomian.

Perekonomian Jambi pada tahun 2016 yang di ukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp171.711,45 miliar dan PDRB per kapita mencapai Rp49.642.996,00 miliar. Ekonomi Provinsi Jambi tahun 2016 tumbuh sebesar 4,37%.

Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha. Jasa Keuangan dan Asuransi merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 10,38%, diikuti oleh Informasi dan Komunikasi sebesar 8,51%, serta Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,29%. Struktur perekonomian Provinsi Jambi menurut lapangan usaha tahun 2016 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (29,79%); Pertambangan dan Penggalian (16,59%); serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (12,15%). Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2016, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,73%, diikuti Perdagangan Besar

dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,59%; serta Informasi dan Komunikasi sebesar 0,29%.

Berdasarkan andilnya, sumber utama pertumbuhan Jambi pada triwulan IV tahun 2016 adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan andil tertinggi pada pertumbuhan ekonomi sebesar 3.23% dan diikuti sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 0,87% dan sektor informasi dan komunikasi sebesar 0,52%. Sementara dari sisi tingkat pertumbuhan, 3 (tiga) sektor yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi pada triwulan IV-2016 adalah sektor informasi dan komunikasi (14,81% *yoy*), sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (14,69% *yoy*) dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (12,60% *yoy*).

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 4,37% terjadi pada hampir semua komponen kecuali pengeluaran konsumsi pemerintah dan perubahan inventori. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen pembentukan modal tetap bruto dengan pertumbuhan 5,37% dan menyumbang PDRB sebesar 22,85%. Kemudian pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT dan ekspor masing-masing tumbuh sebesar 4,43%; 2,35%; dan 2,29%. Struktur ekonomi Provinsi Jambi tahun 2016 menurut pengeluaran didominasi oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa (66,06%); diikuti Konsumsi Rumah Tangga (44,96%) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (22,85%).

Kondisi iklim yang bersifat kemarau basah selama tahun 2016 membuat produksi komoditas pertanian (padi dan kelapa sawit) mengalami peningkatan. Hal tersebut didukung dengan tren kenaikan harga komoditas (CPO dan karet) global pada triwulan IV-2016 seiring kenaikan harga minyak dunia dan menurunnya stok CPO global. Kedua faktor tersebut berperan dalam meningkatkan daya beli masyarakat terutama petani dan mendorong konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan ekonomi 2016 juga didorong oleh PMTDB/investasi yang terutama didorong dari sektor pertambangan terkait eksploitasi blok migas Tiung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Investasi juga didorong oleh meningkatnya aktivitas pembangunan properti bisnis (hotel dan pusat perbelanjaan).

PDRB per kapita Jambi 2016 atas dasar harga berlaku mencapai Rp49.642.996 atau USD3.730,49 sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan (tahun dasar 2010) sebesar Rp37.728.368 atau USD2.835,15. Meskipun nilai PDRB atas dasar harga berlaku meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun 2015 (Rp45.591.966), namun besaran angka PDRB per kapita tersebut perlu disikapi dengan bijak. Pada prinsipnya PDRB perkapita mengabaikan siapa yang menghasilkannya. Selain itu, sepanjang tahun 2016 nilai tukar rupiah cenderung menguat dan stabil terhadap mata uang dolar. Meskipun tidak terlalu signifikan, peningkatan PDRB per kapita Jambi juga diikuti dengan pengurangan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi.

1. Neraca Perdagangan.

Perkembangan neraca perdagangan daerah dapat dilihat dari pergerakan perdagangan ekspor dan impor daerah, perkiraan neraca perdagangan sangat terkait dengan sasaran laju pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan ekspor serta perkiraan pertumbuhan investasi.

Kegiatan ekspor pada bulan Desember 2016 melalui pelabuhan Jambi mengalami kenaikan 14,56% dibanding bulan November 2016, yaitu dari US\$188,17 juta menjadi US\$215,58 juta. Penyebab utama naiknya ekspor Provinsi Jambi bulan Desember 2016 adalah bertambahnya ekspor di tiga sektor yaitu sektor pertanian, sektor industri dan sektor pertambangan.

Bila dibandingkan dengan ekspor pada periode yang sama di tahun 2015 ekspor Jambi di bulan Januari-Desember 2016 ini lebih rendah. Dimana capaian ekspor Januari-Desember tahun 2015 adalah US\$2.635,78 juta. Penurunan yang terjadi sebesar 28,13%. Kontribusi terbesar terhadap total ekspor di Jambi adalah ekspor kelompok pertambangan sebesar 49,34%, diikuti kelompok industri sebesar 46,40%, dan kelompok pertanian sebesar 4,26%. Bila dirinci menurut komoditi, kelompok pertambangan didominasi oleh migas, kontribusinya mencapai 48,02%, penyumbang kontribusi terbesar dari kelompok industri yaitu karet dan olahannya yang mencapai 19,82%. Sedangkan dari kelompok pertanian, komoditi pinang memiliki sumbangsih 3,96%.

Meningkatnya ekspor karet utamanya disebabkan kenaikan harga karet sebagai dampak kenaikan harga minyak global. Disamping itu, kejadian banjir di Thailand turut mengurangi suplai karet di pasar global. Ekspor CPO meningkat seiring kembali normalnya pasokan bahan baku paska *El Nino* dan permintaan CPO global untuk memenuhi kekurangan stok sebagai dampak *El Nino*. Apabila dilihat dari struktur ekspor non migas, terlihat ekspor produk industri pengolahan dari sub sektor perkebunan dan kehutanan masih mendominasi ekspor Jambi pada triwulan IV-2016. Menurut negara tujuan, ekspor Jambi pada triwulan laporan sebagian besar ditujukan ke Singapura dengan nilai US\$177,06 juta dan diikuti Malaysia sebesar US\$50,59 juta dan Tiongkok sebesar US\$ 39,75 juta.

Impor non migas Provinsi Jambi selama triwulan laporan tercatat sebesar US\$ 63,03 juta, tumbuh cukup signifikan sebesar 152,25% (yoy). Kenaikan impor utamanya disebabkan adanya impor alat pengangkutan berupa kapal laut. Impor kapal yang termasuk dalam alat pengangkutan lainnya tercatat sebesar US\$ 50,25 juta dan menjadi kontributor impor tertinggi selama triwulan IV-2016. Kenaikan impor juta terjadi pada komoditas kertas dan bubur kertas (97,10% *yoy*). Disamping itu, impor Jambi juta disumbangkan oleh bahan kimia inorganis sebesar US\$ 1,73 juta atau 2,7% dari impor Jambi. Struktur nilai impor Provinsi Jambi pada Januari-Desember 2016 berubah bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2015. Pada periode Januari-Desember 2015, nilai impornya didominasi oleh bahan baku dan penolong sebesar 56,37%. Untuk barang-barang modal sebesar 41,10% dan barang-barang konsumsi sebesar 2,53%. Sedangkan pada periode Januari-Desember 2016 di dominasi oleh barang-barang modal 62,27%, bahan baku dan penolong 36,29% dan barang-barang konsumsi 1,44%. Berubahnya struktur impor Provinsi Jambi antara lain disebabkan oleh impor beberapa barang modal dalam bentuk kapal dari India dan Singapura.

2. Laju inflasi.

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga secara umum dan berkelanjutan yang berkaitan dengan mekanisme pasar antara lain

supply barang yang terbatas dan peningkatan permintaan yang tinggi sehingga menimbulkan kenaikan harga.

Pada tahun 2016 terjadi inflasi daerah Jambi sebesar 4,39%, lebih tinggi dari laju inflasi nasional yang mencapai 3,02%. Jika iklim usaha dan situasi keamanan yang kondusif serta pemerintah daerah mampu mengatasi berbagai hambatan investasi, maka diperkirakan masuknya *capital in flow* ke Provinsi Jambi melalui investasi, baik Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing.

3. Keuangan Daerah.

Keuangan Daerah yang tercermin dalam APBD Provinsi Jambi dijelaskan bahwa sumber pembiayaan pembangunan diperoleh dari berbagai sumber diantaranya berasal dari pendapatan asli daerah berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu, pajak dan retribusi daerah, dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dan penerimaan lain-lain yang sah. Dari semua penerimaan, kontribusi terbesar berasal dari instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan sumber penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) masih terlalu kecil dibandingkan dengan bantuan pusat. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Jambi selama ini dalam membiayai administrasi pemerintahan maupun pembangunan masih sangat tergantung dari pemerintah pusat.

Secara umum gambaran perkembangan dan realisasi pendapatan daerah Provinsi Jambi tahun 2016 memperlihatkan adanya penurunan yang cukup signifikan.

Pada sisi Pendapatan Daerah, untuk Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak dan retribusi daerah, laba hasil usaha dan pendapatan lainnya yang sah, realisasinya tidak mencapai target yang ditetapkan, yaitu dari target sebesar Rp1.321,868miliar terealisasi sebesar Rp1.233,768miliar atau 93,33%, penurunan ini disebabkan karena laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sehingga otomatis berimbas pula pada penurunan di sektor unggulan seperti karet dan sawit.

Dari sisi belanja daerah yang terdiri dari belanja Operasi dan belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer selama tahun 2016, mengalami efisiensi dari jumlah anggaran sebesar Rp3,612triliun, terealisasi sebesar Rp3,294triliun (91,21%) atau terjadi penghematan sebesar 8,78%. Namun demikian terjadi peningkatan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, peningkatan akses penduduk dan mendapatkan perumahan yang layak, peningkatan ketahanan pangan serta peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pedesaan.

Dari uraian di atas dapat terlihat bahwa meningkatnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan, serta didorong oleh pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi akan dapat dicapai. Dengan demikian Provinsi Jambi akan mampu mengurangi angka pengangguran dan laju pertumbuhan penduduk miskin. Kondisi perekonomian seperti ini yang bersinergi dengan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan akan membawa Provinsi Jambi pada kemajuan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

4. Kebutuhan investasi dan sumber pembiayaan.

Salah satu masalah penting guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan basis ekonomi yang baik adalah tingkat efisiensi penggunaan modal. Secara makro efisiensi penggunaan modal dapat diukur dengan konsep ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) yaitu rasio antara proporsi investasi terhadap PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi, atau dengan kata lain ICOR merupakan besar satuan kapital (investasi) yang dibutuhkan untuk mencapai satu satuan produksi dimana semakin kecil nilai ICOR maka pemanfaatan modal dalam proses produksi makin efisien.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi investasi dan sekaligus menjadi pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya antara lain sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), stabilitas politik dan perekonomian.

Dalam upaya peningkatan penerimaan daerah, selain melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan komponen penerimaan daerah juga dilakukan langkah persuasif dengan mengajak setiap perusahaan yang memiliki investasi di Provinsi Jambi agar berkantor

di Kota Jambi. Dengan demikian dari segi Tabel Arus Dana (*Flow of Fund*), uang yang dihasilkan di Provinsi Jambi sebagian besar akan kembali ke Provinsi Jambi. Investasi fasilitas yang dilakukan oleh swasta baik melalui PMDN maupun PMA sangat tergantung pada seberapa menarik Jambi sebagai investasi yang menguntungkan.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan investasi daerah adalah:

1. Deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di Provinsi Jambi;
2. Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan pihak swasta atau dengan pemerintah lain dengan perjanjian yang disepakati;
3. Kerjasama antara BUMD dan pihak swasta;
4. Kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana investasi ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor tanaman pangan, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan kemudian pengembangan industri hilir dan pengolahan yang berbasis pertanian dan kelautan, perkebunan, listrik, dan industri manufaktur;
5. Mendorong peningkatan investasi langsung dari negara lain yaitu melalui skema FDI (*foreign direct investment*).
6. Mendorong investasi swasta melalui skema investasi fasilitas PMA dan PMDN.
7. Mendorong investasi masyarakat yaitu investasi non fasilitas yang banyak dilakukan oleh masyarakat lokal dan masyarakat menengah kebawah.

2.1.2. Lingkungan Eksternal dan Internal.

Gambaran ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2016 akan dipengaruhi lingkungan eksternal sebagai akibat semakin meningkatnya integrasi perekonomian dunia yang pada satu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian daerah, tetapi dilain pihak juga menuntut daya saing perekonomian daerah yang lebih tinggi. Dorongan eksternal bagi perekonomian daerah Jambi berasal dari perekonomian regional dan nasional serta negara tetangga yang diperkirakan masih menjadi penggerak perekonomian dunia dan pasar dari komoditi ekspor negara berkembang

yang diperkirakan tetap menjadi kawasan dinamis dengan motor penggerak perekonomian negara-negara industri di Asia lainnya.

Adapun lingkungan internal yang diperkirakan berpengaruh positif terhadap perekonomian daerah dalam tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Ekspektasi masyarakat tetap kuat didorong oleh rencana dan pelaksanaan program-program pembangunan yang terarah dan konsisten sesuai dengan dokumen perencanaan dan melalui tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
2. Pemerintahan yang kuat dan didukung oleh seluruh masyarakat akan mempercepat penyelesaian konflik kebijakan antara pusat dan daerah, kebijakan lintas sektor, serta kebijakan-kebijakan sektoral yang menghambat terciptanya iklim usaha yang sehat yang pada gilirannya akan menciptakan kepastian hukum bagi peningkatan kegiatan ekonomi;
3. Sejalan dengan meningkatnya kepastian politik, kemampuan untuk menegakkan keamanan dan ketertiban serta pelaksanaan hukum, termasuk dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, juga meningkat;
4. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap berbagai pelaksanaan program pembangunan pada gilirannya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi.

2.1.3. Tantangan Pokok

Dengan kemajuan yang dicapai dan masalah yang dihadapi hingga tahun 2016, tantangan pokok yang dihadapi tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi. Dengan jumlah pengangguran yang semakin bertambah, kualitas pertumbuhan perlu ditingkatkan agar kegiatan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih besar dan mengurangi jumlah penduduk miskin. Sejak krisis, lapangan kerja yang diciptakan oleh kegiatan ekonomi makin menurun, kerawanan pangan dan kurangnya penanganan masalah gizi dan rendahnya kemampuan daya beli harus terus ditingkatkan dalam rangka mendorong kualitas pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. Tantangan ini cukup berat mengingat kondisi sektor riil yang belum sepenuhnya pulih; ditandai

dengan masih awalnya peningkatan investasi dan ekspor non-migas dan masih banyaknya kendala di daerah yang menghambat peningkatan investasi dan ekspor non-migas secara berkelanjutan;

3. Menjaga Stabilitas Ekonomi berkaitan dengan kemungkinan timbulnya gejolak ekonomi baik yang berasal dari luar, yang mengakibatkan tidak terkendalinya inflasi akan mempengaruhi dari tingkat daya beli masyarakat serta akan membawa dampak bagi stabilitas ekonomi daerah.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan suatu wilayah dimasa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Isu – isu strategis yang harus menjadi perhatian Provinsi Jambi dalam lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Tata kelola pemerintahan masih memerlukan perbaikan terutama dalam hal akuntabilitas dan pelayanan publik. Hal ini berhubungan dengan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangandaerah yang belum berjalan efektif sehingga masih terjadi penyalahgunaan keuangan daerah dalam bentuk tindak pidana korupsi. Selain itu, belum berkembangnya e-government system dan inovasi dalam penggalian sumber-sumber pendapatan daerah menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pendapatan asli daerah dan masih lambatnya birokrasi serta rendahnya kualitas pelayanan publik.
2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) belum sesuai dengan kebutuhan pasar dan belum mendukung pembangunan di Provinsi Jambi. Belum meratanya akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas menjadi salah satu penyebab kualitas SDM belum memiliki daya saing sesuai harapan. Disamping itu, mulai lunturnya nilai – nilai luhur agama dan budaya juga berimplikasi pada minimnya SDM yang berkarakter dan berdaya saing. Perbaikan karakter SDM sekaligus dapat mendukung upaya pemerintah pusat melalui gerakan revolusi mental.
3. Predikat Provinsi Jambi sebagai salah satu daerah yang aman di Indonesia merupakan salah satu hal positif yang harus

dipertahankan. Situasi daerah yang kondusif akan menjadi salah satu modal penciptaan iklim investasi di Provinsi Jambi.

4. Pengelolaan sumberdaya alam (SDA) belum optimal dan kurang mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup. Kurang optimalnya pengelolaan SDA tersebut disebabkan oleh kurangnya sentuhan IPTEK dan inovasi, sehingga nilai tambah produk unggulan daerah tidak didapatkan oleh Provinsi Jambi. Demikian pula dengan eksplorasi sumberdaya alam yang hanya berorientasi pada profit tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan.
5. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur umum masih kurang memadai dalam mendukung pengembangan wilayah.
6. Adanya kesenjangan ekonomi ditandai tingginya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin.
7. Letak Jambi secara geografis sangat strategis dalam kawasan ASEAN dan Interregional Sumatera (Provinsi Sumsel, Sumbar, Riau, Kepulauan Riau, dan Bengkulu) karena dapat menjadi pintu gerbang keluar dan masuknya barang, jasa dan orang dari dan keBatam, Malaysia dan Singapura serta dari provinsi lain. Peran Jambi ke depan akan semakin strategis sebagai bagian dari poros maritim dunia, pemberlakuan pasar bebas Asean (AFTA) dan Asean – China (ACFTA) serta Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
8. Kondisi perekonomian global yang berfluktuatif berdampak terhadap harga komoditi unggulan Provinsi Jambi seperti Migas, Batubara, Crude Palm Oil (CPO), Karet dan kelapa dalam. Kondisi ini berdampak pada pendapatan masyarakat yang sekitar 65 persen beradadisektor pertanian dan perkebunan yang pada gilirannya berdampak pada daya beli masyarakat.
9. Isu dunia yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan iklim terkait program Pengurangan Emisi Karbon akibat Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan serta SDGs. Dalam hal pengurangan emisi, Provinsi Jambi berpotensi menjadi daerah yang potensial untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Sebagai jantung pulau Sumatera, posisi hutan Jambi sangat strategis sebagai rumah terakhir bagi keanekaragaman hayati Sumatera. Dengan memiliki

4 Taman Nasional (TNKS, TNBT, TNBD dan TNB) dapat dipastikan Provinsi Jambi merupakan benteng terakhir dari habitat bermacam satwa liar, seperti Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), Badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatraensis*), Gajah Sumatera (*Elephas maximus*) dan lainnya yang terus menurun drastis akibat perburuan dan penyempitan habitat. Selain itu juga sebagai sebagai rumah yang nyaman untuk flora khas seperti cendawan muka harimau (*Rafflesia haseltii*), *Rafflesia arnoldi*, *Amorphopalus titanum* dan berbagai jenis kayu, perdu juga bebungaan. Demikian pula dalam hal pencapaian SDGs, Provinsi Jambi harus ikut berperan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar manusia.

10. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan energi harus didukung dengan peningkatan produksi pangan melalui perbaikan sarana prasarana pendukung dan intensifikasi serta pemberian sentuhan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi dalam pengolahan lahan pertanian serta optimalisasi penggunaan potensi energi baru dan terbarukan guna pemenuhan kebutuhan energi di Provinsi Jambi.
11. Penyelesaian Batas Provinsi Jambi dan Provinsi berbatasan merupakan agenda yang harus mendapat perhatian untuk pembangunan lima tahun ke depan. Hal ini terkait dengan upaya pembangunan wilayah perbatasan yang sampai saat ini masih belum optimal.

2.1.4. Arah Kebijakan Ekonomi Makro

Dalam tahun 2016, kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk meningkatkan kualitas tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas ditandai dengan menurunnya tingkat kemiskinan, mengecilnya angka pengangguran, terciptanya lapangan pekerjaan yang memadai atau melebihi tingkat pertumbuhan pencari kerja, kualitas lingkungan terjaga dan eksploitasi sumber daya alam berimbang pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih besar bukan hanya dinikmati segelintir orang.

Dengan terbatasnya kemampuan keuangan daerah, maka ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tidak cukup kuat untuk mengakselerasikan pertumbuhan pembangunan dan peningkatan akumulasi kapasitas pembangunan. Untuk itu kebijakan ekonomi makro daerah diarahkan untuk mendorong secepatnya peranan masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan berbagai kendala yang menghambat. Disamping itu langkah-langkah kebijakan lebih serius ditempuh untuk meningkatkan pemerataan dan sekaligus mendorong potensi pembangunan yang belum termanfaatkan selama ini antara lain di sektor pertanian, industri, dan di wilayah pedesaan diantaranya dengan meningkatkan nilai tambah produk pertanian, perkebunan dan kehutanan melalui program revitalisasi tanaman sawit dan karet rakyat, membangun industri hilir berbasis komoditas karet dan mengembangkan industri karet yang terintegrasi meliputi industri inti, penunjang dan industri terkait lainnya. sehingga pemecahan masalah-masalah sosial mendasar seperti kemiskinan dan pengangguran dapat segera dipecahkan.

Dalam kaitan itu, untuk menghadapi tantangan internal dan global yang cukup mempengaruhi perkembangan ekonomi nasional dan daerah, banyak kegiatan pembangunan yang harus disiasati dengan baik. Pertukaran komoditas dan sumberdaya antar wilayah di seluruh Indonesia dan bahkan dengan luar negeri sangat diperlukan. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi didorong terutama dengan meningkatkan investasi dan ekspor non-migas. Peningkatan investasi dan daya saing ekspor dilakukan dengan mengurangi hambatan-hambatan yang ada yaitu dengan menyederhanakan prosedur perijinan, mengurangi tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah serta antar sektor, meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha, menyehatkan iklim ketenagakerjaan, meningkatkan penyediaan infrastruktur, menyederhanakan prosedur, serta meningkatkan fungsi intermediasi perbankan dalam menyalurkan kredit kepada sektor usaha kecil dan menengah terus dilakukan dan dikembangkan seperti dengan mengadakan pameran Banking Expo dan Jambi Syariah Expo serta sosialisasi produk perbankan dalam memperluas akses kredit/pembiayaan pada para pelaku usaha.

Selanjutnya, kualitas pertumbuhan ekonomi ditingkatkan dengan mendorong pemerataan pembangunan antara lain dengan mendorong

pembangunan pertanian dan meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan. Kualitas pertumbuhan juga didorong dengan memperbaiki iklim ketenagakerjaan yang mampu meningkatkan penciptaan lapangan kerja dengan mengendalikan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) agar tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan laju inflasi, memastikan biaya-biaya non-UMP mengarah pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta membangun hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dan tenaga kerja. Kualitas pertumbuhan juga didorong dengan meningkatkan akses usaha kecil, menengah, dan koperasi terhadap sumber daya pembangunan. Upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin akan didorong oleh berbagai kebijakan lintas sektor mengarah pada penciptaan kesempatan usaha bagi masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan kemampuan masyarakat miskin, serta pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

Stabilitas ekonomi dijaga melalui pelaksanaan kebijakan untuk tetap memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi. Stabilitasekonomi dalam tahun mendatang juga akan didukung dengan ketahanan sektor keuangan melalui penguatan dan pengaturan jasa keuangan, perlindungan dana masyarakat, serta peningkatan koordinasi berbagai otoritas keuangan melalui jaring pengaman sistem keuangan secara bertahap.

2.2. Kebijakan Keuangan

Dalam menjalankan roda pemerintahan di Provinsi Jambi selalu mengacu pada visi yaitu “*Jambi Tuntas 2021*”, yakni Provinsi Jambi yang Tertib Unggul Nyaman TangguhAdil dan Sejahtera 2021.

Dari sisi penerimaan, telah dikeluarkan seperangkat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber pajak dan retribusi daerah. Perda tersebut menyebutkan secara rinci mengenai jenis dan tarif masing-masing pajak dan retribusi daerah.

Dalam anggaran tahun 2016 ini penerimaan PAD jumlahnya belum signifikan untuk menopang belanja daerah dalam APBD, sehingga masih mengandalkan dukungan dana dari penerimaan transfer/bagi hasil dan Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat.

Dari sisi pengeluaran, Perda APBD telah ditetapkan sebagai batas tertinggi pengeluaran untuk tiap-tiap kegiatan agar terjadi efisiensi dan efektivitas kegiatan. Selanjutnya sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 150 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah ditetapkan perangkat kebijakan yang menjadi dasar dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, yakni Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Perda ini secara substansial mengatur hal-hal pokok yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

2.3. Pencapaian Target Kinerja

APBD Provinsi Jambi TA 2016 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2016, yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016. Penyusunan APBD ini, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15), dilakukan dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara. Upaya untuk mencapai tujuan bernegara dimaksud secara operasional dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang sekaligus bertindak selaku pusat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Struktur APBD terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Khusus untuk belanja diklasifikasikan lebih lanjut ke dalam belanja operasi dan belanja modal dimana untuk belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Adapun strategi pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah
- 2) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif

- 3) Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur
- 4) Peningkatan kinerja aparatur Pemerintah Provinsi Jambi
- 5) Meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif
- 6) Meningkatkan dan mengembangkan sistem pengendalian pembangunan
- 7) Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk hukum daerah yang mengakomodir kebutuhan daerah (pangan, lingkungan, investasi, HAM)
- 8) Memperpendek birokrasi dan mengoptimalkan pemanfaatan IT
- 9) QuickResponse
- 10) Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan, sarana, prasarana dan alat kesehatan, obat-obatan secara merata
- 11) Peningkatan jaminan perlindungan kesehatan masyarakat melalui JKN dan Jamkesda
- 12) Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga yang bersumber daya masyarakat
- 13) Peningkatan koordinasi upaya pengendalian penyakit menular dan tidak menular
- 14) Peningkatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan
- 15) Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan pelayanan pendidikan menengah
- 16) Meningkatkan peran perpustakaan dalam meningkatkan minat baca masyarakat
- 17) Meningkatkan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
- 18) Peningkatan pelestarian budaya lokal
- 19) Peningkatan apresiasi dan penggiat seni budaya dalam menumbuhkembangkan seni dan budaya daerah
- 20) Meningkatkan tenggang rasa masyarakat dalam menjalankan kegiatan keagamaan
- 21) Memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak
- 22) Penurunan potensi konflik melalui pencegahan dini dan pengendalian konflik masyarakat
- 23) Mengoptimalkan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
- 24) Pemberian layanan hukum pemerintah daerah dan masyarakat
- 25) Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
- 26) Mengembangkan SDM berkemampuan IPTEKIN dan entrepreneur

- 27) Pengembangan fasilitas pelatihan yang mendukung IPTEKIN dan enterpreneur
- 28) Penguatan budaya IPTEKIN dan enterpreneur melalui proses pendidikan dan kebudayaan
- 29) Mendorong usaha-usaha bisnis baru berbasis IPTEKIN dan enterpreneurship
- 30) Meningkatkan iklim yang mampu mendorong berkembangnya bisnis berbasis IPTEKIN dan enterpreneurship
- 31) Memantapkan ketersediaan pangan berbasis kemandirian lokal
- 32) Mendorong hilirisasi melalui pemanfaatan IPTEKIN sehingga mampu mengubah struktur ekonomi primer ke sekunder dan tersier
- 33) Memberikan kemudahan bagi investor industri hilir pengolahan
- 34) Menciptakan iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan birokrasi di berbagai tingkatan yang mampu mengurangi praktek ekonomi biaya tinggi
- 35) Menyiapkan kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk investasi agribisnis dan agroindustri
- 36) Peningkatan kinerja BUMD agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan PAD
- 37) Meningkatkan pengembangan usaha yang produktif dan menguntungkan BUMD
- 38) Meningkatkan kegiatan ekonomi produktif padat karya
- 39) Mengembangkan komoditas unggulan agribisnis berbasis teknologi dan inovasi
- 40) Meningkatkan UMKM binaan
- 41) Memantapkan ketersediaan pangan berbasis kemandirian lokal
- 42) Meningkatkan akses terhadap bahan pangan
- 43) Meningkatkan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pangan lokal
- 44) Meningkatkan mutu dan keamanan pangan asal sayur dan buah
- 45) Meningkatkan produksi dan produktivitas, produk pertanian, peternakan dan perikanan berbasis IPTEKIN
- 46) Meningkatkan penerapan teknologi pertanian dan sarana prasarana teknologi

- 47) Meningkatkan penyediaan sarana produksi dan bibit unggul pertanian di pedesaan
- 48) Percepatan penyelesaian pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan untuk kepentingan mobilitas perekonomian masyarakat
- 49) Perwujudan simpul-simpul maritim Provinsi Jambi
- 50) Meningkatkan pelayanan prasarana transportasi
- 51) Peningkatan akses masyarakat terhadap energi listrik
- 52) Peningkatan akses masyarakat terhadap air minum layak
- 53) Pembangunan jaringan irigasi baru dan mengoptimalkan OP irigasi dan rawa
- 54) Pengendalian daya rusak air
- 55) Mengoptimalkan potensi energi baru terbarukan untuk pemenuhan kebutuhan energi daerah
- 56) Menerapkan *goodminingpractice*
- 57) Meningkatkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
- 58) Meningkatkan pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan
- 59) Meningkatkan tata kelola lingkungan yang baik di bidang industri
- 60) Meningkatkan peran pariwisata dalam pengelolaan SDA
- 61) Pemisahan peran administrator dengan pengelola kawasan hutan melalui pembentukan KPH dan cabang dinas serta operasionalnya
- 62) Memfasilitasi masyarakat dalam mengakses kawasan hutan dengan program perhutanan berbasis masyarakat
- 63) Meningkatkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha kehutanan tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
- 64) Mengoptimalkan patroli, operasi, penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan
- 65) Peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan tertib peredaran hasil hutan kayu dan non kayu serta pemanfaatan jasa lingkungan
- 66) Menginventarisasi status dan fungsi kawasan hutan serta mengoptimalkan pengendalian pemanfaatan pola ruang
- 67) Melaksanakan reklamasi dan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL)
- 68) Meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan dan pembudidaya ikan
- 69) Memperkuat pembangunan desa dan kawasan perdesaan

- 70) Meningkatkan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Komunitas Adat terpencil (KAT)
- 71) Meningkatkan kerjasama dengan swasta dalam penyaluran tenaga kerja
- 72) Memperluas akses lapangan pekerjaan dan akses permodalan
- 73) Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas kesehatan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan
5. Meningkatkan kualitas SDM yang berbudaya dan agamis
6. Meningkatkan kualitas SDM perempuan
7. Mewujudkan keamanan dan ketertiban daerah
8. Meningkatkan daya saing daerah berbasis IPTEKIN
9. Meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian
10. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum
11. Meningkatkan kualitas pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan
12. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan tujuan, maka sasaran pembangunan Provinsi Jambi tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien
2. Meningkatnya kualitas pelayanan pada instansi/ lembaga pemerintah daerah yang melayani publik
3. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
4. Meningkatnya kualitas pendidikan menengah

5. Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya
6. Meningkatnya harmonisasi kehidupan umat beragama
7. Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan
8. Meningkatnya stabilitas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kesadaran politik dan hukum
9. Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP)
10. Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah
11. Meningkatnya kemandirian pangan berbasis sumber pangan lokal
12. Meningkatnya indeks pertanaman pada lahan tanaman pangan
13. Akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian
14. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik
15. Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi
16. Meningkatnya tata kelola energi dan sumber daya alam yang berkelanjutan
17. Meningkatnya pengelolaan SDA dan bahan tambang yang memberi manfaat ekonomi untuk pendapatan daerah dan masyarakat dengan dampak lingkungan yang minimal
18. Meningkatnya kualitas pengelolaan DAS dan meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi
19. Menurunnya angka kemiskinan
20. Menurunnya angka pengangguran
21. Terwujudnya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan perkembangan sosial dan ekonomi.

Pelaporan kinerja operasional pada Pemerintah Provinsi Jambi disajikan tersendiri dalam “Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” (LAKIP), yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Penyusunan LAKIP.

Dalam LAKIP tersebut, dilaporkan aspek akuntabilitas kinerja, di mana esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2016.

Di dalamnya antara lain diuraikan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan/sasaran strategis, tingkat efisiensi suatu program melalui perbandingan *output* dengan *inputnya*, serta tingkat efektivitas suatu program melalui perbandingan *outcome* dengan targetnya.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

APBD Provinsi Jambi TA 2016, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2016, terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan.

Melalui Perubahan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016, maka anggaran pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan mengalami perubahan, yaitu anggaran pendapatan menjadi sebesar Rp3.433.921.466.750,82, anggaran belanja sebesar Rp3.102.331.335.892,62, Transfer Rp509.500.468.824,87, penerimaan pembiayaan menjadi sebesar Rp177.910.337.966,67 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00. Secara garis besar, anggaran dan realisasi APBD Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Daerah
Tahun Anggaran 2016**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Pendapatan	3.433.921.466.750,82	3.394.795.872.563,54	98,86
2	Belanja	3.102.331.335.892,62	2.893.449.001.005,34	93,27
3	Transfer	509.500.468.824,87	401.035.967.667,50	78,71
	Surplus (Defisit)	(177.910.337.966,67)	100.310.903.890,70	(56,41)
4	Pembiayaan			
	- Penerimaan	177.910.337.966,67	177.910.337.966,67	100
	- Pengeluaran	0,00	0,00	0
	Pembiayaan	177.910.337.966,67	177.910.337.966,67	100,00

Berdasarkan Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tersebut di atas, kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jambi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp3.433.921.466.750,82 dapat direalisasikan sebesar Rp3.394.795.872.563,54 atau 98,86% dari target anggarannya. Di sisi lain, Belanja yang dianggarkan sebesar Rp3.102.331.335.892,62 direalisasikan sebesar Rp2.893.449.001.005,34 atau 93,27% dari anggaran sedangkan transfer yang dianggarkan sebesar Rp509.500.468.824,87 direalisasikan sebesar Rp401.035.967.667,50. Dengan

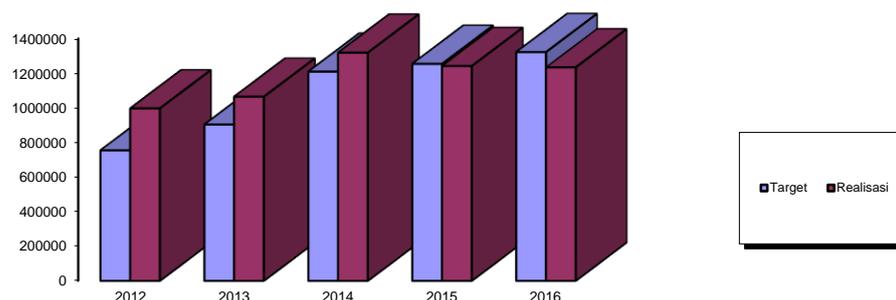
demikian dari anggaran defisit sebesar Rp177.910.337.966,67 direalisasikan Surplus sebesar Rp100.310.903.890,70.

2. Untuk melihat perkembangan target dan realisasi penerimaan PAD dari tahun 2012 sampai dengan 2016 secara jelas dapat dilihat pada Tabel 3.2 dan grafik 3.1 berikut ini:

Tabel 3.2 Perkembangan PAD dari TA 2012 s.d. 2016

No.	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Perkembangan %	Realisasi (Rp)	Perkembangan %
1	2	3	4	5	6
1.	2012	753.366.207.083,00	17,41	996.144.816.439,21	1,21
2.	2013	902.554.697.570,26	19,80	1.063.804.724.914,10	6,79
3.	2014	1.208.837.984.507,67	33,94	1.318.523.706.213,24	23,94
4.	2015	1.253.624.335.381,67	3,70	1.241.223.028.011,76	(5,86)
5.	2016	1.321.867.908.750,82	5,44	1.233.514.664.109,54	(0,62)

Grafik 3.1 Perkembangan Target dan Realisasi PAD TA 2012 s.d. 2016



Secara keseluruhan dari TA 2012 sampai dengan TA2016 target PAD Provinsi Jambi terus menerus mengalami kenaikan, namun di TA 2015 dan 2016 walaupun target mengalami kenaikan tetapi realisasinya mengalami penurunan. Dilihat dari sisi target anggaran, dari TA 2012 sampai dengan TA 2013 target PAD mengalami kenaikan sebesar Rp149.188.490.487,26 atau sebesar 19,80%,TA 2013 sampai dengan TA 2014 target PAD mengalami kenaikan sebesar Rp306.283.286.937,41atau sekitar 33,93%,TA 2014 sampai dengan TA 2015target PAD mengalami kenaikan sebesar Rp44.786.350.874atau sebesar 3,70%,TA 2015 sampai TA 2016 target PAD mengalami kenaikan sebesar Rp68.243.573.369,15atau 5,16%.

Kemudian apabila dilihat dari sisi realisasi penerimaan PAD, pada TA 2012 sampai dengan TA 2013 realisasi PAD mengalami kenaikan sebesar Rp67.659.908.474,89 atau sebesar 6,79%,TA 2013 sampai dengan TA 2014 realisasi PAD mengalami kenaikan sebesar Rp11.912.236.526,38 atau sebesar23,94%,TA 2014 sampai dengan TA 2015 realisasi PAD mengalami penurunan sebesar Rp77.300.678.201,48 atau sebesar 5,86%,TA 2015 sampai dengan TA 2016 mengalami penurunan sebesar Rp7.708.363.902,22 atau 0,62%,

Untuk Dana Perimbangan realisasi penerimaan sebesar Rp2.159.679.608.454,00 atau 102,32% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.110.651.958.000,00. Perkembangan target dan realisasi penerimaan yang berasal dari Dana Perimbangan dari Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 secara jelas dapat dilihat pada Tabel 3.3 dan grafik 3.2 berikut ini:

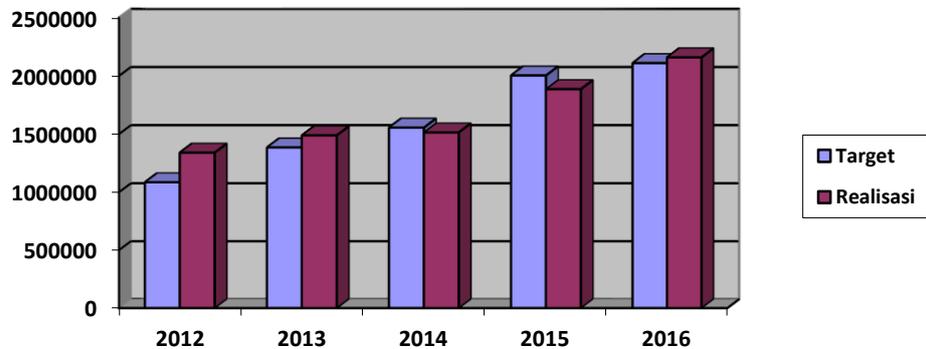
**Tabel 3.3 Perkembangan Dana Perimbangan
TA 2012 – 2016**

No.	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Perkembangan %	Realisasi (Rp)	Perkembangan %
1	2	3	4	5	6
1.	2012	1.085.733.978.686,00	11,24	1.341.202.292.809,23	24,74
2.	2013	1.385.829.989.856,10	27,64	1.489.852.559.316,00	11,08
3.	2014	1.556.188.248.079,00	12,29	1.514.518.389.008,00	1,66
4.	2015	2.004.453.463.653,32	28,81	1.887.051.548.864,00	24,60
5.	2016	2.110.651.958.000,00	5,29	2.159.679.608.454,00	14,44

Dilihat dari sisi target anggaran perkembangan Pendapatan dari Pendapatan Transfer terus mengalami peningkatan dimana pada TA 2012 ke TA 2013 terjadi peningkatan sebesar 27,64% dan pada TA 2013 ke TA 2014 terjadi peningkatan sebesar 12,29%, TA 2014 ke TA 2015 sebesar 28,81% dan TA 2015 ke TA 2016 sebesar 5,29%.

Kemudian dari sisi Realisasi Perkembangan Pendapatan dari Pendapatan Transfer juga mengalami peningkatan pada TA 2012 ke TA 2013 sebesar 11,08%, TA 2013 ke TA 2014 sebesar 1,66%, TA 2014 ke TA 2015 sebesar 24,60% dan pada TA 2015 ke TA2016 mengalami peningkatan sebesar 14,44%.

**Grafik 3.2 Perkembangan Target dan Realisasi Dana Perimbangan
TA 2012 s.d. 2016**



Penerimaan yang ada pada Dana Perimbangan berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Keistimewaan, Dana Penyesuaian dan Pendapatan Hibah. Bila dilihat dari *trend* penerimaan, bahwa Dana Perimbangan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan baik dari sisi target maupun realisasi pendapatan.

3. Dalam kaitannya dengan anggaran dan realisasi Belanja Daerah, pada TA2016 belanja daerah dianggarkan sebesar Rp3.102.331.335.892,62 dan direalisasikan sebesar Rp2.893.449.001.005,34 atau 93,27% sehingga masih terdapat efisiensi anggaran belanja daerah sebesar Rp208.882.334.887,28. Realisasi Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga sebesar Rp2.893.449.001.005,34.

Belanja Operasi TA 2016 dengan target sebesar Rp2.090.821.953.779,62 terealisasi sebesar Rp1.947.816.538.589,33 atau 93,16% terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dengan rincian target dan realisasi sebagai berikut:

**Tabel 3.4 Rincian Anggaran dan Realisasi
Belanja Operasi TA 2016**

o.	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 : 3
1.	Belanja Pegawai	663.597.473.575,25	623.561.725.029,33	93,97
2.	Belanja Barang dan Jasa	792.061.280.204,37	646.197.608.660,00	81,58
3.	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
4.	Belanja Hibah	635.163.200.000,00	678.057.204.900,00	106,75
5.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
J u m l a h		2.090.821.953.779,62	1.947.816.538.589,33	93,16

Pada TA 2016, Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp1.009.634.416.613,00 dan terealisasi sebesar Rp945.539.006.404,01 atau 93,65% dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2016

No.	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 : 3
1.	Belanja Modal Tanah	43.183.750.600,00	35.137.090.000,00	81,37
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.258.841.112,00	82.965.720.120,80	83,58
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	115.945.083.201,00	107.682.797.043,18	92,87
4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	749.231.274.400,00	717.784.364.077,03	95,80
5.	Belanja Modal Aset tetap Lainnya	2.015.467.300,00	1.969.035.163,00	97,70
J u m l a h		1.009.634.416.613,00	945.539.006.404,01	93,65

Untuk belanja tidak terduga tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp1.874.965.500 dan terealisasi sebesar Rp93.456.012,00 atau 4,98%.

Terakhir adalah belanja transfer pada tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp509.500.468.824,87 terealisasi sebesar Rp401.035.967.667,50 atau 78,71% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2016

No.	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 : 3
1.	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	498.989.207.254,87	399.535.722.420,50	80,07
2.	Transfer Bantuan Keuangan	10.511.261.570,00	1.500.245.247,00	14,27
J u m l a h		509.500.468.824,87	401.035.967.667,50	78,71

Dalam hal Pembiayaan Daerah sebagai pos untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran, dari target Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp177.910.337.966,67 dapat direalisasikan sebesar 100%, realisasi penerimaan ini sepenuhnya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

Defisit anggaran yang dianggarkan sebesar (Rp177.910.337.966,67) direalisasikan surplus sebesar Rp100.310.903.890,70 yang berasal dari efisiensi belanja sebesar Rp208.882.334.887,28 dan menghasilkan SiLPA tahun berjalan sebesar Rp278.221.241.857,37.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan ini adalah Pemerintah Provinsi Jambi, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi, dan Riau.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016 adalah basis akrual. dimanapengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, tranfer dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Provinsi Jambi menyajikan saldo Akun-Akun tahun 2016 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya dan Bagan Akun Standar pada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CALK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1. Pendapatan-LRA

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan Rumah Sakit sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diakui pada saat kas diterima atas imbalan dari pelayanan jasa kesehatan yang telah diberikan. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas *bruto*,

yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2. **Belanja**

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran atau Pemegang Kas, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atau pengeluaran tersebut disahkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi (Kuasa BUD). Dalam hal Badan Layanan Umum belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

3. **Transfer**

Transfer keluar adalah pengeluaran uang entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran Dana Perimbangan oleh Pemerintah Pusat dan Dana Bagi Hasil oleh Pemerintah Daerah.

4. **Surplus/Defisit-LRA**

Adalah Selisih Lebih/Kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

5. **Pembiayaan**

Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas *bruto*.

Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Selisih Lebih/Kurang antara Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos **Pembiayaan Neto**.

6. **Sisa Lebih Kurang Pembiayaan Anggaran (Silpa)**

Adalah Selisih Lebih/Kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

7. **Aset**

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Non Lancar. Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan, sedangkan Aset Non Lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, yang meliputi Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.

8. Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

9. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

10. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

11. Beban

Beban menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Pemerintah Provinsi Jambi menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan ini adalah Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi dengan berpedoman pada

Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:

1. Akuntansi Pendapatan–LRA

Adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Akuntansi Pendapatan–LRAdiukur berdasarkan asas *bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan–LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

Akuntansi Pendapatan–LO

Adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Akuntansi Pendapatan–LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban). Pendapatan–LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari pendapatan–LOdijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengakuan Pendapatan–LO dilaksanakan dengan 3 (tiga) kondisi :

- a. Pendapatan–LO diakui sebelum penerimaan kas;
- b. Pendapatan–LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas; dan
- c. Pendapatan–LO diakui setelah penerimaan kas.

Penjelasansecararincimengenai pengakuannya tercantum sebagaimanadalam PeraturanGubernur Jambi Nomor 56 Tahun2015.

2. Akuntansi Beban

Pengakuan Beban terjadi pada saat:

1. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas.

2. Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur sesuai dengan :

- 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada Laporan Operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

3. Akuntansi Belanja

Pengakuan belanja terjadi pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.

3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Belanja diukur dengan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

4. Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Pengakuan Transfer adalah sebagai berikut :

1. Transfer masuk diakui pada saat diterimanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK)/Peraturan Presiden maka timbul adanya hak daerah terhadap transfer masuk;
2. Pengakuan pendapatan transfer berdasarkan PMK, apabila pada periode berjalan terdapat perubahan maka bukti memorial atas perubahan/koreksi pendapatan transfer tersebut dijadikan sebagai dokumen sumber;
3. Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya surat keputusan kepala daerah/peraturan kepala daerah maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.

Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari rekening Ka Umum Daerah.

Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Transfer masuk dalam bentuk hibah dalam bentuk mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

5. Akuntansi Pembiayaan

Definisi pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

1. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan;
2. pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan diakui sebagai berikut:

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar.

Akuntansi Pembiayaan Netto

adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode dicatat dalam Pos SILPA/SIKPA.

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan Laporan realisasi Anggaran.

6. Akuntansi Kas dan Setara Kas

- 1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas resiko dari perubahan nilai yang signifikan;
- 2) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas resiko perubahan nilai yang signifikan. Setara Kas antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah;
- 3) Kas dan setara kas pada Pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah;
- 4) Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Daerah yang berada dalam pengelolaan Pemegang Kas Daerah, baik dalam bentuk tunai maupun pada Bank;
- 5) Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang tidak dipergunakan lagi/dipertanggungjawabkan dan belum disetor ke Kas Daerah (Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan);
- 6) Kas di Bendahara Penerimaan adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Penerimaan yang belum dipergunakan secara langsung untuk operasional;
- 7) Kas di BLUD adalah kas dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah(AAK, RSUD dan RSJ) yang belum dipergunakan secara langsung untuk operasional;
- 8) Pengukuran kas dicatat sebesar nilai nominal artinya sebesar nilai rupiahnya. Saldo Kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

7. Akuntansi Piutang

- 1) Piutang merupakan hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah;
- 2) Piutang dinilai sebesar nilai nominal;
- 3) Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas Piutang tersebut. Untuk Piutang Pajak/Retribusi Daerah yang diakui sebagai Piutang bila sudah ada ketetapannya (SKP/SKPT/SKR);
- 4) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang;
- 5) Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah daerah. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 kalsifikasi sebgai berikut:
 - (1) Kualitas piutang lancar
 - (2) Kualitas piutang kurang lancar
 - (3) Kualitas piutang diragukan
 - (4) Kualitas piutang macet
- 6) Piutang disajikan sebagai bagian dari aset lancar.

8. Akuntansi Persediaan

- 1) Persediaan adalah barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- 2) Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

- 3) Persediaan disajikan sebesar:
 - (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
 - (2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
 - (3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi
- 4) Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik Persediaan secara periodik untuk persediaan ATK dan Bahan Kebersihan, dan persediaan dicatat dengan metode Perpetual untuk persediaan yang membutuhkan pengendalian yang kuat (sesuai Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi);
- 5) Penilaian persediaan, untuk penilaian yang pencatatannya secara periodik dinilai dengan harga beli terakhir, sedangkan persediaan yang pencatatannya perpetual dinilai secara FIFO.

9. Akuntansi Investasi

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- 2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasijangka pendek di debit dan kas di kas daerah di kredit(jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerahdi kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerahdi debit dan perubahan SAL di kredit.

Investasi meliputi :

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

- 1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan lembaga lainnya menggambarkan jumlah yang dibayarkan oleh pemerintah daerah untuk penyertaan modal pada BUMD di dalam dan luar negeri serta lembaga lainnya. Investasi ini diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi;
- 2) Dana yang dipersiapkan untuk penyertaan modal pada periode akuntansi berikutnya, namun belum memperoleh pengesahan berupa Peraturan Daerah untuk diklasifikasikan sebagai Dana Cadangan, dicatat sebagai bagian dari kelompok penyertaan modal pemerintah daerah;
- 3) Dibukukan berdasarkan harga perolehan atau nilai nominal yang disetorkan, termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;
- 4) Penyertaan modal pemerintah daerah dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga, jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas. jika kepemilikan kurang dari 20% maka dicatat dengan metode biaya (*Cost Method*).
- 5) Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- 6) Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Investasi Non Permanen

1) Investasi non permanen meliputi:

Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizeable value*), yaitu sebesar nilai kas yang

dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih. Pengakuan nilai investasi non permanen (Dana Bergulir/DB) dilakukan saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah atau Aset dengan pemenuhan salah satu kriteria:

- (1) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.
- (2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai.

Dana bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen Lainnya-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga dana bergulir yang tercatat di Neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Metode/dasar penilaian Investasi Jangka Panjang Non Permanen (dana bergulir) menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net realizable value*) yaitu dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

Dana Bergulir Diragukan Tertagih meliputi jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana Bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Akun lawan (*contra account*) dari Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang.

Jumlah potensi dana bergulir yang tidak tertagih ditentukan dengan penilaian umur piutang (*aging schedule*) berdasarkan jatuh tempo angsuran.

Kualitas Dana Bergulir dapat digolongkan kedalam 4 (empat) kategori:

- a) Kualitas Lancar
Umur dana Bergulir belum sampai jatuh tempo.
- b) Kualitas kurang lancar
Umur dana Bergulir setelah jatuh tempo sampai dengan 3 tahun

- c) Kualitas diragukan
Umur dana Bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun setelah jatuh tempo
- d) Kualitas Macet
Umur dana Bergulir lebih dari 5 tahun setelah jatuh tempo.

2) Penentuan besaran Penyisihan Piutang dana bergulir:

- 1) Kualitas lancar, sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari sisa dana bergulir yang belum terbayar dan belum sampai jatuh tempo;
- 2) Kualitas kurang lancar, sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dana bergulir yang belum terbayar dan telah jatuh tempo sampai dengan 3 tahun;
- 3) Kualitas diragukan, sebesar 50 % (lima puluh persen) dari dana bergulir yang belum terbayar setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada), dan telah jatuh tempo setelah 3 tahun sampai dengan 5 tahun;
- 4) Kualitas macet, sebesar 100 % (seratus persen) dari dana bergulir yang belum terbayar setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada), dan telah jatuh tempo setelah 5 tahun.

10. Akuntansi Aset Tetap dan Penyusutan

- 1) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perolehan Aset Tetap bersumber dari sebagian atau seluruh dana APBD, baik melalui pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan;
- 2) Aset Tetap terdiri atas kelompok:
 - (1) Tanah;
 - (2) Peralatan dan Mesin;
 - (3) Gedung dan Bangunan;
 - (4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - (5) Aset Tetap Lainnya;

(6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

- 3) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal Neraca dari semua jenis Aset Tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun dan akan dilanjutkan dalam tahun berikutnya;
- 4) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah;
- 5) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
- 6) Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (rincian ada pada Pergub Nomor 56 Tahun 2015);
- 7) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan;
- 8) Penyusutan aset tetap, menggunakan rumus metode garis lurus dan tidak menggunakan nilai residu (sesuai Buletin Teknis Nomor 18 Tahun 2015);
- 9) Aset Tetap akan dihapuskan apabila dalam keadaan rusak berat, berlebih, usang, hilang dan sebagainya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
- 10) Aset Tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah dan diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga penggantinya pada saat diperoleh;
- 11) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. (Rincian ada pad Pergub Nomor 56 Tahun 2015).

11. Akuntansi Dana Cadangan

- 1) Dana Cadangan adalah dana yang dibentuk untuk membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- 2) Jumlah yang diklasifikasikan ke dalam kelompok Dana Cadangan dan peruntukannya ditetapkan dengan peraturan daerah;
- 3) Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari rekening kas daerah ke rekening dana cadangan, Proses pemindahan ini harus melalui penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS;
- 4) Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS, terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

12. Akuntansi Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya adalah Aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar, Aset Tetap maupun Investasi Jangka Panjang.
- 2) Aset Lainnya diantaranya terdiri atas:
 - (1) Tagihan Jangka Panjang (Kewenangan PPKD)
 - (2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga (*Build Operate Transfer/BOT*) (Kewenangan PPKD)
 - (3) Aset lain-lain(Kewenangan PPKD)
 - (4) Aset Tak Berwujud; (Kewengan SKPD)
 - (5) Aset Lainnya.(Kewenangan SKPD)
- 3) Aset Lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal Tagihan Penjualan Angsuran dari hasil penjualan aset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak;
- 4) Aset lainnya yang berupa Aset Tidak Berwujud (ATB) tahun 2016 telah dilakukan Amortisasi, dengan menggunakan rumus metode garis lurus, dan tidak menggunakan nilai residu.

13. Akuntansi Kewajiban Jangka Pendek

- 1) Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- 2) Kewajiban Jangka Pendek diantaranya terdiri atas:
 - (1) Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
 - (2) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang jatuh tempo; dan
 - (3) Utang Jangka Pendek.
 - (4) Utang Belanja
 - (5) Pendapatan diterima dimuka
- 3) Kewajiban lancar dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- 4) Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi dimasa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari :
 - (1) Transaksi dengan pertukaran
 - (2) Transaksi tanpa pertukaran
 - (3) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah
 - (4) Kejadian yang diakui pemerintah

14. Akuntansi Kewajiban Jangka Panjang

- 1) Kewajiban Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban Jangka Panjang dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi/kota lainnya, maupun lembaga keuangan bank dan bukan bank;
- 2) Kewajiban Jangka Panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

15. Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Aset dengan Utang pemerintah daerah.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Dalam bab ini diuraikan secara rinci mengenai pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan, dimana pos Aset, Kewajiban, dan Ekuitas terdapat dalam Neraca, sedangkan pos Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan Pendapatan dan Beban terdapat pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih serta Laporan Perubahan Ekuitas. Disamping itu pula terdapat penjelasan mengenai aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Arus Kas.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan gambaran informasi mengenai realisasi Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit dan Pembiayaan komparatif dengan anggarannya dalam TA 2016.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Provinsi Jambi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016.

Laporan Operasional menyajikan Pendapatan sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali, dan Beban tahun berjalan (PSAP 12 paragraf 8).

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama TA 2016, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2016.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Pendapatan	<u>31 Desember 2016</u>	<u>31 Desember 2015</u>
	Rp3.394.795.872.563,54	Rp3.129.704.823.875,76

Sesuai susunan APBD setelah perubahan, maka perhitungan pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pada TA 2016 Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp3.433.921.466.750,82 dan terealisasi sebesar Rp3.394.795.872.563,54 atau

sebesar 99,00% dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2016 yang telah diterima di Kas Daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Periode 2016 dan 2015

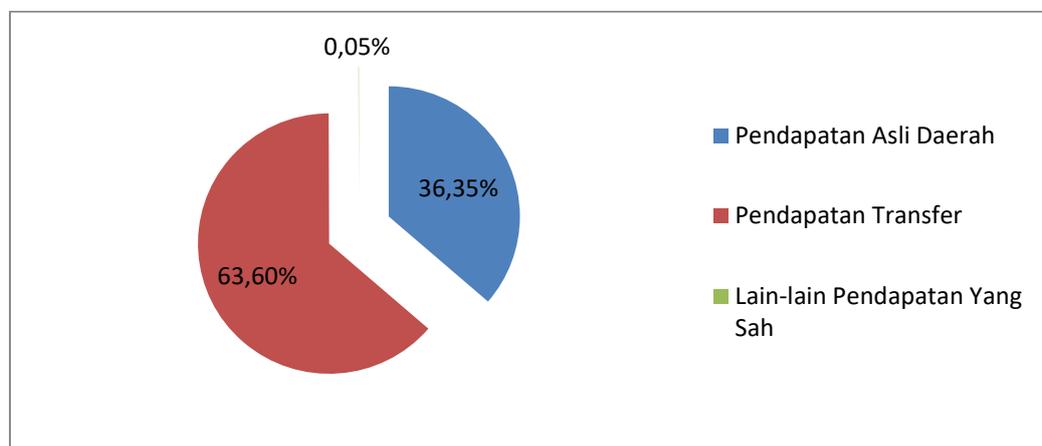
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Realisasi 2015
1.	Pendapatan Asli Daerah	1.321.867.908.750,82	1.233.514.664.109,54	99,00	1.241.223.028.011,76
2.	Pendapatan Transfer	2.110.651.958.000,00	2.159.679.608.454,00	102,32	1.887.051.548.864,00
3.	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	1.401.600.000,00	1.601.600.000,00	114,00	1.430.247.000,00
Jumlah		3.433.921.466.750,82	3.394.795.872.563,54	99,00	3.129.704.823.875,76

Berdasarkan rincian Pendapatan Daerah di atas terlihat bahwa hanya komponen pendapatan asli daerah yang tidak mencapai realisasi di atas 100%, bila dibandingkan dengan tahun 2015 naik sebesar Rp265.091.048.687,78 atau sebesar 8,00%.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan adalah sebesar 36,34% dan kontribusi Pendapatan Transfer terhadap total Pendapatan adalah sebesar 63,62% dan Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap total Pendapatan adalah sebesar 0,05% seperti terlihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 5.1 Komposisi Realisasi Pendapatan TA 2016



Berdasarkan grafik di atas, memperlihatkan masih adanya ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat untuk pendanaan kegiatan pemerintahan di daerah yaitu sebesar 63,62% dari keseluruhan pendapatan daerah.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah **31 Desember 2016** **31 Desember 2015**
Rp1.233.514.664.109,54 **Rp1.241.223.028.011,76**

Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sebesar Rp1.321.867.908.750,82 dengan realisasi sebesar Rp1.233.514.664.109,54 atau sebesar 93,32% atau turun sebesar Rp7.708.363.902,22 atau sebesar 0,62% bila dibandingkan realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2015 sebesar Rp1.241.223.028.011,76. Dengan realisasi tersebut, kontribusi PAD terhadap total Pendapatan sebesar 36,34%.

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Rincian atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2016 beserta kontribusinya terhadap total PAD sebagai berikut.

Tabel 5.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Periode 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	% thd PAD	Realisasi 2015
1.	Pendapatan Pajak Daerah	1.103.636.160.893,00	966.519.347.102,57	87,58	78,35	1.010.318.979.969,00
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	19.383.668.602,00	19.073.840.425,00	98,40	1,55	19.336.663.877,00
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	36.949.702.479,00	26.979.273.416,41	73,02	2,19	33.956.073.702,75
4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	161.898.376.776,82	220.942.203.165,56	136,47	17,91	177.611.310.463,01
	Jumlah	1.321.867.908.750,82	1.233.514.664.109,54	93,32	100	1.241.223.028.011,76

5.1.1.1.a Pendapatan Pajak Daerah **31 Desember 2016** **31 Desember 2015**
Rp966.519.347.102,57 **Rp1.010.318.979.969,00**

Pendapatan Pajak Daerah adalah pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pelaksanaan Pajak Daerah diatur berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2011 tentang pajak daerah Pada TA 2016, seluruh pendapatan pajak daerah dianggarkan dan direalisasikan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan merupakan pelunasan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Tahun 2016, kecuali Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan pajak rokok. Dinas Pendapatan Daerah membawahi 10 UPTD khusus untuk menangani Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan. UPTD tersebut berlokasi di Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Kerinci.

Pendapatan Pajak Daerah terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

Pendapatan Pajak Daerah TA 2016 dianggarkan sebesar Rp1.103.636.160.893,00 dengan realisasi sebesar Rp966.519.347.102,57 atau sebesar 87,58%, turun sebesar Rp43.799.632.866,43 atau sebesar 4,34% bila dibandingkan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2015 sebesar Rp1.010.318.979.969,00. Rincian anggaran dan jumlah Pendapatan Pajak Daerah yang dapat dipungut serta disetorkan ke Kas Daerah selama TA 2016 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Periode 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Realisasi 2015
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	330.950.000.000,00	339.443.747.598,00	102,57	321.804.013.917,00
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	335.250.730.000,00	243.963.112.550,00	72,77	270.301.438.650,00
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	282.231.166.893,00	249.250.031.331,57	88,31	282.231.166.893,00
4.	Pajak Air Permukaan	1.337.364.000,00	1.193.160.472,00	88,31	1.209.826.550,00
5.	Pajak Rokok	153.866.800.000,00	132.669.295.151,00	86,22	134.772.533.959,00
Jumlah		1.103.636.160.893,00	966.519.347.102,57	87,58	1.010.318.979.969,00

**5.1.1.1.b Pendapatan Retribusi Daerah 31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp19.073.840.425,00 Rp19.336.663.877,00**

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari retribusi daerah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.

Pendapatan Retribusi Daerah terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Pendapatan Retribusi Daerah TA 2016 dianggarkan sebesar Rp19.383.668.602,00 dengan realisasi sebesar Rp19.073.840.425,00 atau sebesar 98,25%, turun sebesar Rp262.823.452,00 atau sebesar 1,35% dari realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2015 sebesar Rp19.336.663.877,00. Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Daerah yang dipungut serta telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Periode 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Realisasi 2015
1.	Retribusi Jasa Umum	1.650.000.000,00	1.880.416.250,00	113,96	4.700.326.000,00
2.	Retribusi Jasa Usaha	17.108.668.602,00	16.779.499.295,00	97,90	11.014.063.877,00
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	25.000.000,00	24.850.000,00	99,40	38.905.000,00
4.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	200.000.000,00	55.443.080,00	27,72	3.163.204.000,00
5.	Retribusi Perpanjangan Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	400.000.000,00	333.631.800,00	83,41	420.165.000,00
Jumlah		19.383.668.602,00	19.073.840.425,00	98,25	19.336.663.877,00

**1. Retribusi Jasa Umum 31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp1.880.416.250,00 Rp4.700.326.000,00**

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta. Retribusi Jasa Umum diatur berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2012

Retribusi Jasa Umum TA 2016 dianggarkan sebesar Rp1.650.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.880.416.250,00 atau sebesar 113,96%, turun sebesar Rp2.819.909.750,00 atau sebesar 59,99 % dari realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2015 sebesar Rp4.700.326.000,00.

Seluruh realisasi Retribusi Jasa Umum dianggarkan dan direalisasikan oleh 3 (Tiga) yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur SKPD serta Dinas Pendidikan yang merupakan pelunasan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan Tahun 2016.

Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Umum yang dipungut serta telah disetorkan ke Kas Daerah selama TA 2016 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.5 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum Periode 2016 dan 2015

No.	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Realisasi 2015
1.	Retribusi Pelayanan Pendidikan Pelatihan Teknis	1.105.000.000,00	1.106.800.000,00	100,16	2.873.529.000,00
2.	Retribusi Pelayanan Kesehatan				962.883.000,00
3.	Retribusi Pelayanan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan	260.000.000,00	196.475.000,00	75,57	244.445.000,00
4.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	285.000.000,00	577.141.250,00	202,51	619.469.000,00
Jumlah		1.650.000.000,00	1.880.416.250,00	113,96	4.700.326.000,00

2. Retribusi Jasa Usaha 31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp16.779.499.295,00 Rp11.014.063.877,00

Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Retribusi Jasa Usaha diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2015 tanggal 1 September 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Retribusi Jasa Usaha dianggarkan sebesar Rp17.108.668.602,00 dengan realisasi sebesar Rp16.779.499.295,00 atau sebesar 97,90% naik sebesar Rp5.765.435.418,00 atau sebesar 52,34 % dari realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2015 sebesar Rp11.014.063.877,00.

Seluruh realisasi Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp16.779.499.295,00 dianggarkan dan direalisasikan oleh 16 SKPD dan berasal dari:

1. Penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan Tahun 2016 sebesar Rp16.692.349.295,00
2. Pelunasan Piutang TA 2015 sebesar Rp87.150.000 yang terdiri dari pembayaran piutang atas retribusi tempat penginapan pada kantor perwakilan Provinsi Jambi sebesar Rp8.900.000, pembayaran piutang retribusi pemakaaian kekayaan daerah penyewaan tanah dan bangunan pada BPKAD Rp1.000.000 serta pembayaran piutang atas retribusi pemakaaian kekayaan daerah Laboratorium pada Badan Lingkungan Hidup sebesar Rp77.250.000

Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Usaha yang dipungut serta telah disetorkan ke Kas Daerah selama TA 2016 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.6 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha Periode 2016 dan 2015

No.	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Realisasi 2015
1	Dinas Pemuda dan Olah Raga	2.683.334.646,00	2.920.577.000,00	108,84%	2.613.198.000,00
	Retribusi Pelayanan Tempat Olah Raga	2.683.334.646,00	2.920.577.000,00		2.613.198.000,00
2.	Dinas Perkebunan	1.350.000.000,00	1.605.590.970,00	118,93%	1.402.103.430,00
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (dinas perkebunan)	1.350.000.000,00	1.605.590.970,00		1.402.103.430,00
3	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	347.602.956,00	328.172.000,00	94,41%	290.340.150,00
	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	304.307.246,00	289.672.000,00		290.340.150,00
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	43.295.710,00	38.500.000,00		
5.	DINAS PEKERJAAN UMUM	210.000.000,00	367.863.589,00	175,17%	240.330.797,00
	Retribusi Pemakaaian Kekayaan daerah Laboratorium (DINAS PU)	210.000.000,00	367.863.589,00		240.330.797,00
6.	DINAS PARIWISATA	376.000.000,00	233.754.500,00	62,17%	256.285.500,00
	Retribusi pemakaaian kekayaan daerah - penyewaan tanah dan bangunan (dinas pariwisata)	376.000.000,00	233.754.500,00		256.285.500,00
7.	DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN	367.000.000,00	362.211.500,00	98,70%	467.674.000,00
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Dinas Pertanian Tanaman Pangan)	367.000.000,00	362.211.500,00		467.674.000,00

8.	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	4.492.600.000,00	3.693.362.600,00	82,21	2.496.504.500,00
	Retribusi pemakaiaan kekayaan daerah Laboratorium	20.000.000,00	44.052.000,00		
	Retribusi Pemakaiaan Kekayaan Daerah Ruang	8.200.000,00	4.800.000,00		
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	13.000.000,00	13.000.000,00		
	Retribusi Tempat Rekreasi	2.626.400.000,00	2.769.368.000,00		
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.825.000.000,00	862.142.600,00		2.496.504.500,00
9.	DINAS KOPERASI DAN UMKM	18.000.000,00	18.300.000,00	101,67	17.800.000,00
	Retribusi pemakaiaan kekayaan daerah Ruang	18.000.000,00	18.300.000,00		17.800.000,00
10.	Kantor Perwakilan Provinsi Jambi	2.630.000.000,00	2.017.925.000,00	76,73	2.412.875.000,00
	Retribusi Pemakaiaan Kekayaan Daerah Ruang	50.000.000,00	45.000.000,00		2.412.875.000,00
	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	2.580.000.000,00	1.972.925.000,00		
11.	BPKAD	1.219.031.000,00	1.014.037.500,00	83,18	806.952.500,00
	Retribusi [emakaiaan kekayaan daerah - penyewaan tanah dan bangunan	1.219.031.000,00	1.014.037.500,00		806.952.500,00
12.	Dinas Kehutanan	100.000.000,00	103.254.000,00	103,25	10.000.000,00
	Retribusi Pemakaiaan Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah dan Bangunan		750.000,00		
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah	100.000.000,00	102.504.000,00		10.000.000,00
13.	Badan Pendidikan dan Pelatihan	230.600.000,00	244.800.000,00	106,16	0
	Retribusi Pemakaiaan Kekayaan daerah Ruang	230.600.000,00	244.800.000,00		
13.	Dinas Kesehatan	450.000.000,00	382.680.000,00	85,04	0
	Retribusi Pemakaiaan Kekayaan Daerah Ruang	450.000.000,00	382.680.000,00		
14.	Dinas Pendidikan	8.500.000,00	9.300.000,00	109,41	0
	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	8.500.000,00	9.300.000,00		
15.	Dinas SosNakertrans	26.000.000,00	15.300.000,00	58,85	0
	Retribusi Pemakaiaan Kekayaan daerah - Ruang	14.500.000,00	3.300.000,00		
	Retribusi pelayanan tempat olah raga	11.500.000,00	12.000.000,00		
16.	Badan Lingkungan Hidup	2.600.000.000,00	3.462.370.636,00	132,01	0
	Retribusi Pemakaiaan kekayaan daerah Laboratorium	2.600.000.000,00	3.462.370.636,00		
	JUMLAH	17.108.668.602,00	16.779.499.295,00		11.014.063.877,00

3. Retribusi Perizinan Tertentu

31 Desember 2016
Rp24.850.000,00

31 Desember 2015
Rp38.905.000,00

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan retribusi pemberian izin trayek dari Dinas Perhubungan dan merupakan pelunasan atas SKRD Tahun 2016. Retribusi Perizinan Tertentu diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2012.

Retribusi Perizinan Tertentu dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00 terealisasi sebesar Rp24.850.000,00 turun sebesar Rp14.055.000,00 dari realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2015 sebesar Rp38.905.000,00s

4. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

31 Desember 2016

Rp55.443.080,00

31 Desember 2015

Rp3.163.204.000,00

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian gedung, pemakaian kendaraan/alat milik daerah. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2015.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp55.443.080,00 atau sebesar 27,72% turun sebesar Rp3.107.760.920,00 atau sebesar 98,24% dari realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2015 sebesar Rp3.163.204.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang dipungut serta telah disetorkan ke Kas Daerah selama TA 2016 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.7 Anggaran dan Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Periode 2016 dan 2015**

No.	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Realisasi 2015
1	Sewa Alat Berat (Dinas PU)	200.000.000,00	55.443.080,00	27,72	0
2	Sewa Gedung Sport Hall (Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	0	0	0	23.350.000,00
3	Badan Pendidikan dan Pelatihan (Aula)	0	0	0	391.605.000,00
	Sewa Aula Bandiklatda				102.400.000,00
	Sewa Kamar Asrama 1 dan 2				240.905.000,00
	Sewa Ruang Belajar				48.300.000,00
4	Taman Hutan Kenali (Dinas Kehutanan)	0	0	0	86.597.500,00
5	Sewa Tempat TMII (Kantor Perwakilan)	0	0	0	40.000.000,00
6	Laboretorium Bapeldalda (Badan Lingkungan Hidup)	0	0	0	2.614.051.500,00
7	Lapangan tenis (Dinas Pendidikan)	0	0	0	7.600.000,00
Jumlah		200.000.000,00	55.443.080,00	27,72	3.163.204.000,00

5. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja
31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp333.631.800,00 **Rp420.165.000,00**

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) diatur berdasarkan Peraturan daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tanggal 6 Maret 2012.

Retribusi IMTA dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp333.631.800,00 atau sebesar 83,41% turun sebesar Rp86.533.200,00 atau sebesar -28,87% dari realisasi Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) TA 2015 sebesar Rp420.165.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Perpanjangan Izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang dipungut serta telah disetorkan ke kas daerah selama TA 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.8 Anggaran dan Realisasi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Pemerintah Provinsi Jambi Periode 2016 dan 2015

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	Retribusi Perpanjangan izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	400.000.000	33.631.800	83,41%	420.165.000
	Jumlah	400.000.000	33.631.800	83,41%	420.165.000

5.1.1.1.c Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp26.979.273.416,41 **Rp33.956.073.702,75**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dianggarkan sebesar Rp36.949.702.479,00 dengan realisasi sebesar Rp26.979.273.416,41 atau sebesar 73,02%, turun sebesar Rp6.976.800.286,34 atau sebesar 20,54% dari realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2015 sebesar Rp33.956.073.702,75.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dianggarkan dan direalisasikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD yang berasal dari:

1. Bagian Laba Penyertaan pada:
 - 1) PT. Bank Jambi.
Akta notaris nomor : 81 tanggal 19 april 2016 tentang pemberian deviden tahun 2015 sebesar Rp.25.193.308.002,51
 - 2) PT. Bangun Aksrida.

Resume Rapat Umum Pemegang Saham melalui surat nomor : 291/V/2016 tanggal 11 Mei 2016 dengan deviden yang diperoleh tahun 2016 sebesar Rp598.776.233,-

2. Kontribusi atas Built over Transfer (BOT) dari:

- 1) PT.Eraguna Bumi Nusa.
Surat perjanjian kerja sama Nomor : 06/PK.GUB/PU/2014 pendapatan tahun 2016 sebesar Rp711.700.000
- 2) PT. Jambi Sapta Manunggal Pratama.
Surat perjanjian tanggal 27 Juni 1995
Jatuh tempo kontribusi tanggal 21 Januari sebesar Rp.250.000.000,-
- 3) PT. Simotha Putra Parayuda.
Surat perjanjian Nomor : 1A/KB/CHK/II/2004 tanggal 18 Februari 2004 pendapatan tahun 2016 sebesar Rp.225.429.380,00,-
- 4) PT Kurnia Properti
Surat perjanjian nomor : 07/PK.GUB/PU/2014 tentang Pembangunan dan pengelolaan kawasan Jambi Bisnis center dengan pola bangunan serah. Pada tahun 2016 belum memberikan kontribusi karena masih dalam proses pengajuan Hak pengelolaan lahan (HPL) ke Badan Pertanahan Nasional.

Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipungut serta telah disetorkan ke Kas Daerah selama TA 2016 adalah sebagai berikut

**Tabel 5.9 Anggaran dan Realisasi
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Periode 2016 dan 2015
(dalam rupiah)**

No.	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Realisasi 2015
1.	Bank Jambi	33.436.850.000,00	25.193.367.803,41	75,35	30.784.198.844,75
2.	PT JSP	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	225.000.000,00
3.	PT Simota Putra Parayuda	225.000.000,00	225.429.380,00	100,19	207.045.653,00
4.	PT Bangun Askrida	526.152.479,00	598.776.233,00	113,80	528.129.205,00
5.	Angso Duo	0,00	0,00	0,00	2.211.700.000,00
6.	Jambi Bisnis Centre	2.511.700.000,00	711.700.000,00	28,34	0,00
Jumlah		36.949.702.479,00	26.979.273.416,41	73,02	33.956.073.702,75

5.1.1.1.d Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp220.942.203.165,56 Rp177.611.310.463,01

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp161.898.376.776,82 dengan realisasi sebesar Rp220.942.203.165,56 atau sebesar 136,46%, naik sebesar Rp43.330.892.702,55 atau sebesar 24,39% dari realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2015 sebesar Rp177.611.310.463,01.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp220.942.203.165,56 termasuk didalamnya :

1. Pendapatan BLUD (RSUD, RSJ, AAK, LABKES) dengan realisasi sebesar Rp120.885.100.536,76.

2. Pendapatan dari penjualan aset daerah yang telah dilelang sebesar Rp131.475.000,00.

Rincian lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dapat dilihat pada **Lampiran I**

5.1.1.2 Pendapatan Transfer 31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp2.159.679.608.454,00 Rp1.887.051.548.864,00

Pendapatan Transfer ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 66 Tahun 2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Perubahan).

Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp2.110.651.958.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.159.679.608.454,00 atau sebesar 102,32%. Pendapatan Transfer TA 2016 naik sebesar Rp272.628.059.590,00 atau sebesar 14,44% dari realisasi Pendapatan Transfer TA 2015 sebesar Rp1.887.051.548.864,00.

Pendapatan Transfer dianggarkan dan direalisasikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan dan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2016 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.10 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Provinsi Jambi Periode 2016 dan 2015
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Realisasi 2015
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.493.838.758.000,00	1.547.888.628.151,00	103,62	1.419.079.798.364,00
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	616.813.200.000,00	611.790.980.303,00	99,19	467.971.750.500,00
Jumlah		2.110.651.958.000,00	2.159.679.608.454,00	102,32	1.887.051.548.864,00

5.1.1.2.a Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp1.547.888.628.151,00 Rp1.419.079.798.364,00

Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp1.493.838.758.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.547.888.628.151,00, naik sebesar Rp128.808.829.787,00 atau sebesar 9,07% dari realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2015 sebesar Rp1.419.079.798.364,00.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.11. Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Jambi Periode 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran TA 2016	Realisasi TA 2016	(%)	Realisasi TA 2015
1.	Dana Bagi Hasil Pajak	184.509.962.000	219.290.388.270	118,85%	179.892.405.250
2.	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	99.330.264.000	176.500.909.423	177,69%	172.076.759.114
3.	Dana Alokasi Umum	1.070.452.478.000	1.070.452.478.000	100,00%	1.009.165.864.000
4.	Dana Alokasi Khusus	139.546.054.000	81.644.852.458	58,51%	57.944.770.000
	JUMLAH	1.493.838.758.000	1.547.888.628.151	103,62%	1.419.079.798.364

Berdasarkan tabel diatas diketahui Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Provinsi Jambi dengan pencapaian tertinggi pada Dana Alokasi Umum sebesar 100,00%.

5.1.1.2.a.1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Bagi Hasil Pajak

31 Desember 2016 **31 Desember 2015**
Rp219.290.388.270,00 **Rp179.892.405.250,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar Rp184.509.962.000 dan realisasi sebesar Rp219.290.388.270,00 atau sebesar 118,85%, naik sebesar Rp39.397.983.020,00 atau sebesar 21,90% dari realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya TA 2015 sebesar Rp179.892.405.250 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.11.1. Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Jambi Periode 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	(%)	Realisasi 2015 (Rp)
1	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	122.130.588.000	160.653.101.862	122,49	145.892.283.250
2	Bagi Hasil PPH Pasal 25 dan 29	62.379.374.000	58.637.286.408	94,00	34.000.122.000
	JUMLAH	184.509.962.000	219.290.388.270	112,86	179.892.405.250

5.1.1.2.a.1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

31 Desember 2016 **31 Desember 2015**
Rp176.500.909.423,00 **Rp172.076.759.114,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dianggarkan sebesar Rp99.330.264.000,00 dan realisasi sebesar Rp176.500.909.423,00 atau sebesar 177,69% naik sebesar Rp4.424.150.309,00 atau sebesar 2,57% dari realisasi Transfer

Pemerintah Pusat - Lainnya TA 2015 sebesar Rp172.076.759.114 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.11.2. Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Provinsi Jambi Periode 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	%	Realisasi 2015 (Rp)
1	Iuran Hak Pengusaha Hutan	1.440.900.000	1.287.702.125	89,37%	28.300.064
2	Provisi Sumber Daya Hutan	3.745.857.000	2.113.408.883	56,42%	2.178.258.660
3	Iuran Tetap (Land Rent)	5.274.060.000	5.553.340.764	105,30%	5.860.602.979
4	Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti)	6.849.158.000	4.462.027.000	65,15%	24.892.786.125
5	Pertambangan Minyak Bumi	30.466.312.000	47.269.449.315	155,15%	53.878.443.124
6	Pertambangan Gas Bumi	42.215.234.000	104.760.308.300	248,16%	75.649.909.662
7	Bagi Hasil Cukai Tembakau	3.091.904.000	3.105.596.519	100,44%	2.171.083.000
8	BP-PBB	6.246.839.000	7.949.076.517	127,25%	7.417.375.500
	JUMLAH	99.330.264.000	176.500.909.423	188,82%	172.076.759.114

5.1.1.2.a.1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Alokasi Umum

31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp1.070.452.478.000,00 Rp1.009.165.864.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp1.070.452.478.000 dan realisasi sebesar Rp1.070.452.478.000 atau sebesar 100,00% naik sebesar Rp61.286.614.000,00 atau sebesar **5,73%** dari realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya TA 2015 sebesar Rp1.009.165.864.000,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.11.3. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum Provinsi Jambi Periode 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)		Realisasi 2015 (Rp)
1	Dana Alokasi Umum	1.070.452.478.000	1.070.452.478.000	100,00%	1.009.165.864.000
	SUB JUMLAH	1.070.452.478.000	1.070.452.478.000	100,00%	1.009.165.864.000

5.1.1.2.a.1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Alokasi Khusus

31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp81.644.852.458,00 Rp57.944.770.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Alokasi Khusus dianggarkan sebesar Rp139.546.054.000,00 dan realisasi sebesar Rp81.644.852.458,00 atau sebesar 58,51% naik sebesar Rp23.700.082.458 atau sebesar 29,03% dari realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya TA 2015 sebesar Rp57.944.770.000,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.11.4. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Provinsi Jambi Periode 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	%
1	Dana Alokasi Khusus Fisik	137.628.814.000	80.040.542.458	58,16%
	Dak Bidang Kesehatan	31.656.298.000	25.325.038.000	80,00%
	Dak Bidang Infrastruktur jalan	5.447.650.000	-	0,00%
	Dak Bidang Infrastruktur Irigasi	15.608.223.000	-	0,00%
	Dak Bidang Kelautan dan Perikanan	4.191.650.000	4.191.650.458	100,00%
	Dak Bidang Pertanian	11.445.993.000	21.643.372.000	189,09%
	Dak Bidang Kehutanan	1.179.946.000	394.551.000	33,44%
	Dak Bidang Keselamatan Transportasi Darat	1.222.308.000	6.669.958.000	545,69%
	Dak Bidang Energi Skala Kecil	66.133.051.000	21.383.004.000	32,33%
	Dak Bidang Prasarana Pemda	743.695.000	432.969.000	58,22%
2.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1.917.240.000	1.604.310.000	83,68%
	Dak Akreditasi Rumah sakit	417.240.000	104.310.000	25,00%
	Dak Peningkatan Pengelolaan Koperasi	1.500.000.000	1.500.000.000	100,00%
	JUMLAH TOTAL	139.546.054.000	81.644.852.458	58,51%

5.1.1.2.b Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

31 Desember 2016
Rp611.790.980.303,00

31 Desember 2015
Rp467.971.750.500,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya dianggarkan sebesar Rp616.813.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp611.790.980.303,00 atau sebesar 99,18% naik sebesar Rp139.319.229.803 atau sebesar 22,94% dari realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya TA 2015 sebesar Rp467.971.750.500,00 dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.12. Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Pusat Lainnya
Provinsi Jambi Periode 2016 dan 2015**

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	%	Realisasi 2015 (Rp)
1	Dana Insentif	5,000,000,000	5,000,000,000	100.00%	24,129,930,000
2	Dana Proyek Pemerintah Daerah	-	2,853,479,000	0.00%	1,812,783,000
3	Bantuan Operasional Sekolah	611,813,200,000	603,937,501,303	98.71%	442,029,037,500
	Jumlah	616,813,200,000	611,790,980,303	99,18%	467,971,750,500

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

31 Desember 2016
Rp1.601.600.000,00

31 Desember 2015
Rp1.430.247.000,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2016 dianggarkan sebesar Rp1.401.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.601.600.000,00 atau 114,27 naik sebesar Rp171.353.000,00 atau sebesar 11,98% dari realisasi Lain – lain Pendapatan yang Sah TA 2015 sebesar Rp1.430.247.000,00 dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.13. Anggaran dan Realisasi
Lain-lain Pendapatan Yang Sah Provinsi Jambi Periode 2016 dan 2015**

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	%	Realisasi 2015 (Rp)
1.	Pendapatan Hibah/ Sumbangan Jasa Raharja	1.401.600.000	1.401.600.000	100,00%	1.430.247.000
2.	Hibah Daerah untuk Program Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2016	0	200.000.000	0	0
	Jumlah	1.401.600.000	1.601.600.000	100,00%	1.430.247.000

5.1.2. Belanja

31 Desember 2016
Rp2.893.449.001.005,34

31 Desember 2015
Rp2.838.721.753.215,74

Secara garis besar, Belanja terdiri dari dua bagian yakni Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal) dan Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Belanja Tidak Terduga). Anggaran dan realisasi atas

masing-masing pos belanja sesuai susunan APBD tersebut, disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Belanja Daerah TA 2016 dianggarkan sebesar Rp3.102.331.335.892,62 dengan realisasi sebesar Rp2.893.449.001.005,34 atau sebesar 93,27%, naik sebesar Rp54.727.247.789,60 atau sebesar 1,93% dari realisasi Belanja TA 2015 sebesar Rp2.838.721.753.215,74. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2016 sebagai berikut.

Tabel 5.14 Anggaran dan Realisasi Belanja Provinsi Jambi TA 2016 dan TA 2015

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Realisasi 2015
1.	Belanja Operasi	2.090.821.953.779,62	1.947.816.538.589,33	93,16	2.046.188.302.840,85
2.	Belanja Modal	1.009.634.416.613,00	945.539.006.404,01	93,65	791.487.340.374,89
3.	Belanja Tak Terduga	1.874.965.500,00	93.456.012,00	4,98	1.046.110.000,00
Jumlah		3.102.331.335.892,62	2.893.449.001.005,34	93,27	2.838.721.753.215,74

5.1.2.1 Belanja Operasi

31 Desember 2016 **31 Desember 2015**
Rp1.947.816.538.589,33 **Rp2.046.188.302.840,85**

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp2.090.821.953.779,62 dengan realisasi sebesar Rp1.947.816.538.589,33 atau sebesar 93,16%, turun sebesar Rp98.371.764.251,52 atau sebesar 4,80% dari realisasi Belanja Operasi TA 2015 sebesar Rp2.046.188.302.840,85. Rincian Belanja Operasi dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 5.15 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Provinsi Jambi TA 2015 dan TA 2014

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Realisasi 2015
1.	Belanja Pegawai	663.597.473.575,25	623.561.725.029,33	93,97	604.076.078.021,00
2.	Belanja Barang	792.061.280.204,37	646.197.608.660,00	87,78	660.556.655.224,85
3.	Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Hibah	635.163.200.000,00	678.057.204.900,00	99,03	781.555.569.595,00
5.	Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		2.090.821.953.779,62	1.947.816.538.589,33	93,16	2.046.188.302.840,85

5.1.2.1.a Belanja Pegawai

31 Desember 2016 **31 Desember 2015**
Rp623.561.725.029,33 **Rp604.076.078.021,00**

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp663.597.473.575,25 dengan realisasi sebesar Rp623.561.725.029,33 atau sebesar 93,97% dari anggarannya, naik sebesar Rp53.339.301.575,33 atau sebesar 9,35% dari realisasi Belanja

Pegawai TA 2015 sebesar Rp570.222.423.454,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.16 Rincian Belanja Pegawai Per Objek Provinsi Jambi Periode 2016

(dalam rupiah)

N o.	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Realisasi 2015
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	413.533.184.933,46	402.250.087.808,33	97,27	388.823.307.432,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	147.310.721.631,00	140.408.564.400,00	95,31	138.594.534.200,00
3.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	7.922.801.863,13	7.724.800.000,00	97,50	7.361.500.000,00
4.	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	145.006.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	30.704.265.774,00	19.757.352.306,00	64,35	30.517.782.071,00
6.	Belanja Uang Lembur	642.871.600,00	536.967.490,00	83,53	512.823.800,00
7.	Belanja Pegawai BLUD	63.014.621.773,66	52.588.453.025,00	83,45	38.266.130.518,00
8.	Belanja Honorarium Operator LPPK dan TEPR	324.000.000,00	295.500.000,00	91,20	0,00
	Jumlah	663.597.473.575,25	623.561.725.029,33	93,97	604.076.078.021,00

Atas realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp623.561.725.029,33 dianggarkan dan direalisasikan oleh 46 SKPD dengan rincian:

1. Belanja Pegawai TA 2016 sebesar Rp623.561.725.029,33
2. Pembayaran Utang/Belanja TA 2015 sebesar Rp0,00

Belanja Pegawai sebesar Rp623.561.725.029,33 termasuk didalamnya Belanja Pegawai BLUD (RSUD, RSJ, AAK, LABKES) dengan realisasi sebesar Rp52.588.453.025,00.

Rincian belanja pegawai per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 2**

5.1.2.1.b Belanja Barang

31 Desember 2016
Rp646.197.608.660,00

31 Desember 2015
Rp660.556.655.224,85

Belanja Barang TA 2016 dianggarkan sebesar Rp792.061.280.204,37 dengan realisasi sebesar Rp646.197.608.660,00 atau sebesar 81,58% dari anggarannya, turun sebesar Rp14.359.046.564,85 atau sebesar 2,17% dari realisasi Belanja Barang TA 2015 sebesar Rp660.556.655.224,85, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.17 Rincian Belanja Barang Provinsi Jambi Periode 2016

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Realisasi 2015
1	belanja bahan pakai habis	34.536.178.114,00	61.669.757.355,00	67,34	36.853.512.961,00
2	belanja bahan/material	55.401.240.413,00	51.147.875.614,00	23,99	41.250.673.970,03
3	belanja jasa kantor	297.950.622.379,37	226.726.702.993,00	(12,78)	259.941.488.108,97
4	belanja premi asuransi	3.195.291.000,00	3.129.924.671,00	54,69	2.023.402.264,56
5	belanja perawatan kendaraan bermotor	20.895.140.021,00	17.014.900.690,00	(9,88)	18.879.493.124,00
6	belanja cetak dan penggandaan	21.865.150.403,00	19.860.655.238,00	(7,55)	21.482.974.389,00
7	belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	4.209.808.210,00	3.259.621.026,00	(15,79)	3.870.685.431,00
8	belanja sewa alat berat	25.000.000,00	25.000.000,00	(97,97)	1.229.549.000,00
9	belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	6.978.644.000,00	6.550.175.076,00	5,19	6.226.940.676,00
10	belanja makanan dan minuman	22.411.275.975,00	13.416.117.859,00	(50,10)	26.886.102.447,00
11	belanja pakaian dinas dan atributnya	3.789.341.500,00	3.553.467.900,00	(13,45)	4.105.451.000,00
12	belanja pakaian kerja	1.753.418.750,00	1.715.624.348,00	14,33	1.500.563.700,00
13	belanja pakaian khusus dan hari - hari tertentu	3.058.301.000,00	2.993.416.700,00	(9,45)	3.305.697.900,00
14	belanja perjalanan dinas	152.622.435.949,00	131.171.508.761,00	(4,76)	137.732.610.573,50
15	belanja pemeliharaan	20.557.661.080,00	18.066.533.629,00	(6,33)	19.288.020.486,79
16	belanja jasa konsultasi	11.655.750.000,00	10.330.996.850,00	29,18	7.997.275.900,00
17	belanja beasiswa pendidikan PNS	911.000.000,00	739.000.000,00	(39,38)	1.219.000.000,00
18	belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	6.956.181.300,00	5.191.485.850,00	(32,14)	7.650.059.658,00
19	belanja honorarium PNS	29.000.224.100,00	25.848.340.100,00	12,85	22.904.716.135,00
20	belanja honorarium non PNS	45.246.302.010,00	43.786.504.000,00	20,93	36.208.437.500,00
	Jumlah	694.106.652.204,37	646.197.608.660,00	5,25	660.556.655.224,85

Belanja Barang sebesar Rp646.197.608.660,00 termasuk didalamnya Belanja Barang BLUD (RSUD, RSJ, AAK, LABKES) dengan realisasi sebesar Rp47.632.002.515,00.

Rincian belanja barang per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 3**

5.1.2.1.c Belanja Subsidi 31 Desember 2016
Rp0,00 31 Desember 2015
Rp0,00

Belanja Subsidi TA 2016 dianggarkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Belanja Subsidi tersebut pada TA 2015 dianggarkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.1.2.1.d Belanja Hibah 31 Desember 2016
Rp678.057.204.900,00 31 Desember 2015
Rp781.555.569.595,00

Belanja Hibah TA 2016 dianggarkan sebesar Rp635.163.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp678.057.204.900,00 atau sebesar 106,75%, turun sebesar Rp103.498.364.695,00 atau sebesar 13,24% dari realisasi Belanja Hibah TA 2015 sebesar Rp781.555.569.595,00.

Anggaran, realisasi, dan penerima hibah TA 2016 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.18 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Provinsi Jambi TA 2016

(dalam rupiah)

No.	Penerima Hibah	Anggaran	Realisasi
	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi		
1	Belanja Hibah kepada POLDA Jambi	2.600.000.000,00	2.596.400.000,00
2	Belanja Hibah kepada KONI	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
3	Belanja Hibah kepada Majelis Ulama Indonesia	500.000.000,00	500.000.000,00
4	Belanja Hibah kepada PMI	250.000.000,00	0,00
	Belanja Hibah Dana BOS		
5	Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Batanghari	41.995.950.000,00	41.836.680.000,00
6	Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Kerinci	33.120.550.000,00	32.296.700.000,00
7	Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Merangin	56.736.800.000,00	56.437.150.000,00
8	Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Muaro Jambi	55.400.150.000,00	55.071.400.000,00
9	Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Sarolangun	44.741.100.000,00	44.711.750.000,00
10	Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Tanjung Jabung Barat	46.455.300.000,00	46.148.500.000,00
11	Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Tanjung Jabung Timur	31.987.850.000,00	31.710.750.000,00
12	Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Tebo	49.273.300.000,00	48.598.906.300,00
13	Satuan Pendidikan Dasar Kota Jambi	99.682.550.000,00	98.327.085.000,00
14	Satuan Pendidikan Dasar Kota Sungai Penuh	16.545.900.000,00	16.253.000.000,00
15	Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Bungo	53.210.050.000,00	53.086.800.000,00
16	Satuan Pendidikan Menengah Kabupaten Batanghari	5.930.250.000,00	5.746.300.000,00
17	Satuan Pendidikan Menengah Kabupaten Bungo	7.718.200.000,00	7.718.200.000,00
18	Satuan Pendidikan Menengah Kabupaten Kerinci	4.704.350.000,00	4.704.350.000,00
19	Satuan Pendidikan Menengah Kabupaten	7.293.400.000,00	7.200.900.000,00

Tabel 5.20 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2016 dan TA 2015

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Realisasi 2015
1.	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	498.989.207.254,87	399.535.722.420,50	80,07	467.708.759.824,00
2.	Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah lainnya	8.731.600.000,00	0,00	0,00	118.100.000.000,00
3.	Transfer Bantuan Keuangan lainnya	1.779.661.570,00	1.500.245.247,00	84,30	1.220.828.925,00
Jumlah		509.500.468.824,87	401.035.967.667,50	78,71	587.029.588.749,00

5.1.3.a Bagi Hasil Pajak

31 Desember 2016
Rp399.535.722.420,50

31 Desember 2015
Rp467.708.759.824,00

Bagi Hasil Pajak Provinsi Jambi dialokasikan ke Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp498.989.207.254,87 dengan realisasi sebesar Rp399.535.722.450,00 atau 80,07%, turun sebesar Rp68.173.037.403,50 atau sebesar 14,57% dari Transfer Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota TA 2015 sebesar Rp467.708.759.824,00. Rincian Transfer Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota/Desa adalah sebagai berikut.

Tabel 5.21 Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Provinsi Jambi TA 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Realisasi 2015
1.	Kota Jambi	79.553.047.058,27	66.598.538.835,98	83,72	73.840.521.333,00
2.	Kabupaten Batang Hari	42.540.048.751,26	33.699.973.637,98	79,22	39.384.986.662,00
3.	Kabupaten Muaro Jambi	44.240.858.026,26	35.281.572.103,57	79,75	41.978.055.822,00
4.	Kabupaten Bungo	48.680.849.565,26	38.991.340.072,02	80,10	46.554.002.927,00
5.	Kabupaten Tebo	42.116.010.920,26	33.425.418.195,06	79,37	39.570.746.979,00
6.	Kabupaten Kerinci	36.821.526.132,76	29.012.937.246,60	78,79	34.029.711.288,00
7.	Kabupaten Merangin	45.676.031.949,26	36.872.196.950,03	80,73	43.264.092.156,00
8.	Kabupaten Sarolangun	42.606.090.042,76	33.940.901.349,03	79,66	39.561.912.499,00
9.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	43.421.083.735,26	33.848.239.999,36	77,95	40.308.834.041,00
10.	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	38.390.875.414,26	30.086.019.701,00	78,37	36.203.188.890,00
11.	Kota Sungai Penuh	34.942.785.659,26	27.778.584.329,87	79,50	33.012.707.227,00
Jumlah		498.989.207.254,87	399.535.722.420,50	80,07	462.356.647.416,00

Belanja tersebut merupakan belanja bagi hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Jambi

5.1.3.b Bantuan Keuangan

31 Desember 2016
Rp0,00

31 Desember 2015
Rp118.100.000.000,00

Realisasi Bantuan Keuangan tahun 2016 merupakan konversi dari Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota yang dianggarkan sebesar Rp8.731.600.000,00 direalisasikan sebesar Rp0,00.

5.1.3.c Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

31 Desember 2016
Rp1.500.245.247,00

31 Desember 2015
Rp1.220.828.925,00

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya merupakan konversi Bantuan Keuangan Partai Politik yang dianggarkan sebesar Rp1.779.661.570,00 dengan realisasi sebesar Rp1.500.245.247,00 atau sebesar 84,30%, naik sebesar Rp279.416.322,00 atau sebesar 22,89% dari realisasi Transfer Lainnya TA 2014 sebesar Rp1.220.828.925,00.

Tabel 5.22 Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Lainnya TA 2016

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik			
1	Belanja Bantuan Kepada Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	87.998.806,00	87.998.806,00	100,00
2	Belanja Bantuan kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	110.159.896,00	110.159.896,00	100,00
3	Belanja Bantuan kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	72.198.033,00	72.198.033,00	100,00
4	Belanja Bantuan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	214.992.011,00	214.992.011,00	100,00
5	Belanja Bantuan kepada Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	174.660.207,00	174.660.207,00	100,00
6	Belanja Bantuan kepada Partai Demokrat	251.667.134,00	251.667.134,00	100,00
7	Belanja Bantuan kepada Partai Amanat Nasional (PAN)	149.067.813,00	149.067.813,00	100,00
8	Belanja Bantuan kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	161.079.124,00	80.539.562,00	0,00
9	Belanja Bantuan kepada Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	107.180.217,00	107.180.217,00	100,00
10	Belanja Bantuan kepada Partai Bulan Bintang (PBB)	52.904.808,00	52.904.808,00	100,00
11	Belanja Bantuan kepada Partai Golongan Karya (GOLKAR)	397.753.520,00	198.876.760,00	0,00
	JUMLAH	1.779.661.570,00	1.500.245.247,00	84,30

5.1.4 Pembiayaan

31 Desember 2016
Rp177.910.337.966,67

31 Desember 2015
Rp473.956.856.055,65

Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp177.910.337.966,67 dengan realisasi sebesar Rp177.910.337.966,67 atau turun sebesar Rp296.046.518.088,98 atau sebesar 62,47% dari realisasi Pembiayaan TA 2015 sebesar Rp473.956.856.055,65.

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Provinsi Jambi, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Provinsi Jambi terutama

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA Pemerintah Provinsi Jambi TA 2016 adalah sebesar Rp278.221.241.857,37 yang naik sebesar Rp100.310.903.890,70 atau 56,38% dibandingkan dengan SiLPA TA 2015 sebesar Rp177.910.337.966,67.

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

<u>31 Desember 2016</u>	<u>31 Desember 2015</u>
Rp278.221.241.857,37	Rp177.910.337.966,67

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Saldo Anggaran Lebih Akhir Pemerintah Provinsi Jambi TA 2016 adalah sebesar Rp278.221.241.857,37 yang naik sebesar Rp100.310.903.890,70 atau 56,38% dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2015 sebesar Rp177.910.337.966,67.

Laporan Perubahan SAL tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp177.910.337.966,67.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2015 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2016 sebesar Rp177.910.337.966,67.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran TA 2016 sebesar Rp278.221.241.857,37 Sehingga total SiLPA TA 2015 dan TA 2016 sebesar Rp278.221.241.857,37.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Adalah koreksi kesalahan Pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya sebesar (Rp0,00).

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp278.221.241.857,37.

5.3 Neraca

5.3.1. Aset

31 Desember 2016
Rp6.230.703.051.277.51

31 Desember 2015
Rp5.390.176.322.973,96

Nilai Aset per 31 Desember 2016 sebesar Rp6.230.703.051.277.51 naik sebesar Rp840.526.728.303,55 dibandingkan nilai per 31 Desember 2015 sebesar Rp5.390.176.322.973,96. Aset sebesar Rp6.230.703.051.277.51 ini belum termasuk Aset Penyerahan Personil, Sarana dan Prasarana dan Dokumen (P2D) dari Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi, karena data aset belum valid, hal ini mengacu kepada Berita Acara Serah Terima Personil, Sarana dan Prasarana dan Dokumen pasal 4 “ Bilamana terdapat daftar inventaris atau materi yang tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III dari Berita Acara ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), yang belum/tidak lengkap dan/ atau terdapat kekeliruan, PIHAK KEDUA mengajukan kepada PIHAK KESATU untuk dilakukan klarifikasi dan perbaikan”. Terkait dengan pasal 4 tersebut Pemerintah Provinsi Jambi telah membuat Naskah Kesepakatan bersama Pemerintah Kabupaten/Kota agar PIHAK KESATU segera melakukan Klarifikasi dan perbaikan terhadap daftar Sarana dan Prasarana (Inventaris) Barang Milik Daerah dari SKPD terkait yang belum/tidak lengkap dan/atau terdapat kekeliruan yang telah diserahkan kepada PIHAK KEDUA. Aset sebesar Rp6.181.567.488.368,29 tersebut dengan rincian sebagai berikut.

5.3.1.1 Aset Lancar

31 Desember 2016
Rp660.157.534.895.60

31 Desember 2015
Rp477.729.819.138,96

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2016 sebesar Rp660.157.534.895.60 naik sebesar Rp182.427.715.756,64 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp477.729.819.138,96. Rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2016 dan 2015 sebagai berikut.

Tabel 5.25 Rincian Aset Lancar

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
1.	Kas di Kas Daerah	244.727.485.151,92	157.647.565.388,98
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	50.000,00	24.730.200,00
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
4.	Kas di Bendahara BLUD	33.493.706.705,45	20.238.042.377,69
5.	Kas Lainnya	41.747.722.420,31	39.786.901.592,32
6.	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
7.	Piutang Pajak	51.991.300,00	51.991.300,00
8.	Piutang Retribusi	962.884.100,00	969.222.400,00
9.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang dipisahkan	2.657.193.231,00	1.566.556.857,00
10.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	49.306.160.835,00	3.662.679.133,25

11.	Piutang Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
12.	Piutang Lainnya	0,00	0,00
13.	Penyisihan Piutang	(1.665.359.059,83)	(1.338.798.576,79)
14.	Belanja Dibayar di Muka	982.645.319,75	531.343.107,00
15.	Persediaan	287.893.054.891,99	254.589.585.359,51
Jumlah		660.157.534.895,60	477.729.819.138,96

(dalam rupiah)

5.3.1.1.a Kas di Kas Daerah **31 Desember 2016** **31 Desember 2015**
Rp244.727.485.151,92 **Rp157.647.565.388,98**

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2016 sebesar Rp244.727.485.151,92 naik sebesar Rp87.079.919.762,94 dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp157.647.565.388,98. Rincian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2016 dan 2015 sebagai berikut.

Tabel 5.26 Rincian Kas di Kas Daerah

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
1.	Kas di Bank Jambi (Giro)	77.727.485.151,92	15.647.565.388,98
2.	Deposito (1 bulan)	167.000.000.000,00	142.000.000.000,00
Jumlah		244.727.485.151,92	157.647.565.388,98

1. Kas di Bank Jambi (Giro) sebesar Rp77.727.485.151,92 merupakan saldo kas di kas daerah per 31 Desember 2016 pada rekening giro Kas Umum Daerah dengan nomor rekening 101431703. Saldo akhir rekening giro Kas Umum Daerah tersebut sebesar Rp119.475.207.572,23, termasuk didalamnya terdapat Kas Lainnya (CaLK nomor 5.1.1.1.e) sebesar Rp41.747.722.420,31.
2. Deposito (1 bulan) sebesar Rp167.000.000.000,00 merupakan saldo Deposito milik Pemerintah Provinsi Jambi per 31 Desember 2016 dengan jangka waktu satu bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.27 Rincian Deposito

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
1.	Deposito Bank BRI	55.000.000.000,00	60.000.000.000,00
2.	Deposito Bank BTN	52.000.000.000,00	22.000.000.000,00
3.	Deposito Bank BNI	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00
Jumlah		167.000.000.000,00	142.000.000.000,00

1) Deposito Bank BRI

Deposito pada Bank BRI adalah sebesar Rp55.000.000.000,00 dengan tingkat suku bunga flugtuatif per tahun dan terdiri dari 5 (lima) sertifikat deposito.

2) Deposito Bank BTN

Deposito pada Bank BTN adalah sebesar Rp52.000.000.000,00 dengan tingkat suku bunga plugtuatif per tahun terdiri dari 9 (sembilan) sertifikat deposito.

3) Deposito Bank BNI

Deposito pada Bank BNI adalah sebesar Rp60.000.000.000,00 dengan tingkat suku bunga plugtuatif per tahun terdiri dari 6(enam)sertifikat.

Rincian saldo deposito dapat dilihat dalam **Lampiran 5**.

5.3.1.1.b Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2016 **31 Desember 2015**
Rp0,00 **Rp0,00**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00, tidak ada perbedaan dengan saldo tahun 2015 sebesar Rp0,00.

5.3.1.1.cKas di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2016 **31 Desember 2015**
Rp50.000,00 **Rp24.730.200,00**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2016 sebesar 50.000,00, turun sebesar Rp24.680.200,00dibanding dengan saldo tahun 2015 sebesar Rp24.730.200,00.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan tersebut sebagai berikut.

Tabel 5.28 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

No.	Uraian	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
1.	BLHD	0,00	23.223.200,00
2.	Disbudpar	0,00	7.000,00
3.	Dinas Kehutanan	50.000,00	1.500.000,00
	Jumlah	50.000,00	24.730.200,00

Saldo awal 1 Januari 2016 sebesar Rp24.730.200,00telah setor ke kas daerah seluruhnya pada tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut:

1. Kas di Bendahara Penerimaan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi sebesar Rp. 23.223.200,00 merupakan pendapatan Retribusi Laboratorium telah disetor ke Kas Daerah per tanggal 26 Januari 2016 dengan Nomor STS: 0007a/STS/BLHD/I/2016.
2. Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi sebesar Rp. 7.000,00 merupakan pendapatan Retribusi Karcis Tanda Masuk Museum Siginjeitelahdisetor ke Kas Daerah per tanggal 20 Januari 2016 dengan Nomor STS: 0003/STS/DISBUDPAR/I/2016.
3. Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi sebesar Rp. 1.500.000,00 merupakan pendapatan Retribusi Taman Hutan Kenalitelahdisetor ke Kas Daerah per tanggal 29 Januari 2016 dengan Nomor STS: 0001/STS/DISHUT/I/2016.

Saldo kas dibendahara penerimaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp50.000,00 merupakan pendapatan Retribusi Taman Hutan Kenali yang terlambat disetor, dan disetor pertanggal 05 Januari 2017 dengan Nomor STS: 0015/STS/DISHUT-XII/2016.

5.3.1.1.d Kas di Bendahara BLUD

31 Desember 2016 **31 Desember 2015**
Rp33.493.706.705,45 **Rp20.238.042.377,69**

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2016 sebesar Rp33.493.706.705,45 naik sebesar Rp13.255.664.327,76 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp20.238.042.377,69. Rincian Kas di Bendahara BLUD sebagai berikut:

Tabel 5.29 Rincian Kas di Bendahara BLUD

(dalam rupiah)

No.	BLUD	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
1.	BLUD AAK	148.521.163,35	481.197.236,26
2.	BLUD Balai Lab Kesehatan	458.121.903,00	0,00
2.	BLUD RSUD Raden Mattaher	27.203.545.047,10	14.047.481.671,43
3.	BLUD RSJ	5.683.518.592,00	5.709.363.470,00
Jumlah		33.493.706.705,45	20.238.042.377,69

1) BLUD Akademi Analisis Kesehatan (AAK)

Kas di Bendahara Penerimaan BLUD AAK per 31 Desember 2016 sebesar Rp148.521.163,35 yang disimpan pada Bank Bukopin nomor rekening 2801200149 atas nama BLUD Akademi Analisis Kesehatan.

2) BLUD Balai Laboratorium Kesehatan

Kas di BLUD Balai Laboratorium Kesehatan per 31 Desember 2016 sebesar Rp458.121.903,00 yang disimpan pada Bank BNI nomor rekening 0163725421 atas nama BLUD Balai Labkes Jambi.

3) BLUD RSUD Raden Mattaher

Kas di Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Raden Mattaher per 31 Desember 2016 sebesar Rp27.203.545.047,10 yang disimpan pada Bank Jambi dengan nomor rekening 101006875 atas nama BLUD RSUD Raden Mattaher.

4) BLUD RSJ Daerah

Kas di Bendahara Penerimaan BLUD RSJ Daerah per 31 Desember 2016 sebesar Rp5.683.518.592,00 terdiri dari:

- a) Kas yang disimpan pada Bank BNI dengan nomor rekening 0186729097 atas nama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi sebesar Rp 5.668.645.892,00;
- b) Kas tunai di Bendahara Pengeluaran BLUD dalam brangkas yang dicuri oleh pihak yang belum diketahui (maling) sebesar Rp12.100.000,00. Hal ini sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/B-205/II/2016/SPKT I tanggal 29 Februari 2016 dari Pihak Kepolisian Sektor Kota Baru;
- c) Kas tunai di Bendahara Penerimaan BLUD per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.772.700,00.

5.3.1.1.e Kas lainnya	<u>31 Desember 2016</u>	<u>31 Desember 2015</u>
	Rp41.747.722.420,31	Rp39.786.901.592,32

Saldo Kas Lainnya adalah Kas yang dibatasi penggunaannya. Kas lainnya sebesar Rp41.747.722.420,31 terdiri dari.

1. Setoran Ganti Rugi Tegakan dari PT. WKS sebesar Rp35.591.895.904,80 dan jasa gironya sebesar Rp2.327.838.908,49 yang salah setor ke Kas Daerah, seharusnya disetor ke Kas Negara
2. Setoran PT. PKP sebesar Rp3.827.987.607,02 (Rp3.666.337.500,00 serta jasa gironya Rp161.650.107,02) berupa kontribusi kerjasama BOT Jambi Bisnis Center yang belum dapat diakui sebagai pendapatan karena status objek kerjasama berupa tanah masih dalam sengketa.

5.3.1.1.f Investasi Jangka Pendek	<u>31 Desember 2016</u>	<u>31 Desember 2015</u>
	Rp0,00	Rp0,00

Saldo Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang berjangka waktu 3 s.d 12 bulan. Tidak ada Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2016 dan 2015.

5.3.1.1.g Piutang Pendapatan**31 Desember 2016**
Rp51.312.870.406,18**31 Desember 2015**
Rp4.911.651.113,46

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2016 sebesar Rp52.978.229.466,00 dilakukan penyisihan piutang sebesar Rp1.665.359.059,83 sehingga nilai bersih piutang sebesar Rp51.312.870.406,18 jika dibanding dengan tahun 2015 naik sebesar Rp46.401.219.292,72.

Penyisihan Piutang dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.30 Rincian Piutang Pendapatan*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
1.	Piutang Pajak PKB dan BBNKB (Dinas Pendapatan)	51.991.300,00	51.991.300,00
2.	Piutang Retribusi	962.884.100,00	969.222.400,00
3.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang dipisahkan	2.657.193.231,00	1.566.556.857,00
4.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	49.306.160.835,00	3.662.679.133,250
5.	Penyisihan Piutang	(1.665.359.059,83)	(1.338.798.576,79)
Jumlah		51.312.870.406,18	4.911.651.113,46

5.3.1.1.g.1. Piutang Pendapatan Pajak 31 Desember 2016**Rp25.995.650,00****31 Desember 2015****Rp25.995.650,00**

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2016 sebesar Rp51.991.300,00 dilakukan penyisihan piutang sebesar Rp25.995.650,00 sehingga nilai bersih piutang sebesar Rp25.995.650,00 adalah piutang pajak PKB dan BBNKB pada Dinas Pendapatan Provinsi Jambi. Rincian piutang pajak daerah sebagai berikut.

Tabel 5.31 Rincian Piutang Pajak per 31 Desember 2016 dan 2015*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
1.	Pajak PKB dan BBNKB	51.991.300,00	51.991.300,00
2.	Penyisihan Piutang Pajak	(25.995.650,00)	(25.995.650,00)
Jumlah		25.995.650,00	25.995.650,00

Rincian Piutang pajak dan BBNKB per umur piutang dapat dilihat dalam **Lampiran 6**

1. Piutang atas tagihan PD Angso Putih merupakan tagihan piutang PD Angso Putih yang sudah ditutup sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2004 dan menjadi Piutang Pemerintah Provinsi Jambi per 31 Desember 2016 dan 2015 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.34 Rincian Piutang atas tagihan PD Angso Putih

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
1.	Suhelmi, SE/KUD semangat 45 Bangko	58.760.255,00	58.760.255,00
2.	Junaidi Nainggolan	126.805.205,00	126.805.205,00
3.	AR Siregar	129.165.416,00	129.165.416,00
4.	Istiono/Bambang Sriyono	83.080.328,00	83.080.328,00
	Penyisihan Piutang	(397.811.204,00)	(397.811.204,00)
Jumlah Bersih		0,00	0,00

2. Piutang Royalti kerja sama BOT per 31 Desember 2016 jumlahnya sebesar Rp2.268.330.881,27 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.35 Rincian Piutang Kerjasama (BOT)

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
1.	PT Simota Putra Parayuda (kerja sama BOT pembangunan WTC)	209.382.027,00	207.045.653,00
2.	PT Jambi Sapt Manunggal (kerja sama BOT pembangunan Hotel Tepian Ratu)	250.000.000,00	250.000.000,00
3.	PT Eraguna Bumi Nusa (kerja sama BOT pembangunan Pasar Angso Duo)	1.800.000.000,00	711.700.000,00
4.	Penyisihan Piutang	(11.296.910,14)	(7.500.000,00)
Jumlah		2.248.085.116,87	1.161.245.653,00

Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan per umur piutang dapat dilihat dalam Lampiran 8

5.3.1.1.g.4 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

<u>31 Desember 2016</u>	<u>31 Desember 2015</u>
Rp49.004.650.347,82	Rp3.590.876.650,46

Saldo Piutang Pendapatan Lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2016 sebesar Rp49.306.160.835,00. Atas saldo tersebut dilakukan penyisihan piutang sebesar Rp301.510.487,19 sehingga nilai bersih piutang sebesar Rp49.004.650.347,82.

Tabel 5.36 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
1.	Piutang Pendapatan BLUD pada RSUD	23.862.456.028,00	3.589.598.743,25
2.	Piutang Pendapatan RSJ	1.685.158.209,00	0,00
3.	Piutang Denda PKB dan BBNKB	15.597.390,00	15.597.390,00
4.	Piutang Taspen atas uang Duka Wafat yang belum dibayarkan	0	57.483.000,00
5.	Piutang Samisake	23.742.949.208,00	
6.	Penyisihan Piutang	(301.510.487,19)	(71.802.482,79)
Jumlah		49.004.650.347,82	3.590.876.650,46

Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah per umur piutang dapat dilihat dalam **Lampiran 9**

5.3.1.1.h Piutang Lainnya **31 Desember 2016** **31 Desember 2015**
Rp0,00 **Rp0,00**

Saldo Piutang Lain-lain per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00 atau turun sebesar Rp0,00 jika dibandingkan dengan saldo Piutang Lainnya TA 2015.

5.3.1.1.i Beban Dibayar di Muka **31 Desember 2016** **31 Desember 2015**
Rp982.645.319,75 **Rp531.343.107,00**

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2016 sebesar Rp982.645.319,75 terdiri dari biaya asuransi yang belum jatuh tempo dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.37 Rincian Beban Dibayar Dimuka

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
1.	Asuransi di Sekretariat Daerah	455.139.885,42	345.770.284,00
2.	Asuransi di Dinas PU	147.073.212,50	185.572.823,00
3.	Asuransi di Inspektorat	17.174.350,00	0,00
4.	Sekretariat Dewan	182.315.867,67	0,00
5.	Dinas Peternakan dan Keswan	2.083.333,33	0,00
6.	Kantor Perwakilan	178.858.670,83	0,00
Jumlah		982.645.319,75	531.343.107,00

Rincian Beban Dibayar Dimuka dapat dilihat pada **Lampiran 10**

5.3.1.1.j Persediaan **31 Desember 2016** **31 Desember 2015**
Rp287.893.054.891,99 **Rp254.589.585.359,51**

Saldo Persediaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp287.893.054.891,99 naik sebesar Rp33.303.469.532,48 dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp254.589.585.359,51.

Persediaan adalah Aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah

dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 sebagai berikut.

Tabel 5.38 Rincian Persediaan per Jenis

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
1.	Alat Tulis Kantor	2.164.303.167,65	2.896.458.101,48
2.	Obat-Obatan	38.099.217.383,87	14.459.178.701,34
3.	Bahan Kebersihan	162.129.015,00	154.047.244,11
4.	Bahan Makanan	466.988.976,90	927.177.594,65
5.	Bibit	3.452.951.326,10	2.197.891.869,00
6.	Aset yang diserahkan kepada pihak ketiga	0	230.219.539.507,53
7.	Bahan Kimia	1.031.014.763,40	212.533.400,00
8.	Pupuk	139.446.250,00	131.340.000,00
9.	Alat Bengkel	2.852.740.885,00	2.913.996.000,00
10.	Bahan Bangunan	238.745.732.207,53	139.769.872,00
11.	Sandang/Pakaian	406.718.434,67	178.322.698,66
12.	Alat Kesehatan	144.465.756,87	129.342.790,74
13.	Bahan Listrik	227.346.725,00	29.987.580,00
Jumlah		287.893.054.891,99	254.589.585.359,51

Rincian saldo Persediaan per SKPD dan per jenis persediaan dapat dilihat pada **Lampiran 11**

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang **31 Desember 2016** **31 Desember 2015**
Rp314.986.990.086,77 **Rp304.076.094.502,57**

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2016 sebesar Rp314.288.423.069,20 turun sebesar Rp10.212.328.566,63 dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp304.076.094.502,57. Rincian saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2016 dan per 31 Desember 2015 sebagai berikut.

Tabel 5.39 Rincian Investasi Jangka Panjang

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
1.	Investasi Nonpermanen	17.286.280.730,38	17.276.100.709,09
	Penyisihan KUPEM diragukan tertagih 2014	(5.097.953.383,37))	(4.954.370.204,28)
	Jumlah Investasi Nonpermanen	12.188.327.347,01	12.321.730.504,81
2.	Investasi Permanen	302.798.662.739,76	291.754.363.997,76
Jumlah		314.986.990.086,77	304.076.094.502,57

5.3.1.2.a Investasi Nonpermanen **31 Desember 2016** **31 Desember 2015**
Rp17.286.280.730,38 **Rp12.321.730.504,81**

Saldo Investasi Nonpermanen per 31 Desember 2016 sebesar Rp17.286.280.730,38 naik sebesar Rp4.964.550.225,57 dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp12.321.730.504,81. Saldo Investasi Nonpermanen ini berupa saldo Investasi Nonpermanen Lainnya yang terdiri dari Dana KUPEM dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.40 Rincian Investasi Nonpermanen Lainnya

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
1.	Dana KUPEM	17.286.280.730,38	17.276.100.709,09
	Penyisihan Dana KUPEM tidak tertagih	(5.097.953.383,37)	(4.954.370.204,48)
Jumlah Bersih Dana KUPEM		12.188.327.347,01	12.321.730.504,81

1. Dana KUPEM sebesar Rp12.188.327.347,01
2. Saldo dana KUPEM per 31 Desember 2016 sebesar Rp12.188.327.347,01 turun sebesar Rp133.403.157,80 dibandingkan dengan per 31 Desember 2015 sebesar Rp12.321.730.504,81 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.41 Rincian Saldo KUPEM

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2015	Per 31 Desember 2014
1.	KUPEM Pola <i>Channeling</i> (Tunggakan)	4.098.127.833,67	4.387.276.436,00
2.	Saldo Rekening KUPEM yang berada di Kab/Kota	9.799.020.220,92	9.496.372.185,30
3.	Saldo Giro Beku	2.032.888.686,09	1.969.787.209,81
4.	Tunggakan KUPEM <i>Executing</i>	1.278.739.428,70	1.343.790.816,98
5.	Tunggakan KUPEM <i>Executing</i> (pensertifikatan tanah)	77.459.561,00	78.874.061,00
Jumlah Dana KUPEM		17.286.280.730,38	17.276.100.709,09
1.	penyisihan KUPEM <i>channeling</i> tak tertagih	(3.741.754.393,67)	(3.531.705.326,30)
2.	penyisihan KUPEM <i>executing</i> tak tertagih	(1.278.739.428,70)	(1.343.790.816,98)
3.	penyisihan KUPEM Pensertifikatan Tanah tak tertagih	(77.459.561,00)	(78.874.061,00)
Jumlah Penyisihan KUPEM tidak tertagih		(5.097.953.383,37)	(4.954.370.204,28)
Jumlah Nilai Bersih setelah (penyisihan)		12.188.327.347,01	12.321.730.504,81

KUPEM adalah kredit usaha dan investasi pengembangan usaha yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dan disalurkan melalui Bank Jambi kepada petani hortikultura, petani ikan, pedagang/pengumpul pemasaran duku dan industri kecil, dalam rangka pembiayaan usaha tani dan usaha industri kecil.

Terdapat dua pola pelaksanaan program KUPEM yaitu pola *Executing* yang dilaksanakan sejak tahun 2001 s.d. tahun 2004 dan pola *Channeling* yang dilaksanakan sejak tahun 2005. Perbedaan kedua pola tersebut adalah pada tanggung jawab penyaluran, pengelolaan dan pengawasan kredit, dimana pada pola *Executing* semua tanggung jawab tersebut ada pada Bank Jambi, dan pada pola *Channeling* tanggung jawab tersebut ada pada Pemerintah Provinsi Jambi.

Untuk pelaksanaan KUPEM dengan pola *Channeling* dan *Executing* tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi telah membentuk Tim Terpadu yang dikoordinir oleh Biro Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi.

Saldo Dana KUPEM per 31 Desember 2016 sebesar Rp12.188.327.347,01 dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Pola *Channeling*, nilai bersih setelah penyisihan KUPEM pola *channeling* adalah sebagai berikut:

Tabel 5.42 KUPEM Pola *Channeling* (Tunggakan)

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1.	Tunggakan kupem Chanelling Modal kerja per 31 Desember 2016	4.098.172.833,67
2.	Akumulasi penyisihan per 31 Desember 2016	(3.741.754.393,67)
Jumlah nilai bersih disajikan		356.418.440,00

Per 31 Desember 2016 sebesar Rp356.418.440,00 mengalami penurunan sebesar Rp499.152.669,70 jika dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp855.571.109,70 saldo sebesar Rp356.418.440,00 sudah dilakukan perhitungan penyisihan piutang sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2015 (rincian perhitungan penyisihan dapat dilihat pada **Lampiran 12**).

Tabel 5.43 Rekapitulasi Penyisihan Piutang Dana Bergulir KUPEM Chanelling Modal kerja

(Dalam Rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	Saldo Tunggakan 2016	Akumulasi Penyisihan per 31 Desember 2016	Jumlah (NRV)
1.	Kota Jambi	182.101.674,00	182.101.674,00	-
2.	Kabupaten Batang Hari	269.519.323,00	263.510.992,00	6.008.332,00
3.	Kabupaten Muaro Jambi	456.726.131,00	303.726.131,00	153.000.000,00
4.	Kabupaten Kerinci	342.431.737,00	342.431.737,00	-
5.	Kabupaten Merangin	503.698.336,00	467.263.836,00	36.434.500,00
6.	Kabupaten Sarolangun	558.078.605,00	558.078.605,00	-
7.	Kabupaten Bungo	311.350.443,67	236.279.167,17	54.545.300,00
8.	Kabupaten Tebo	255.180.206,00	193.765.206,00	61.415.000,00
9.	Kabupaten Tanjab Barat	319.650.921,00	317.984.255,00	1.666.666,00
10.	Kabupaten Tanjab Timur	899.435.457,00	837.351.664,50	42.453.229,00
Jumlah		4.098.172.833,67	3.741.754.394,67	356.418.440,00

- 2) Saldo dana KUPEM *Channeling* yang tersimpan pada rekening Kabupaten/Kota sebesar Rp9.779.020.220,92

Saldo dana KUPEM *Channeling* yang tersimpan pada rekening Kabupaten/Kota per 31 Desember 2016 sebesar Rp9.779.020.220,92, naik sebesar Rp302.648.035,89 dibandingkan dengan saldo tahun 2015 sebesar Rp9.496.372.185,30. Saldo sebesar Rp9.779.020.220,92 tersebut terdapat pada Bank Jambi di kabupaten dan kota (Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 13**).

Tabel 5.45 Rincian Ekuitas Bank Jambi

(dalam rupiah)

No.	Ekuitas Bank Jambi	per 31 desember 2016	per 31 desember 2015
1.	Modal saham	639.770.000.000,00	592.777.000.000,00
2.	modal donasi	-	-
3.	Tambahan Modal Disetor	7.590.281.735,00	17.853.146.767,00
4.	Saldo Laba rugi yang belum direalisasikan atas penerapan perhitungan kembali PSAK 24	573.696.737,00	-
5.	Saldo Laba di tahan yang telah ditentukan Penggunaannya	286.736.569.441,00	240.836.459.153,00
6.	Saldo Laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya	170.321.459.550,00	132.416.375.504,00
	TOTAL EKUITAS	1.104.992.007.463,00	983.882.981.424,00

Sumber dari Laporan Posisi Keuangan Bank Jambi Per 31 Desember 2016 (Unaudited)

Nilai Investasi di Bank Jambi dengan Metode Ekuitas adalah Rp173.364.000.000,00/Rp639.770.000.000,00 x Rp1.117.342.614,48 = Rp302.798.662.739,76.

2. Penyertaan Pemerintah Provinsi Jambi di PT Jambi Indoguna Internasional (PT JII) sebesar Rp13.787.500.000,00. Persentasi saham sebesar 99,55%. Berdasarkan presentasi kepemilikan saham yang lebih dari 20% maka pencatatan atas investasi menggunakan metode Ekuitas, sehingga nilai Investasi Permanen Pemerintah Provinsi Jambi di PT JII menjadi Rp2.179.439.140,81 dengan Rincian sebagai berikut:

Tabel 5.46 Rincian Penyertaan Modal di PT JII

(dalam rupiah)

No.	Ekuitas PT JII	per 31 Desember 2016	per 31 Desember 2015
1.	Modal Saham Pemprov. Jambi	13.787.500.000,00	13.787.500.000,00
2.	Modal saham Afrizal	62.500.000,00	62.500.000,00
	Jumlah Saham	13.850.000.000,00	13.850.000.000,00
3.	Laba (Rugi) Tahun Lalu	(11.019.090.411,40)	(9.745.492.934,52)
4.	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(641.590.851,47)	(1.274.517.050,88)
	TOTAL EKUITAS	2.189.318.738,13	2.829.990.014,60

Sumber dari Laporan Keuangan PT. JII per 31 Desember 2016

Nilai Investasi di PT. JII dengan Metode Ekuitas adalah Rp13.787.500.000,00/Rp13.850.000.000,00 x Rp2.189.318.738,13 = Rp2.179.439.140,94.

3. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jambi di PT. ASKRIDA per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.190.000.000,00 dan tidak terdapat penambahan modal. Persentasi kepemilikan saham sebesar 0,60%. Berdasarkan persentase kepemilikan saham yang kurang dari 20% maka pencatatan atas investasi menggunakan metode biaya (*Cost Method*) yaitu berdasarkan nilai penyertaan modal sebesar Rp1.190.000.000,00.

5.3.1.3 Aset Tetap

31 Desember 2016 **31 Desember 2015**
Rp4.351.091.973.074,37 **Rp3.701.672.055.790,85**

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2016 sebesar Rp4.351.091.973.074,37naik sebesar Rp649.419.917.283,52 dibandingkan dengan saldo per31 Desember 2015sebesar Rp3.701.672.055.790,85. Rincian saldo Aset Tetap per31 Desember 2016 dan 2015 sebagai berikut.

Tabel 5.47 Rincian Aset Tetap

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
1.	Tanah	651.861.132.359,00	638.262.183.304,00
2.	Peralatan dan Mesin	849.221.633.177,95	771.179.257.554,74
3.	Gedung dan Bangunan	802.945.051.431,98	718.869.408.044,80
4.	Jalan,Irigasi dan Jaringan	5.408.154.358.364,09	4.636.092.005.562,12
5.	Aset Tetap Lainnya	365.154.755.445,98	343.203.130.362,99
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	59.740.425.400,00	108.493.998.400,00
7.	Akumulasi Penyusutan	(3.785.985.383.104,63)	(3.514.427.927.437,80)
Jumlah		4.351.091.973.074,37	3.701.672.055.790,85

5.3.1.3.a Tanah

31 Desember 2016 **31 Desember 2015**
Rp651.861.132.359,00 **Rp638.262.183.304,00**

Nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2016sebesar Rp651.861.132.359,00,naik sebesar Rp13.598.949.055,00dibandingkan nilai per31 Desember 2015 sebesar Rp638.262.183.304,00. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah tahun 2015 sebagai berikut:

Saldo Tahun 2015	Rp	638.262.183.304,00
Mutasi Tambah	Rp	35.137.090.000,00
Mutasi Kurang	Rp	(21.538.140.945,00)
Jumlah	Rp	651.861.132.359,00

Mutasi tambah sebesar Rp35.137.090.000,00terdiri dari realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2016pada dua SKPD yaitu:

1. Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp34.421.789.500,00,
2. Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp715.300.500,00

Mutasi kurang sebesar Rp21.538.140.945,00 terdiri dari:

1. Pengurangan dari Hibah dari BPKAD ke Kementerian Pertanian, Mahkamah Agung RI dan Kejaksaan Agung RI sebesar Rp.14.330.404.445,00.
2. Pengurangan dari belanja modal tanah Rumah Sakit Bratanata yang double pencatatan sebesar pada BPKAD Rp6.492.436.000,00

3. Reklasifikasi ke gedung dan bangunan pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp715.300.500,00.

Dari saldo Tanah sebesar Rp651.861.132.359,00 dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat tanah yang sudah dihapuskan untuk dihibahkan pada tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 5.48 Rincian Penghapusan/Hibah Tanah

No	Instansi Penerima	Luas (m2)	Keterangan	Alamat	Nilai (Rp)	Nomor Pergub	Nomor BAST
1.	Kejaksaan Agung Republik Indonesia	3.481 M ²	Tanah	Jalan Jend. A. Yani No.15 A Kelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura Kota Jambi	519.869.945,00	Nomor : 740/Kep.Gub/BP KAD/2016 Tanggal 31 Agustus 2016	NOMOR : 2716/BA//BPKAD.6.2/XI/2016 NOMOR : B-3728/N.5/11/2016 tanggal 10 Nopember 2016
2.	Mahkamah Agung Republik Indonesia	3.000 M ²	Tanah	Jalan H.Agus Salim Kel.Paal 5 Kota Baru Jambi	192.000.000,00,-	Nomor : 740/Kep.Gub/BP KAD/2016 Tanggal 31 Agustus 2016	NOMOR:2714/NPHD//B PKAD.6.2/XI/2016 NOMOR : 319/SEK/PL.02/II/2016 tanggal 10 Nopember 2016
		3.500 M ²	Tanah	Jl.Jakarta Kel.Paal 5 Kota Baru Jambi	224.000.000,00		
		3.500 M ²	Tanah	Jl.Pangeran Hidayat Kel.Paal 5 Kota Baru Jambi	32.000.000,00		
3.	Kementerian Pertanian RI	502.500M ²	Tanah	Jalan lintas Jambi-Palembang KM.16 Desa Pondok meja Kec.Mestong Kab. Muaro Jambi	7.223.128.500,00	Nomor : 908/Kep.Gub/BP KAD/2016 Tanggal 21 Oktober 2016	NOMOR:2724/NPHD//B PKAD.6.2/IX/2016 NOMOR : 2125/BA//BPKAD.6.2/IX/2016 tanggal 5 September 2016
4.	Pemerintah Kota Jambi	4.819M ²	Tanah	Jl. Jendral gatot Soebroto No.169 Kel. Sungai Asam Kec. Pasar Jambi Koto Jambi	6.139.406.000,00		
Jumlah					14.330.404.445,00		

2. Beberapa permasalahan tanah yang masih perlu penyelesaian lebih lanjut adalah:

- 1) Terdapat bangunan-bangunan permanen dan kios-kios milik masyarakat yang berada di atas tanah seluas 9.626 m² terletak di Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura dengan sertifikat Hak Pakai (HP) Nomor 8 Tahun 2010. Selain itu sertifikat HP Nomor 40 Tahun 1972 seluas 1.100.923 m² terletak di Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura, juga sebagian dikuasai oleh masyarakat.

Pada tahun 2013 Pemerintah Provinsi Jambi telah membentuk Tim Penertiban dan Penyelesaian Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi sesuai dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 413/KEP.GUB/SETDA. BPAKD.3.2/2013 tanggal 11 Juni 2013.

Tim telah melakukan:

- (1) Melakukan pendataan aset Tanah yang dikuasai oleh masyarakat, tumpang tindih, terutama Tanah HP Nomor 40 Tahun 1972 dan HP Nomor 8 Tahun 1972 yang sudah diganti dengan HP Nomor 8 Tahun 2010;
 - (2) Menyiapkan *action plan* untuk langkah-langkah konkrit;
 - (3) Menyurati pihak BPN untuk mendapat penjelasan tentang riwayat dan risalah Tanah yang bermasalah/dikuasai masyarakat atau tumpang tindih mengenai kepemilikan;
 - (4) Membentuk Tim Kecil untuk melakukan Inventarisasi terhadap HP Nomor 40 Tahun 1972 dan HP Nomor 8 Tahun 2010 dengan melibatkan Pihak Pemerintah Provinsi Jambi, Camat, Lurat, RT dan masyarakat untuk melakukan inventarisasi, investigasi, pengukuran dilapangan dan melaksanakan negosiasi dengan masyarakat. Terhadap tanah dalam penguasaan masyarakat, penyelesaiannya diusahakan dengan musyawarah/mediasi untuk mencari solusi sesuai ketentuan yang berlaku, dan apabila tidak ada kesepakatan akan diselesaikan secara hukum dan telah diserahkan kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah untuk penyelesaian lebih lanjut;
 - (5) Pemerintah Provinsi Jambi telah menyurati Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi agar dapat mengeluarkan hasil inventarisasi/pengukuran yang telah dilakukan oleh Tim berdasarkan Surat Nomor 31/03-15.71/I/2014 tertanggal 21 Januari 2014, perihal permohonan mengeluarkan hasil inventarisasi dilapangan. Pihak BPN Kota Jambi telah mengeluarkan hasil inventarisasi dan menyampaikan ke Pemerintah Provinsi Jambi melalui Surat Nomor : 82/03-15.71/II/2014 perihal Permohonan Penjelasan Data dan Luas Tanah dan dilampiri dengan peta dan data lengkap yang nantinya akan dijadikan bahan oleh Biro Hukum untuk penyelesaian selanjutnya;
 - (6) Dalam pengamanan Aset Tanah tersebut telah dilakukan pemasangan papan merk pada lokasi HP Nomor 40 Tahun 1972 dan Tanah HP Nomor 8 Tahun 2010.
- 2) Tanah seluas 45.710 m² terletak di Kelurahan Pematang Sujur dengan Sertifikat HP Nomor 5 Tahun 1970 diantaranya seluas 19.668 m² digunakan untuk Cadika/Gedung Pramuka dan sisanya sebanyak 13 bidang tanah dikuasai oleh masyarakat. Pemerintah Provinsi Jambi melakukan pengamanan melalui pemasangan papan nama sejak tahun 2013.
 - 3) Tanah seluas 72.660 m² terletak di Kelurahan Simpang IV Sipin dengan Sertifikat HP Nomor 6 Tahun 1970 digunakan untuk Kompleks Perumahan DPRD Tingkat I dan Perumahan Pegawai Golongan III sebanyak 13 rumah, sedangkan sisanya merupakan tanah kosong.

3. Mutasi antar SKPD	
1) Bappeda	380.893.000,00
2) Biro Pemerintahan	40.000.000,00
3) Biro Humas dan Protokol	18.850.000,00
4) Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama	66.263.294,74
5) Biro Administrasi Perekonomian dan SDA	37.200.000,00
6) Biro Kesramas	33.000.000,00
7) Biro Organisasi	54.300.000,00
8) Biro Umum	230.569.000,00
9) BPKAD	408.003.000,00
10) Dinas Kominfo	640.000.000,00
Jumlah	1.909.078.294,74
4. Koreksi tambah pada:	
1) Biro Umum atas penetapan hasil penilaian Barang Milik Daerah	542.925.000,00
Jumlah	542.925.000,00
5. Hibah sebesar Rp2.391.301.723,00, terdiri dari.	
1) Hibah dari BNN pusat ke RSJ	54.091.488,00
2) Hibah PT. Genta Buana Astadeca ke RSJ	2.500.000,00
3) Hibah dari Kementerian Tenaga Kerja Transmigrasi pada dinas Sosnakertrans Personal komputer	144.841.000,00
4) Hibah dari Bank Jambi berupa kendaraan Mobil Ambulans pada Dinas Sosnakertrans	114.000.000,00
5) Hibah dari Kemenkoinfo ke Biro Umum berupa kendaraan roda 4	156.444.235,00
6) Hibah dari kementerian Kelautan dan Perikanan ke Sekretariat Bakorluh berupa peralatan komputer.	8.000.000,00
7) Hibah dari Dirjen Perkebunan ke Dinas Perkebunan berupa Kendaraan roda 4	308.100.000,00
8) Hibah APBN berupa alat angkut air pada Dinas Kelautan dan Perikanan	1.573.625.000,00
9) Hibah APBN berupa peralatan komputer pada Dinas Kelautan dan Perikanan	29.700.000,00
Jumlah	2.391.301.723,00

Mutasi kurang sebesar Rp11.380.285.271,33 terdiri dari:

1. Reklasifikasi ke Aset selain Peralatan dan Mesin sebesar Rp6.379.885.310,20 sebagai berikut.

1) Reklasifikasi Ke Aset Gedung dan Bangunan	
- Dinas Pendidikan	119.900.000,00
- Dinas Perhubungan	724.970.319,00
- BPKAD	535.359.000,00
Jumlah (1)	1.380.229.319,00
2) Reklasifikasi Ke Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
- Dinas Kesehatan	229.310.000,00
- RSUD	680.856.000,00
- Dinas Perhubungan	368.499.000,00
Jumlah (2)	1.278.665.000,00
3) Reklasifikasi Ke KDP	
- RSUD	983.040.989,70
Jumlah (3)	983.040.989,70
4) Reklasifikasi Ke Aset Lainnya pada	
- Dinas Kesehatan	25.080.000,00
- Sosnakertrans	6.400.000,00
- BPMD dan PPT	190.000.000,00
- Badan Kesbangpol	202.237.101,50
- Dinas Pendapatan	2.267.500.000,00
- Sekretariat Korpri	697.400,00
- KPID	46.035.500,00
Jumlah (4)	2.737.950.001,50
Jumlah (1+2+3+4)	6.379.885.310,20

2. Penghapusan Kendaraan Dinas Sekretariat DPRD sebesar Rp14.850.000,00 sesuai dengan SK Gubernur Nomor 486/KEP.GUB/BPKAD/2015 tanggal 27 November 2015.
3. Penghapusan Kendaraan Dinas pada Dinas Kominfo sebesar Rp16.605.000,00 sesuai dengan SK Gubernur Nomor 487/KEP-GUB/BPKAD/2015 tanggal 27 November 2015.
4. Koreksi kurang Aset pada Dinas Pendapatan Daerah karena spesifikasi tidak mencukupi sebesar Rp2.571.226,00
5. Pengurangan karena nilai satuan barang dibawah kapitalisasi sebesar Rp**2.583.746.439,99**sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi sebagai berikut:
 - 1) Dinas Pendidikan 1.485.009.541,99
 - 2) Dinas Kesehatan 106.377.000,00
 - 3) RSJ 142.858.500,00
 - 4) Dinas Perhubungan 14.168.000,00
 - 5) Badan Lingkungan Hidup Daerah 7.631.000,00

6) BPMD dan PPT	11.724.000,00
7) Satpol PP	4.104.000,00
8) Badan Kesbangpol	1.400.000,00
9) Biro Umum	493.333.600,00
10) Sekretariat Dewan	11.920.500,00
11) BPKAD	805.000,00
11) Balitbangda	37.632.000,00
12) Inspektorat	21.005.100,00
13) Sekretariat Korpri	2.100.000,00
14) KPID	1.225.000,00
15) Badan Perpustakaan dan Aset	35.200.000,00
16) Dinas Pertanian	32.768.198,00
17) Dinas Kehutanan	5.000.000,00
18) Dinas ESDM	15.120.000,00
19) Dinas Kelautan dan Perikanan	111.289.000,00
20) Dinas Perindag	43.076.000,00
Jumlah	2.583.746.439,99

6. Mutasi Kurang antar SKPD

1) Dinas PU	788.896.000,00
2) BPMPP	130.000.000,00
3) Biro Humas	640.000.000,00
4) Biro Kesramas	42.563.294,74
5) Biro Umum	378.043.237,70
6) BKD	2.006.762,70
Jumlah	1.981.509.295,14

7. Koreksiatas Belanja Modal yang double pencatatan Rp145.000.000,00 pada RSUD.
8. Koreksiatas Belanja Modal yang double pencatatan Rp250.000.000,00 pada Badan Ketahanan Pangan.
9. Koreksiatas Belanja Modal yang merupakan barang habis pakai sebesar Rp6.118.000,00 pada Dinas Kelautan Perikanan.

Beberapa permasalahan terkait peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan aset peralatan dan mesin pada UPTDBalai Pelatihan Luar Sekolah (BPLS) Dinas pendidikan tahun 2016 sudah diserahterimakan kepada Kementerian Pendidikan.
2. Terdapat kendaraan dinas roda empat sebanyak 16 unit sebesar Rp2.388.243.741,47 dan kendaraan roda dua sebanyak 51 unit sebesar Rp429.103.194,30yang tidak dapat diuji keberadaannya pada Biro Umum, dengan rincian pada sebagai berikut.

No.	Nama SKPD/Biro	Kendaraan Roda 2		Kendaraan Roda 4		Total	
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1.	Biro Umum	51	429.103.194,30	16	2.388.243.741,47	69	2.817.346.935,77
	Jumlah	51	429.103.194,30	16	2.388.243.741,47	69	2.817.346.935,77

3. Terdapat Kendaraan Dinas Roda Dua Sebanyak 23 Unit dan Kendaraan Roda Empat Sebanyak 14 Unit Tidak Dicatat dalam KIB dan LBMD sebagai berikut:

No	Nama SKPD/Biro	Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat Tidak Dicatat	Hasil Konfirmasi Perkiraan Harga Kendaraan ke Samsat Kota Jambi		
			Jumlah Kendaraan Diketahui Perkiraan Harganya		Jumlah Kendaraan Tidak Diketahui Perkiraan Harganya
			Roda empat	Nilai (Rp)	
1	2	3	4	5	6 (3-4)
	Kendaraan Roda Dua				
1.	Biro Umum	22	0	0	22
2.	Dinas Pekerjaan Umum	1	-	-	1
	Sub Jumlah	23	0	0	23
	Kendaraan Roda Empat				
1.	Biro Umum	14	13	1.544.243.000,00	1
	Jumlah	37	13	1.544.243.000,00	24

4. Terdapat permasalahan terkait peminjaman kendaraan sebagai berikut:

- 1) Terdapat 26 unit kendaraan dengan nilai sebesar Rp4.915.607.777,55 yang dimanfaatkan oleh pihak lain telah kadaluarsa waktu perjanjian pinjam pakainya karena telah melebihi dua tahun dan sebanyak 10 unit dengan nilai sebesar Rp1.642.750.680,87 dimanfaatkan pihak lain tanpa didukung dengan dokumen pinjam pakai.
- 2) Sebanyak 24 unit kendaraan dengan nilai sebesar Rp1.554.040.328,17 digunakan oleh PNS yang telah pensiun sebagai berikut:

No.	Nama SKPD/Biro	Kendaraan Roda 2		Kendaraan Roda 4	
		Jml (buah)	Nilai (Rp)	Jml (buah)	Nilai (Rp)
1.	Dispenda	1	4.500.000,00	-	-
2.	Bappeda	1	6.200.000,00	-	-
3.	Dinas Kesehatan	1	4.500.000,00	-	-
4.	Disperindag	-	-	1	32.100.000,00
6.	Biro Umum	3	18.050.000,00	15	1.433.422.090,17
7.	BPKAD	-	-	2	55.268.238,00
	Jumlah	6	33.250.000,00	18	1.520.790.328,17

- 3) Terdapat kendaraan dinas sebanyak 22 unit dengan nilai sebesar Rp4.013.619.601,86 yang digunakan oleh pegawai yang sudah dimutasi ke SKPD lain sebagai berikut:

No.	Dicatat pada KIB SKPD	Jumlah	Nilai	Digunakan pegawai pada SKPD
	Kendaraan Roda Dua			
1..	Dinas Pekerjaan Umum	2	89.200.000,00	BPKAD
2..	Badan Ketahanan Pangan	2	18.000.000,00	Bakorluh
	Jumlah A	4	107.200.000,00	
	Kendaraan Roda Empat			

1.	Biro Umum	15	2.961.019.601,86	Disbudpar, DPRD, Bandiklatda, Set Korpri
2.	Dinas Pekerjaan Umum	2	695.400.000,00	Bappeda, BPKAD
3.	Badan Ketahanan Pangan	1	250.000.000,00	Bakorluh
	Jumlah B	18	3.906.419.601,86	
	Jumlah (A+B)	22	4.013.619.601,86	

5. Terdapat Peralatan dan Mesin sebanyak 18 unit sebesar Rp213.424.913,39 di sembilan SKPD yang hilang belum diproses penghapusan dari KIB dan belum diproses TP TGR sebagai berikut:

No	SKPD	Nama Barang	Jumlah	Nilai	Tgl Laporan ke Kepolisian
1.	Disbudpar	Laptop Toshiba	1	10.000.000,00	19-Nop-14
2.	Dispenda	Honda Supra X 125, BH 3740 HZ	1	15.617.000,00	27-Jun-14
3.	RSJD	Laptop Sony Vaio Tahun 2014	1	10.400.000,00	10-Nop-14
		Notebook HP Tahun 2010	1	6.474.500,00	03-Nop-11
		Notebook HP Tahun 2010	1	6.474.500,00	20-Mei-11
		Printer Canon MP 287	1	955.000,00	21-Jun-12
4.	Bandiklatda	Televisi 24 Inchi merk Sharp	7	24.255.000,00	17-Jun-14
5.	Biro Umum	Infokus	1	48.552.413,39	12-Nop-13
6.	Biro Humas	Kamera vidio Sony	1	29.900.000,00	11-Des-14
7.	Dinas PU	Motor Kawasaki BH 4150 HZ	1	24.200.000,00	24-Feb-15
8.	Dinkes	Honda NF 125 TRF	1	15.050.000,00	30-Mrt-15
9.	Dinas Perkebunan	Yamaha Vixion BH 3647 HZ	1	21.546.500,00	15-Mei-15
	Jumlah		18	213.424.913,39	

5.3.1.3.c Gedung dan Bangunan **31 Desember 2016** **31 Desember 2015**
Rp802.945.051.431,98 **Rp718.869.408.044,80**

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 sebesar Rp802.945.051.431,98 naik sebesar Rp84.075.643.387,18 atau 11,70% dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2015 sebesar Rp718.869.408.044,80. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebagai berikut.

Saldo Tahun 2015	Rp	718.869.408.044,80
Mutasi Tambah	Rp	124.247.157.016,18
Mutasi Kurang	Rp	(40.171.513.629,00)
Jumlah Nilai perolehan	Rp	802.945.051.431,98

Mutasi tambah sebesar **Rp124.247.157.016,18** terdiri dari:

1. Belanja Modal Gedung dan BangunanTA 2016 yang tersebar pada 24SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sebesar **Rp107.470.887.817,18** (Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 15**).
2. Reklasifikasi sebesar **Rp16.776.269.199,00** terdiri dari:

1) Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin pada:	
- Dinas Pendidikan	119.900.000,00
- Dinas Perhubungan	724.970.319,00
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	535.359.000,00
Jumlah 1)	1.380.229.319,00
2) Reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan pada:	
- Rumah Sakit Jiwa	2.545.772.330,00
- Dinas Pendapatan	883.446.000,00
- Dinas Kelautan dan Perikanan	359.778.500,00
- Dinas Kesehatan	70.113.000,00
Jumlah 2)	3.859.109.830,00
3) Reklasifikasi dari Tanah	
Pada:	
- Dinas Kelautan dan Perikanan	465.818.000,00
Jumlah 3)	465.818.000,00

3. Koreksi tambah atas gedung dan bangunan yang belum tercatat pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp11.071.112.050,00.

Mutasi kurang sebesar **Rp40.171.513.629,00** terdiri dari:

1. Reklasifikasisebesar Rp40.052.667.629,00 terdiri dari:	
1) Reklasifikasi Ke Aset Peralatan dan Mesin pada:	
- Dinas Pendidikan	433.903.030,00
- Dinas Kelautan dan Perikanan	159.000.000,00
Jumlah 1)	592.903.030,00
2) Reklasifikasi ke Aset Jalan Irigasi, dan Jaringan pada:	
- Dinas Perhubungan	10.175.296.058,00
- Dinas Kelautan dan Perikanan	130.420.000,00
- Rumah Sakit Umum Daerah	508.650.000,00
Jumlah 2)	10.814.366.058,00
3) Reklasifikasi ke Konstruksi dalam Pengerjaan pada:	
- Dinas Kesehatan	148.885.000,00
- Rumah Sakit Jiwa	2.452.115.330,00
- Dinas Pekerjaan Umum	5.231.677.918,00
- Dinas Koperasi & UKM	74.563.000,00
- RSUD	8.559.770.000,00

- Dinas Pendapatan	829.996.000,00
- Dinas Kelautan dan Perikanan	65.430.000,00
Jumlah 3)	17.362.437.248,00

4) Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya pada:

- Dinas Pendidikan	1.555.626.000,00
- Rumah Sakit Daerah	598.747.000,00
-Dinas Pekerjaan Umum	6.862.463.747,00
- BPKAD	2.266.124.546,00
Jumlah 4)	11.282.961.293,00

2. Mutasi kurang karena nilai satuan barang dibawah nilai kapitalisasi sebesar **Rp84.366.000,00** pada:

1) Dinas Pendidikan	56.970.000,00
2) Dinas Kesehatan	6.000.000,00
3) Badan Diklat Daerah	19.900.000,00
4) Dinas Pemuda dan Olahraga	1.496.000,00
Jumlah	84.366.000,00

3. Penghapusan sesuai dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 932/KEP-GUB/BPKAD/2016 tanggal 8 November 2016 pada Rumah Sakit Jiwa sebesar **Rp.26.250.000,00**.

4. Mengeluarkan Belanja Modal Gedung Bangunan yang kelebihan pengambilan dana DAK tahun 2016 pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar **Rp8.230.000**.

Beberapa permasalahan terkait Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 10 unit Gedung dan Bangunan dengan nilai sebesar Rp1.924.752.000,00 yang dalam proses penghapusan.

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Jumlah (unit)	Nilai	Pengajuan Usulan Penghapusan
1.	BPKAD	6	1.139.016.000,00	24 April 2014
2.	Dinsosnakertrans	3	18.900.000,00	-
3.	Bandiklatda	1	766.836.000,00	Tahun 2013
	Jumlah	10	1.924.752.000,00	

5.3.1.3.d Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2016 **31 Desember 2015**
Rp5.408.154.358.364,09 **Rp4.636.092.005.562,12**

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2016 sebesar Rp5.408.154.358.364,09 naik sebesar Rp772.062.352.801,97 atau 16,65% dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2015 sebesar Rp4.636.092.005.562,12. Rincian mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut:

Saldo Tahun 2015	Rp	4.636.092.005.562,12
Mutasi Tambah	Rp	1.103.731.631.524,42
Mutasi Kurang	Rp	<u>(331.669.278.722.45)</u>
Jumlah Nilai perolehan	Rp	5.408.154.358.364,09

Mutasi tambah sebesar Rp1.103.731.631.524,42 terdiri dari:

1. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2016 sebesar Rp717.103.508.077.03 yang tersebar pada 13 SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 16**).

2. Reklasifikasi sebesar Rp386.628.123.447,39 dengan rincian sbb:

1) Reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan pada:	
Dinas Perkebunan	3.000.000.00
Dinas Perhubungan	368.499.000,00
Dinas Pekerjaan Umum	374.345.931.202,96
Dinas Kelautan dan Perikanan	<u>7.500.000.00</u>
Jumlah	374.724.930.202,96
2) Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin pada:	
- Dinas Kesehatan	229.310.000,00
RSUD	<u>680.856.000.00</u>
Jumlah	910.166.000.00

3) Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan pada:

- Rumah sakit umum	508.650.000,00
- Rumah Sakit Jiwa	173.290.000.00
- Dinas Kelautan dan Perikanan	130.420.000.00
-Dinas Perhubungan	<u>10.175.296.058.00</u>
Jumlah	<u>10.987.656.058.00</u>

4). Mutasi tambah dari Pemenuhan kekurangan volume pekerjaan yang ditemukan oleh Tim Pemeriksa LKPD Provinsi Jambi tahun 2015 sebesar Rp. 5.371.186.43

Mutasi kurang sebesar Rp 331.669.278.722.45 terdiri dari:

1. Mutasi kurang karena nilai satuan barang dibawah kapitalisasi sebesar Rp38.105.000 pada Dinas Kesehatan
2. Dibawah Kapitalisasi Rp.4.243.555.842.00 dan Penemuan Temuan BPK yang disetor tahun 2017 sebesar Rp.43.975.677.50 pada dinas Perhubungan
3. Mutasi kurang karena reklasifikasi ke Kontruksi Dalam Pengerjaan Rp32.285.000 pada Dinas perkebunan
4. Reklasifikasi kurang pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp327.311.357.202.95 ke Kontruksi Dalam Pengerjaan

3. Mutasi kurang karena adanya Kapitalisasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan daerah sebesar Rp.2.680.000.00

5.3.1.3.f Konstruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2016 **31 Desember 2015**
Rp59.740.425.400,00 **Rp108.493.998.400,00**

Nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp59.740.425.400,00 turun sebesar Rp48.753.573.000,00 atau 44,94% dibandingkan nilai per 31 Desember 2015 sebesar Rp108.493.998.400,00. Rincian mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebagai berikut.

Saldo Tahun 2015	Rp	108.493.998.400,00
Mutasi Tambah	Rp	344.532.789.450,95
Mutasi Kurang	Rp	(393.286.362.450,95)
Jumlah	Rp	59.740.425.400,00

Mutasi tambah sebesar Rp344.532.789.450,95 terdiri dari :

- Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp17.139.647.248,00 terdiri dari:

1) Dinas Kesehatan	99.385.000,00
2) RSUD	8.559.770.000,00
3) RSJ	2.278.825.330,00
4) Dinas Koperasi UMKM	74.563.000,00
5) Dinas Kelautan	65.430.000,00
6) Dinas Pendapatan	829.996.000,00
7) Dinas PU	5.231.677.918,00
Jumlah	17.139.647.248,00

- Reklasifikasi dari Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp327.343.642.202,95 terdiri dari:

1) Dinas Perkebunan	32.285.000,00
2) Dinas PU	327.311.357.202,95
Jumlah	327.343.642.202,95

- Mutasi tambah pada Dinas Kesehatan Rp49.500.000,00 yang sebelumnya masih berupa perencanaan.

Mutasi kurang sebesar Rp393.286.362.450,95 adalah reklasifikasi keluar dengan rincian sebagai berikut:

- Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan pada:

1) Rumah Sakit Jiwa	2.545.772.330,00
2) Dinas Pendapatan	883.446.000,00
3) Dinas Kelautan dan Perikanan	110.296.000,00
4) Dinas Kesehatan	70.113.000,00
Jumlah	3.609.627.330,00

2. Reklasifikasi ke Aset Jalan, Irigasi, dan Jembatan
 - 1) Dinas Perkebunan 3.000.000,00
 - 2) Dinas Kelautan dan Perikanan 7.500.000,00
 - 3) Dinas PU 374.345.931.202,96

Jumlah 374.356.431.202,96
3. Reklas ke Aset Tetap Lainnya renovasi pada Dinas PU sebesar Rp15.317.103.917,99
4. Reklas ke Peralatan dan Mesin pada Dinas Kelautan dan perikanan sebesar Rp3.200.000,00

KDP berada pada 13 SKPD sebesar Rp59.740.425.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.49 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

(dalam rupiah)

NO	NAMA SKPD	Saldo 2016
1.	Dinas Pendidikan	1.039.291.000,00
2.	Dinas Kesehatan	297.235.000,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	37.320.509.000,00
4.	Rumah Sakit Jiwa	132.134.000,00
5.	Dinas Pekerjaan Umum	17.904.869.400,00
6.	Dinas Perhubungan	2.449.216.000,00
7.	Dinas Koperasi UMKM	74.563.000,00
8.	Disbudpar	212.732.000,00
9.	Dinas Pendapatan	6.200.000,00
10.	Dinas Pertanian	13.950.000,00
11.	Dinas ESDM	29.700.000,00
12.	Dinas Kelautan dan Perikanan	230.741.000,00
13.	Dinas Perkebunan	29.285.000,00
Jumlah		59.740.425.400,00

5.3.1.3.g Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2016 31 Desember 2015
(Rp3.785.985.383.104,63) (Rp3.514.427.927.437,80)

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2016 sebesar (Rp3.785.985.383.104,63) naik sebesar Rp271.557.455.666,83 Dibandingkan dengan tahun 2015 (Rp3.514.427.927.437,80). Adapun Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2016 diuraikan dalam **tabel 5.47** berikut.

Tabel 5.50 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2016

(dalam rupiah)

No.	Jenis Aset	31 Desember 2016
1.	Peralatan dan Mesin	(592.647.523.133,80)
2.	Gedung dan Bangunan	(157.009.494.954,55)
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(3.036.328.365.016,28)
4.	Aset tetap Lainnya	(0,00)
Jumlah		(3.785.985.383.104,63)

Rincian atas Akumulasi Penyusutan dapat dilihat pada **Lampiran 18**.

5.3.1.4 Dana Cadangan 31 Desember 2016 31 Desember 2015

- -

Dana Cadangan per 31 Desember 2016 adalah nihil. Dana cadangan merupakan alokasi dana yang dicadangkan Pemerintah Daerah untuk tujuan tertentu (seperti pembangunan/belanja modal yang memerlukan dana beberapa tahun anggaran/*multi years*) dan dibahas bersama DPRD untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

5.3.1.5 Aset Lainnya 31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp904.466.553.220,78 **Rp906.698.353.541,58**

Saldo Aset lainnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp904.466.553.220,78 atau turun sebesar Rp2.231.800.320,80 atau 0,24% jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp906.698.353.541,58. Mutasi dan Rincian Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 sebagai berikut:

Saldo Tahun 2015	Rp	906.698.353.541,58
Mutasi Tambah	Rp	2.595.080.000,00
Mutasi Kurang	Rp	(3.941.635.565,37)
Akumulasi Amortisasi	Rp	(855.562.469,43)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya - Aset Lain-lain	Rp	(29.682.286,00)
Jumlah	Rp	904.466.553.220,78

Tabel 5.51 Rincian Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
1.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian	44.966.500,00	44.966.500,00
3.	Kemitraan dengan pihak ketiga (BOT)	189.742.089.055,00	189.742.089.055,00
4.	Aset Tidak berwujud	9.295.795.680,46	6.813.215.680,46
5.	Aset Lain-lain	712.136.129.485,57	715.965.265.050,94
6.	Akumulasi Amortisasi	(5.578.594.293,80)	(4.723.031.824,37)
7.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya – Aset Lain-Lain	(1.173.833.206,45)	(1.144.150.920,45)
Jumlah		904.466.553.220,78	906.698.353.541,58

5.3.1.5.a Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp44.966.500,00 **Rp44.966.500,00**

Nilai Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2016 sebesar Rp44.966.500,00 tidak ada perubandibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp44.966.500,00 merupakan saldo tagihan piutang Ganti

Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan surat pembebanan. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terdapat pada BPKAD sebesar Rp15.066.500,00 dan Biro Humas Sekretariat Daerah sebesar Rp29.900.000,00.

5.3.1.5.b Kemitraan dengan Pihak Ketiga (BOT)

31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp189.742.089.055,00 Rp189.742.089.055,00

Saldo Kemitraan dengan Pihak ketiga (BOT) per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing jumlahnya sebesar Rp189.742.089.055,00 dan Rp189.742.089.055,00 yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan Pihak Ketiga dalam bentuk BOT (*Build Operate Transfer*/Bangun Guna Serah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.52 Kemitraan dengan Pihak Ketiga (BOT)

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
1.	BOT dengan PT Jambi Sapta Manunggal	8.333.440.000,00	8.333.440.000,00
2.	BOT dengan PT Simota Putra Prayudha (WTC)	13.986.560.000,00	13.986.560.000,00
3.	BOT dengan PT Eraguna Bumi Nusa	167.422.089.055,00	167.422.089.055,00
Jumlah		189.742.089.055,00	189.742.089.055,00

Hal-hal yang berkaitan dengan kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Jambi mengadakan kerjasama BOT dengan PT Jambi Sapta Manunggal Pratama (JSMP) dalam pembangunan dan pengelolaan Jambi Tepian Ratu *River View & Resort* di Jalan Slamet Riyadi, yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Kontrak produksi. Perjanjian tersebut pada prinsipnya adalah BOT pada tanggal 27 Januari 1995.

Dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi menyediakan sebidang tanah dengan status Hak Pengelolaan (HPL) seluas 52.084 m² yang terletak di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Legok Kecamatan Telanaipura dan PT JSMP akan memanfaatkan tanah dengan status Hak Guna Bangun (HGB) diatas Hak Pengelolaan (HPL) selama 30 tahun sejak ditandatanganinya kontrak produksi, untuk mendirikan Hotel secara bertahap berkapasitas 92 kamar dalam jangka waktu 5 tahun. PT JSMP harus membayar kompensasi sebesar Rp150.000.000,00 atas pemberian hak guna bangunan di atas hak pengelolaan dan harus menyediakan dana investasi Rp20.521.096.000,00 serta berkewajiban membayar royalti kepada Pemerintah Provinsi Jambi sejak tahun ke-3 sesuai perjanjian. Setiap keterlambatan pembayaran royalti akan dikenakan denda sebesar 1 per mil setiap hari. Jangka waktu BOT tersebut selama 30 tahun.

Pencatatan Aset Lainnya berupa Kemitraan dengan Pihak ketiga (BOT) dengan PT JSMP diakui sebesar nilai investasi yaitu Rp8.333.440.000,00

yaitu seluas 52.084 m² dengan Nilai Tanah Tahun 2002 sebesar Rp160.000,00/m².

2. BOT dengan PT Simota Putra Prayudha sesuai dengan Kesepakatan Kerjasama Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Simota Putra Prayudha dalam pemanfaatan, pembangunan dan pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Provinsi Jambi Nomor 1A/KB/OHK/II/2004-Nomor:08/SPP-KB/II/2004 tanggal 18 Februari 2004 yang telah diubah dalam *Addendum* I Kesepakatan Kerja Sama Pemerintah Provinsi Jambi mengadakan dengan PT Simota Putra Prayudha dalam pemanfaatan, pembangunan dan pengelolaan aset tanah Pemerintah Provinsi Jambi Nomor 1A/KB/OHK/II/2004-Nomor:08/SPP-KB/II/2004 tanggal 28 April 2006. Perjanjian tersebut pada prinsipnya adalah BOT (*Build, Operate, Transfer*/Bangun, Guna, Serah).

Dalam perjanjian tersebut, dinyatakan bahwa kerjasama tersebut dalam rangka pembangunan dan pengelolaan kawasan pusat perdagangan dan jasa yang terdiri dari pusat perbelanjaan/Mall dan/atau Hotel. Penyertaan Provinsi Jambi berupa tanah seluas 10.765 m² senilai Rp13.986.560.000,00. PT Simota Putra Prayudha berkewajiban melakukan pembayaran biaya kompensasi bangunan milik PT Pelindo II, membayar biaya pembuatan sertifikat HPL untuk dan atas nama PT Pelindo II sebesar 50% dari biaya seluruhnya, mengganti tanah dan membangun gedung pusat kesehatan pelabuhan, mengganti pembangunan gedung administrator pelabuhan dan membiayai pembangunan pusat perdagangan/perbelanjaan dan jasa dengan perkiraan investasi Rp105.000.000.000,00 serta berkewajiban membayar royalti kepada Pemerintah Provinsi Jambi sejak pengoperasian/*grand opening*. Jangka waktu BOT tersebut selama 30 tahun.

3. BOT dengan PT Eraguna Bumi Nusa sesuai dengan Kesepakatan Kerjasama Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Eraguna Bumi Nusa dalam Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Angso Duo Baru Nomor 06/PK.GUB/PU/2014 – Nomor : 008/VI/EBN/PKS/2014 tanggal 9 Juni 2014. Perjanjian tersebut pada prinsipnya adalah BOT (*Build, Operate, Transfer*/Bangun, Guna, Serah).

Dalam perjanjian tersebut, dinyatakan bahwa kerjasama tersebut dalam rangka Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Angso Duo Baru. Penyertaan Provinsi Jambi berupa tanah seluas 71.757 m² senilai Rp167.422.089.055,00. PT Eraguna Bumi Nusa berkewajiban menyediakan biaya pembangunan sebesar Rp146.176.200.000,00 untuk membangun pasar dan fasilitas penunjang lainnya serta berkewajiban membayar royalti kepada Pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp14.617.000.000,00 selama jangka waktu BOT tersebut selama 5 tahun.

Selain BOT di atas, Pemprov Jambi juga mengadakan kerjasama BOT dengan PT Putra Kurnia Properti sesuai dengan perjanjian

Nomor :PK.GUB/PU/2014
Nomor :001/JBC-PKP/VI/2014

tanggal 9 Juni 2014 perihal kerja sama pembangunan dan pengelolaan kawasan Jambi Bisnis Center (JBC). Perjanjian tersebut pada prinsipnya adalah BOT (*Build, Operate, Transfer*/Bangun, Guna, Serah) dengan jangka waktu kerja sama selama 30 tahun. Pemprov Jambi menyerahkan tanah seluas 76.750 m² dan bangunan di atasnya dengan nilai appraisal sebesar Rp208.000.000.000,00 yang beralamat di Jalan Kapten A. Bakarudin, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura sedangkan PT Putra Kurnia Properti membangun fasilitas dan mengelola Jambi Bisnis Center dengan perkiraan biaya pembangunan dan biaya pengelolaan sebesar Rp1.501.267.500.000,00 serta wajib membayar biaya kontribusi sebesar Rp56.411.250.000,00 yang diangsur selama 30 tahun. Sampai 31 Desember 2015, status tanah yang dikerjasamakan masih berupa hak pakai dan belum menjadi hak pengelolaan serta masih dalam sengketa yang telah diputuskan di Pengadilan Tinggi Jambi No. 62/PDT/2014/PT.JMB tanggal 26 Januari 2015 dan sekarang masih dalam proses banding di Mahkamah Agung. Oleh karena itu nilai BOT dengan PT Putra Kurnia Properti belum dapat dicatat sebagai Aset Lainnya.

5.3.1.5.c Aset Tidak Berwujud 31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp9.295.795.680,46 Rp6.813.215.680,46

Nilai Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2016 sebesar **Rp8.624.095.680,46** naik sebesar Rp1.810.880.000,00 atau 26,57% dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2015 sebesar Rp6.813.215.680,46

Mutasi Tambah sebesar Rp1.810.880.000,00 terdiri dari :

- 1) Reklas tambah dari Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan sebesar Rp25.080.000,00
- 2) Reklas tambah dari peralatan dan Mesin pada Dinas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan dan Perizinan terpadu sebesar Rp.190.000.000,00
- 3) Reklas Peralatan dan Mesin berupa Aplikasi dan hak cipta pada Dinas Pendapatan sebesar Rp2.267.500.000,00

5.3.1.5.d Aset Lain-lain 31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp712.136.129.485,57 Rp715.965.265.050,94

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2016 sebesar Rp712.136.129.485,57 turun sebesar Rp3.829.135.565,37 atau 0,53% dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2015 sebesar Rp715.965.265.050,94. Rincian mutasi aset lain-lain sebagai berikut:

Saldo Tahun 2015	Rp	715.965.265.050,94
Mutasi Tambah	Rp	3.689.565.185,98
Mutasi Kurang	Rp	(7.518.700.751,35)
Jumlah	Rp	712.136.129.485,57

Mutasi tambah sebesar Rp4.361.265.185,98 yang terdiri dari:

1) Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin pada	
- Kantor Kesbang Pol	202.237.101.50
- KPID	46.035.500.00
Jumlah (1)	248.272.601.50
2) Penambahan Piutang dari Temuan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada Dinas Pekerjaan Umum .	2.529.763.894.61
Jumlah (2)	
3) Penambahan karena hewan ternak Berkembang Biak pada Dinas Peternakan dan Keswan	792.628.689.87.00
Jumlah (3)	792.628.689.87
4) Reklasifikasi dari aset Rusak Berat pada Dinas Sosial dan Tenaga kerja	6.400.000.00
Jumlah (4)	6.400.000.00
5) Hewan ternak yang kurang catat TA 2010 pada Dinas Peternakan Kesehatan Hewan	112.500.000.00
Jumlah (5)	112.500.000.00

Mutasi kurang sebesar Rp.7.518.700.751,35 terdiri dari:

1. Penghapusan aset rusak berat sebesar Rp 496.319.300.55 pada Inspektorat	
2. Penghapusan Rusak Berat sesuai dengan Keputusan Guber Jambi Nomor: 550/KEP.Gub/BPKAD/2016 tanggal 28 Juni 2016 sebesar RP. 229.740.732.00 pada BAPPEDA	
3. Penerimaan Piutang Temuan hasil Pemeriksaan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp. 9.013.938.43	
4. Penghapusan rusak Berat sesuai dengan Kep.Gubernur Jambi Nomor: 811/KEP.GUB/BPKAD/2016 tanggal 7 september 2016 sebesar Rp. 265.202.133.00 pada Badan Kesbang Pol.	
5. Pengurangan Pembayaran Piutang PT dan CV sebesar Rp. 1.204.191.651.58 pada Dinas Pekerjaan Umum.	
6. Penghapusan aset lain-lain pada Sekretariat Daerah terdiri dari:	
- Biro hukum	76.487.532,00
- Biro Pembangunan dan kerjasama	410.555.875,00
- Biro Organisasi	<u>106.354.238,00</u>
Jumlah (6)	593.397.645,00

7. Penerimaan Piutang Temuan hasil Pemeriksaan pada biro umum sebesar Rp.30.623.325.30
8. Penghapusan aset Rusak berat pada Sekretariat Dewan sebesar Rp2.036.675.288,49
9. Penghapusan aset lain-lain yang merupakan bagian lancar dari piutang jangka panjang pada SKPKD Rp2.050.000.000,00
10. Penghapusan aset lain-lain yang sudah dihapuskan pada BPMD PTT Rp603.536.737,00

Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2016 sebagai berikut:

1. Aset yang secara fungsi dan keberadaannya dikuasai oleh pihak lain sebesar Rp589.810.879.890,02 yang terdiri dari Dinas Pendidikan sebesar Rp124.001.084.453,00 dan Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp465.809.795.437,02.
2. Aset rusak berat sejumlah RP74.310.868.842,32 terdapat pada 38 SKPD (Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 19**)
3. Aset Lain-lain berupa SID Perluasan Sawah Kegiatan P3A dan Tata Air Mikro sebesar Rp798.980.000,00 pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan.
4. Piutang jangka panjang berupa komitmen kontribusi dari perjanjian BOT yang jatuh tempo lebih dari setahun, yaitu lebih dari 31 Desember 2016 sebesar Rp11.393.600.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. PT Jambi Sapta Manunggal Pratama	Rp	2.250.000.000,00
2. PT Eraguna Bumi Nusa	Rp	9.143.600.000,00
Jumlah	Rp	11.393.600.000,00

5. Hewan ternak yang digulirkan oleh petani yang dikelola oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp30.556.674.298,60
6. Aset yang hilang pada Biro Umum yang belum ditetapkan surat pembebanan atas ganti kerugiannya sebesar Rp65.293.598,03
7. Nilai kerugian atas Jaminan Pelaksanaan dan Kekurangan Volume yang belum diterima oleh Pemprov dan belum ditetapkan SK Pembebanannya/SKTJM nya sebesar Rp5.330.420.052,66 dengan rincian yaitu:
 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp543.692.694,75;
 - Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp4.642.243.857,91;
 - Biro Umum Sekretariat Daerah sebesar Rp144.483.500,00

5.3.1.5.e Akumulasi Amortisasi **31 Desember 2016** **31 Desember 2015**
(Rp5.578.594.293.80) **(Rp4.723.031.824,37)**

Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2016 sebesar (Rp5.578.594.293.80). Naik sebesar (Rp855.562.468.63) dibandingkan dengan tahun 2015 (Rp4.723.031.824,37). Adapun Rincian Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2016 dan 2015 diuraikan dalam tabel 5.51 berikut.

Tabel 5.53 Rincian Saldo Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2016

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Saldo 31 Desember 2016	Saldo 31 Desember 2015
1.	Dinas Pendidikan	(2.400.000.000,00)	(2.400.000.000,00)
2.	Dinas kesehatan	(2.926.000,00)	
3.	Rumah Sakit Umum	(44.220.000,00)	
4.	Pekerjaan Umum	(873.161.200,00)	(666.478.400,00)
5.	Dinas Perhubungan	(1.363.686.400,00)	(1.022.764.800,00)
6.	BPMD &PPT	(15.833.333,33)	
7.	Biro Hukm	(122.094.000)	(114.708.000)
8.	Biro Pembangunan dan kerja sama	(34.272.480,00)	(22.848.320,00)
9.	biro umum	(65.982.880,47)	(52.786.304,37)
10.	BPKAD	(29.952.000,00)	(22.464.000,00)
11.	Dinas Komunikasi dan Informatika	(626.466.000,00)	(391.502.000,00)
Jumlah		(5.578.594.293,80)	(4.723.031.824,37)

5.3.1.5.f Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya – Aset Lain-lain **31 Desember 2016** **31 Desember 2015**
(Rp1.173.833.206,45) **(Rp1.144.150.920,45)**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya – Aset Lain-lain merupakan saldo Penyusutan atas Aset Tetap yang direklas ke Aset Lainnya per 31 Desember 2016 sebesar (Rp1.173.833.206,45), naik sebesar (Rp29.682.286,00) dibanding tahun 2015 (Rp1.144.150.920,45). Adapun Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya – Aset Lain-lain per 31 Desember 2016 dan 2015 diuraikan dalam tabel 5.52 berikut.

Tabel 5.54 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang direklas ke Aset Lainnya per 31 Desember 2016

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Saldo 31 Desember 2016	Saldo 31 Desember 2015
1.	Satpol PP	(20.852.295,00)	(20.852.295,00)
2.	KPID	(41.942.756,00)	(12.260.450,00)
3.	Biro Umum	(1.111.038.155,45)	(1.111.038.175,45)
Jumlah		(1.173.833.206,45)	(1.144.150.920,45)

5.3.2 Kewajiban

<u>31 Desember 2016</u>	<u>31 Desember 2015</u>
Rp213.411.527.840,28	Rp136.802.405.618,32

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Jambi. Sampai dengan 31 Desember 2016, kewajiban Pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp209.070.527.840,28 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Rincian mutasi kewajiban sebagai berikut:

Saldo Tahun 2015	Rp	136.802.405.618,32
Mutasi Tambah	Rp	166.413.227.840,28
Mutasi Kurang	<u>Rp</u>	<u>(89.804.104.791,00)</u>
Jumlah	Rp	213.411.527.840,28

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

<u>31 Desember 2016</u>	<u>31 Desember 2015</u>
Rp213.411.027.840,28	Rp136.802.405.618,32

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2016 sebesar Rp213.411.027.840,28 atau naik sebesar Rp76.608.622.221,96 dari saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp136.802.405.618,32. Kewajiban Jangka Pendek tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 5.55 Kewajiban Jangka Pendek

(dalam rupiah)

Uraian		Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
1.	Utang PFK	-	-
2.	Utang Kepada Pihak Ketiga	41.741.722.420,31	39.786.901.592,32
3.	Utang Belanja	1.515.968.967,00	1.798.479.760,00
4.	Utang Jangka Pendek Lainnya	170.147.336.452,97	95.217.024.266,00
Jumlah		213.411.027.840,28	136.802.405.618,32

5.3.2.1.a Utang PFK

<u>31 Desember 2016</u>	<u>31 Desember 2015</u>
Rp0,00	Rp0,00

Saldo Utang PFK per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah nihil. Pemerintah Provinsi Jambi telah menyetorkan seluruh PFK yang dipungut ke Kas Daerah.

5.3.2.1.b Utang Kepada Pihak Ketiga

<u>31 Desember 2016</u>	<u>31 Desember 2015</u>
Rp41.741.722.420,31	Rp39.786.901.592,32

Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 sebesar Rp41.741.722.420,31 atau naik sebesar Rp1.954.820.827,99 dari saldo

per 31 Desember 2015 sebesar Rp39.786.901.592,32. Utang Kepada Pihak Ketiga terdiri dari:

1. Setoran Ganti Rugi Tegakan dari PT WKS sebesar Rp35.591.895.904,80 yang salah setor ke Kas Daerah, seharusnya disetor ke Kas Negara;
2. Setoran dari PT Putra Kurnia Properti sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp3.666.337.500,00 (sampai dengan tahun 2015 Rp2.679.337.500,00 dan tahun 2016 sebesar Rp987.000.000,00) sebagai kontribusi perjanjian kerjasama bangun guna serah pembangunan Jambi Bisnis Center. Namun perjanjian ini belum efektif berjalan karena status tanah yang dikerjasamakan masih sengketa kepemilikan dengan masyarakat.
3. Penambahan Jasa Giro dari PT WKS sebesar Rp2.327.838.908,49 (tahun 2014 dan 2015 sebesar Rp1.435.603.709,78 dan tahun 2016 sebesar Rp892.235.198,71).
4. Penambahan Jasa Giro dari PT Kurnia Property sebesar Rp161.650.107,02 (tahun 2015 sebesar Rp 80.064.477,74 dan tahun 2016 sebesar Rp81.585.026,28)

5.3.2.1.c Utang Belanja

<u>31 Desember 2016</u>	<u>31 Desember 2015</u>
Rp1.515.968.967,00	Rp1.798.479.760,00

Nilai Utang Belanja per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.515.968.967,00 atau turun sebesar Rp282.510.793,00 dari saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.798.479.760,00.

5.3.2.1.d Utang Jangka Pendek Lainnya

<u>31 Desember 2016</u>	<u>31 Desember 2015</u>
Rp164.734.070.959,37	Rp95.217.024.266,00

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp164.734.070.959,37 turun sebesar Rp69.517.046.693,37 dari saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp95.217.024.266,00.

Adapun rincian utang jangka pendek lainnya adalah sebagai berikut :

1. Utang pada Rumah Sakit Daerah Provinsi Jambi Rp22.922.353.804,35 terdiri dari:

Tabel 5.56 Rincian Utang Pada Rumah Sakit Daerah

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Biaya Cetak	213.233.000,00
2	Alat Rumah Tangga Pakai Habis	178.494.300,00
3	Alat Tulis Kantor	33.326.000,00
4	Bahan Dan Alat Bangunan	20.559.000,00
5	Perlengkapan Ruang Pasien	5.500.000,00
6	Bahan Makanan	66.382.800,00
7	Pengadaan Peralatan Kantor	311.839.000,00
8	Pembelian Peralatan Dan Perlengkapan Dapur	3.380.000,00
9	Alat Pendingin Ruangan	8.070.000,00
10	Meubelair	89.400.000,00
11	Komputer	81.267.000,00
12	Alat Kesehatan	1.235.938.635,00
13	Pekerjaan Renovasi Gedung	233.832.000,00
14	Pekerjaan Pemeliharaan Sarana, Prasarana Dan Kalibrasi	170.926.000,00
15	Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor Rs	82.715.000,00
16	Fotocopy	1.175.400,00
17	Makan Dan Minum Pegawai	12.228.000,00
18	Bahan Bakar, Minyak Dan Gas	55.845.000,00
19	Insentif Pengelola Parkir	9.300.368,00
20	Insentif Jasa Layanan	12.952.716.374,00
21	Honorarium Kpknl	3.750.000,00
22	Jasa Sosial	1.150.000,00
23	Pakaian Dinas/ Kerja/ Atribut	47.218.000,00
24	Perencanaan Gedung	196.180.000,00
25	Rujuk Parsial	406.578.400,00
26	Bahan Obat-Obatan	6.501.349.527,35
JUMLAH		22.922.353.804,35

2. Utang pada BPKAD-SKPKD sebesar Rp142.884.482.648,62 yang merupakan utang Bagi Hasil pada Dinas Pendapatan Triwulan IV Tahun 2016 sebesar Rp131.315.372.441,62 dan Triwulan IV Tahun 2014, Triwulan II dan III Tahun 2015 yang belum ditransfer kepada Kabupaten/Kota, dengan rincian sebagai berikut:
 - 2.a. Bagi Hasil Triwulan IV Tahun 2016 sebesar Rp131.315.372.441,62 tersebut terdapat Bagi Hasil Bulan November dan Desember 2016 sebesar Rp101.838.890.608,20 Peraturan Gubernur masih dalam bentuk draft, akan tetapi nilainya sudah dapat dipastikan, dan untuk bulan Oktober 2016 sudah ada Peraturan Gubernur sebesar Rp29.476.481.833,42.

Tabel 5.57 Rincian Utang Bagi Hasil Triwulan IV Tahun 2016

(dalam rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah
1.	Kota Jambi	20.633.465.613,52
2.	Kabupaten Batanghari	11.201.969.445,85
3.	Kabupaten Bungo	12.644.754.490,69
4.	Kabupaten Tebo	11.196.852.830,85
5.	Kabupaten Merangin	12.054.844.414,40
6.	Kabupaten Sarolangun	11.338.248.606,48
7.	Kabupaten Muaro Jambi	11.927.818.940,29
8.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	11.410.505.927,18
9.	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	9.995.949.987,93
10.	Kota Sungai Penuh	9.070.473.269,83
11.	Kabupaten Kerinci	9.840.488.914,60
Jumlah		131.315.372.441,62

- 2.b. Bagi hasil Triwulan IV Tahun 2014, Triwulan II dan III Tahun 2015 sebesar Rp11.569.110.207,00 sudah ada Peraturan Gubernur Jambi.

Tabel 5.58 Rincian Utang Bagi Hasil Triwulan IV Tahun 2015, Triwulan II dan III Tahun 2015

(dalam rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah
1.	Kota Jambi	1.906.351.553,00
2.	Kabupaten Batanghari	975.095.854,00
3.	Kabupaten Bungo	1.162.499.142,00
4.	Kabupaten Tebo	951.445.537,00
5.	Kabupaten Merangin	1.050.468.148,00
6.	Kabupaten Sarolangun	974.051.550,00
7.	Kabupaten Muaro Jambi	998.527.737,00
8.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	982.961.296,00
9.	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	896.238.465,00
10.	Kota Sungai Penuh	822.128.378,00
11.	Kabupaten Kerinci	849.342.547,00
Jumlah		11.569.110.207,00

3. Utang Pemerintah Provinsi Jambi kepada Kabupaten Merangin berupa Belanja bantuan Keuangan bersifat khusus sebesar Rp4.340.500.000,00

5.3.3 Ekuitas

31 Desember 2016 **31 Desember 2015**
Rp6.017.292.023.437,23 **Rp5.253.373.917.355,64**

Mutasi dan perbandingan saldo Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut.

Saldo Tahun 2015	Rp	5.253.373.917.355,64
Mutasi Tambah	Rp	850.850.487.126,89
Mutasi Kurang	Rp	<u>(86.932.381.045,30)</u>
Jumlah	Rp	6.017.292.023.437,23

5.4 LAPORAN OPERASIONAL

5.4.1 PENDAPATAN LO

31 Desember 2016 **31 Desember 2015**
Rp3.468.490.292.470,24 **Rp3.130.876.415.396,49**

Pendapatan-LO Provinsi Jambi adalah pendapatan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp3.468.490.292.470,24 naik sebesar Rp337.613.877.073,75 dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp3.130.876.415.396,49. Sesuai susunan APBD setelah perubahan, maka perhitungan pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pada TA 2016, dengan rincian sebagai berikut:

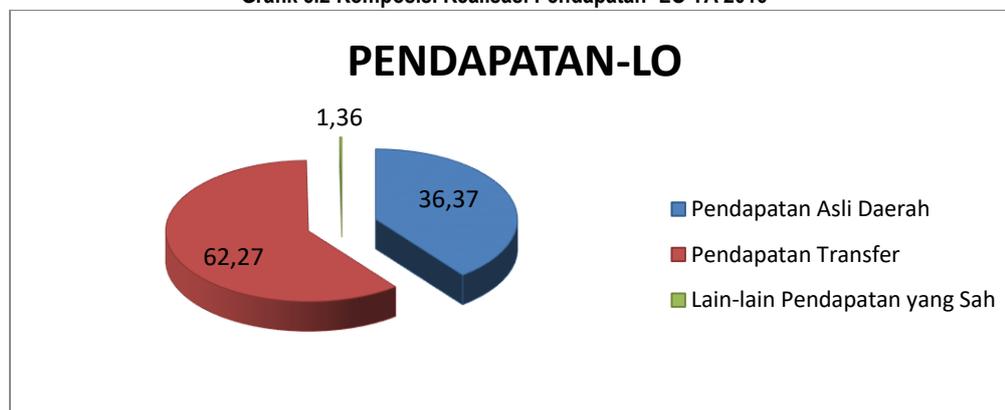
Tabel 5.59 Realisasi Pendapatan Daerah-LO Periode 2016

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2015
1.	Pendapatan Asli Daerah	1.261.479.096.368,74	1.236.791.935.816,49
2.	Pendapatan Transfer	2.159.679.608.454,00	1.887.051.548.864,00
3.	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	47.331.587.647,50	7.032.930.716,00
Jumlah		3.468.490.292.470,24	3.130.876.415.396,49

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan adalah sebesar 36,37% dan kontribusi Pendapatan Transfer terhadap total Pendapatan adalah sebesar 62,27% dan Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap total Pendapatan adalah sebesar 1,36% seperti terlihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 5.2 Komposisi Realisasi Pendapatan- LO TA 2016



Berdasarkan grafik di atas, memperlihatkan masih adanya ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat untuk pendanaan kegiatan pemerintahan di daerah yaitu sebesar 62,27% dari keseluruhan pendapatan daerah.

5.4.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO

31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp1.261.479.096.368,74 Rp1.236.791.935.816,49

Pendapatan Asli Daerah-LO Provinsi Jambi adalah pendapatan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp1,261,479,096,368.74 naik sebesar Rp24.687.160.552,25 dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp1.236.791.935.816,49. Rincian atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2016 beserta kontribusinya terhadap total PAD sebagai berikut.

Tabel 5.60 Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO Periode 2016

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2016	% thd PAD	Realisasi 2015	% thd PAD
1	Pendapatan Pajak Daerah	966,519,347,102.57	76.62%	1.010.318.979.969,00	81,69
2	Pendapatan Retribusi Daerah	19,123,602,125.00	1.52%	19.582.978.877,00	1,58
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	30,244,039,170.41	2.40%	32.456.073.702,75	2,62
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	245,592,107,970.76	19.47%	174.433.903.267,74	14,11
Jumlah		1,261,479,096,368.74	100	1.236.791.935.816,49	100

5.4.1.1.a Pendapatan Pajak Daerah – LO

31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp966.519.347.102,57 Rp1.010.318.979.969,00

Pendapatan Pajak Daerah adalah pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.

Pendapatan Pajak Daerah TA 2016 sebesar Rp966.519.347.102,57 atau sebesar 76,62% dari realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2016 turun sebesar Rp43.799.632.866,43 jika dibandingkan dengan TA 2015 sebesar Rp1.010.318.979.969,00.

Tabel 5.61 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO Periode 2016

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2015
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	339.443.747.598,00	321.804.013.917,00
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	243.963.112.550,00	270.301.438.650,00
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	249.250.031.331,57	282.231.166.893,00
4.	Pajak Air Permukaan	1.193.160.472,00	1.209.826.550,00
4.	Pajak Rokok	132.669.295.151,00	134.772.533.959,00
Jumlah		966.519.347.102,57	1.010.318.979.969,00

5.4.1.1.b Pendapatan Retribusi Daerah – LO

31 Desember 2016
Rp19.123.602.125,00

31 Desember 2015
Rp19.582.978.877,00

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari retribusi daerah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.

Pendapatan Retribusi Daerah TA 2016 sebesar Rp19.123.602.125,00 atau sebesar 1,54% dari realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2015 turun sebesar Rp459.376.752,00 dibanding dengan tahun 2015 sebesar Rp19.582.978.877,00.

Tabel 5.62 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Periode 2016
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2015
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	962.883.000,00
2	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	577.141.250,00	619.469.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan	196.475.000,00	3.117.974.000,00
4.	Retribusi Pelayanan Pendidikan Pelatihan Teknis	1.106.800.000,00	0,00
5	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tanah/Bangunan	1.329.632.000,00	1.529.983.797,00
6	Retribusi Tempat Pelelangan	289.672.000,00	290.340.150,00
7	Retribusi Tempat Penginapan	1.970.875.000,00	2.458.175.000,00
8	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.941.877.000,00	2.613.198.000,00
9	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.932.449.070,00	4.376.281.930,00
10	Retribusi Izin Trayek	24.850.000,00	38.905.000,00
11	Retribusi Perpanjangan IMTA	333.631.800,00	420.165.000,00
12	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Laboratorium	3.845.007.925,00	2.614.051.500,00
13	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Ruangan	698.880.000,00	0,00
14	Retribusi Tempat Khusus Pakir	13.000.000,00	0,00
15	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan	38.500.000,00	0,00
16	Retribusi Tempat Rekreasi	2.769.368.000,00	0,00
17	Sewa Alat Berat	55.393.080,00	0,00
18	Sewa Gedung Sport Hall Indoor	-	23.350.000,00
19	Sewa Tempat di TMII	-	40.000.000,00
20	Sewa Aula Bandiklatda	-	102.400.000,00
21	Sewa Kamar Asrama 1 dan 2	-	240.905.000,00
22	Sewa Ruang Belajar	-	48.300.000,00
23	Taman Hutan Kenali	50.000,00	86.597.500,00
	Jumlah	19.123.602.125,00	19.582.978.877,00

5.4.1.1.c Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

31 Desember 2016 **31 Desember 2015**
Rp30.244.039.170,41 **Rp32.456.073.702,75**

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar TA 2016 sebesar Rp30.244.039.170,41 atau sebesar 2,40% turun sebesar Rp2.214.370.906,34 dari realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2015 sebesar Rp32.456.073.702,75.

Tabel 5.63 Realisasi Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO Periode 2016

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2015
1	BagiLabaatasPenyertaan Modal pada Perusahaan milikswasta	1,310,476,233.00	1.239.829.205,00
2	BagiLabapenyertaanpada BPD Jambi	25,193,367,803.41	30.784.198.844,75
3	BagiLabaatasPenyertaan Modal PT. JSP Jambi	500,000,000.00	225.000.000,00
4	BagiLabaatasPenyertaan Modal PT. Simota Putra Parayuda	453,195,134.00	207.045.653,00
5	BagiLabaatasPenyertaan Modal PT. EragunaBumi Nusa	1,800,000,000.00	0,00
6	Bagilabaataspenyertaan Modal pada PT. JBC	987,000,000.00	0,00
Jumlah		30,244,039,170.41	32.456.073.702,75

5.4.1.1.d Lain-lain PAD Yang Sah – LO

31 Desember 2016 **31 Desember 2015**
Rp243.823.906.439,00 **Rp174.433.903.267,74**

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp243.823.906.439,00 atau sebesar 19,36% dari realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2015 naik sebesar Rp69.390.003.171,26 dibandingkan TA 2015 sebesar Rp174.433.903.267,74.

Tabel 5.64 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LO Periode 2016

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2015
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan	938,368,163.50	959.735.338,50
2	Penerimaan Jasa Giro	5,598,475,037.38	5.044.762.898,13
3	Pendapatan bunga	20,917,736,042.93	45.204.040.744,04
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	666,317,980.00	1.157.483.940,68
5	Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	395,699,504.30	611.726.503,00
6	Pendapatan Denda Pajak	29,829,473,962.58	27.802.881.005,90
7	Pendapatan Denda Retribusi	31,372,100.00	2.110.700,00
8	Pendapatan dari Pengembalian	36,312,925,779.71	6.120.096.199,81
9	Pendapatan Zakat	4,259,839,511.35	7.608.433.574,47
10	Pendapatan BLUD	145,813,574,889.01	77.928.540.174,22
11	Lain-lain PAD yang Sah	828,325,000.00	135.782.887,89
12	Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	-	1.781.953.301,10
13	Pendapatan dari setoran dealer dan kendaraan luar daerah	-	18.873.000,00
14	Pendapatan Uang Duka dari PT. Taspen	0	57.483.000,00
Jumlah		245,592,107,970.76	174.433.903.267,74

5.4.2 PENDAPATAN TRANSFER – LO

31 Desember 2016 **31 Desember 2015**
Rp2.159.679.608.454,00 **Rp1.887.051.548.864,00**

Pendapatan Transfer-LO Provinsi Jambi adalah pendapatan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp2.159.679.608.454,00. Naik sebesar Rp272.628.059.590,00 dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp1.887.051.548.864,00. Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2015 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.65 Pendapatan Transfer-LO Provinsi Jambi Periode 2016

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2016	%	Realisasi 2015	%
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.547.888.628.151,00	71,67%	1.419.079.798.364,00	75,20
2	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	611.790.980.303,00	28,33%	467.971.750.500,00	24,80
Jumlah		2.159.679.608.454,00	100	1.887.051.548.864,00	100

5.4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

31 Desember 2016 **31 Desember 2015**
Rp1.547.888.628.151,00 **Rp1.419.079.798.364,00**

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.547.888.628.151,00 atau sebesar 71,67% dari realisasi Pendapatan Transfer TA 2016 naik sebesar Rp128.808.829.787,00 dibanding dengan tahun 2015 sebesar Rp1.419.079.798.364,00.

Tabel 5.66 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO Periode 2016

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2015
1.	Bagi Hasil Pajak	219.290.388.270	179.892.405.250,00
2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	176.500.909.423	172.076.759.114,00
3.	Dana Alokasi Umum	1.070.452.478.000	1.009.165.864.000,00
4.	Dana Alokasi Khusus	81.644.852.458	57.944.770.000,00
Jumlah		1.547.888.628.151,00	1.419.079.798.364,00

5.4.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO

31 Desember 2016 **31 Desember 2015**
Rp611.790.980.303,00 **Rp467.971.750.500,00**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya sebesar Rp611.790.980.303,00 atau sebesar 28,33% dari realisasi Pendapatan Transfer

TA 2015naik sebesar Rp143.819.229.803,00dibanding dengan tahun 2015 sebesarRp467.971.750.500,00.

5.4.3LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO

<u>31 Desember 2016</u>	<u>31 Desember 2015</u>
Rp47.331.587.647,50	Rp7.032.930.716,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO Provinsi Jambi adalah pendapatan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 sebesarRp47.331.587.647,50 naik sebesar Rp40.298.656.931,50 dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp7.032.930.716,00 .Realisasi Lain - lain Pendapatan yang Sah tersebut didalamnya termasuk pendapatan hibahobat-obatan sebesar Rp47.331.587.647,50 dan pendapatan lainnya sebesar Rp0,00.

5.4.3.1PendapatanHibah – LO

<u>31 Desember 2016</u>	<u>31 Desember 2015</u>
Rp1.401.600.000,00	Rp6.736.530.716,00

Realisasi Pendapatan Hibah TA 2016 sebesar Rp1.401.600.000,00 turunsebesar Rp5.334.930.716,00dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp6.736.530.716,00.Realisasi Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2016 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.67 Pendapatan Hibah Periode 2016

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2015
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan ke Dinas Kesehatan	45,929,987,647.50	5.397.090.716,00
2	Pendapatan Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri	1,401,600,000.00	1.339.440.000,00
Jumlah		47,331,587,647.50	6.736.530.716,00

5.4.3.2 PendapatanLainnya– LO

<u>31 Desember 2016</u>	<u>31 Desember 2015</u>
Rp0,00	Rp296.400.000,00

Realisasi Pendapatan Lainnya TA 2016 sebesar Rp0,00 dan pada tahun 2015 sebesar Rp296.400.000,00.

5.4.4 Beban

31 Desember 2016 **31 Desember 2015**
Rp2.700.648.692.152,11 **Rp3.012.878.285.926,94**

Jumlah Beban Daerah untuk periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp2.700.648.692.152,11 turun sebesar Rp,312.229.593.774,83 dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp.3.012.878.285.926,94 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.68 Realisasi Beban Provinsi Jambi Periode 2016

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2016
1	Beban Operasi	2,244,739,037,194.99
2	Beban Transfer	455,909,654,957.12
Jumlah		2,700,648,692,152.11

Beban Operasi Provinsi Jambi Tahun 2016 sebesar Rp2.244.739.037.194,99 terdiri dari:

(dalam rupiah)

No.	Beban Operasi	Jumlah
1	Beban Pegawai	623,212,343,997.33
2	Beban Persediaan	229,048,457,400.37
3	Beban Jasa	324,904,143,960.25
4	Beban Pemeliharaan	35,047,173,119.00
5	Beban Perjalanan Dinas	131,171,508,761.00
6	Beban Bunga	-
7	Beban Subsidi	-
8	Beban Hibah	631,123,824,900.00
9	Beban Bantuan Sosial	0
10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	269,871,056,140.82
11	Beban Penyisihan Piutang	216,945,737.13
12	Beban Lain-lain	143,583,179.09
13	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	-
14	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-
Jumlah Beban Operasi		2,244,739,037,194.99

5.4.4.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai sebesar Rp623.561.725.029,33 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.69 Realisasi Beban Pegawai Provinsi Jambi Periode 2016

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2015
1	Beban Gaji dan Tunjangan-LO	401,900,706,776.33	376.119.789.836,00
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS-LO	140,408,564,400.00	138.594.534.200,00
3	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH WKDH-LO	7,724,800,000.00	7.361.500.000,00
4	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	19,757,352,306.00	30.517.782.071,00
5	Beban Uang Lembur-LO	536,967,490.00	512.823.800,00
6	Beban Belanja Pegawai BLUD	52,588,453,025.00	51.319.029.146,00
7	Beban Honorarium LPPK/TEPRA	295,500,000.00	0,00
Jumlah		623,212,343,997.33	604.425.459.053,00

5.4.4.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan sebesar Rp229.048.457.400,37 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.70 Realisasi Beban Persediaan Provinsi Jambi Periode 2016

No.	Uraian	Realisasi 2016
1	Beban Bahan Pakai Habis	101,105,879,768.49
2	Beban Persediaan Bahan/Material	37,460,900,586.88
3	Beban Cetak dan Penggandaan	19,840,301,188.00
4	Beban Makanan dan Minuman	13,416,117,859.00
5	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	3,596,706,900.00
6	Beban Pakaian Kerja	1,596,300,798.00
7	Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	2,993,416,700.00
8	Beban Barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga	49,038,833,600.00
Jumlah Beban Persediaan		229,048,457,400.37

5.4.4.3 Beban Jasa

Beban Jasa sebesar Rp327.966.361.239,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.71 Realisasi Beban Jasa Provinsi Jambi Periode 2016

No.	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2015
1	Beban Jasa Kantor	226,444,192,200.00	216.866.471.702,70
2	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	739,000,000.00	1.219.000.000,00
3	Beban Honorarium PNS	25,848,340,100.00	22.904.716.135,00
4	Beban honorarium Non PNS	43,786,504,000.00	36.208.437.500,00
5	Beban Premi Asuransi	2,728,828,858.25	2.030.294.518,56
6	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,259,621,026.00	3.870.685.431,00
7	Beban Sewa Sarana Mobilitas	25,000,000.00	1.229.549.000,00
8	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6,550,175,076.00	6.226.940.676,00
9	Beban Jasa konsultasi	10,330,996,850.00	7.997.275.900,00
10	Beban kursus, pelatihan, Bimbingan teknis PNS	5,191,485,850.00	7.650.059.658,00
Jumlah Beban Jasa		324,904,143,960.25	306.203.430.521,26

5.4.4.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan sebesar Rp35.047.173.119,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.72 Realisasi Beban Pemeliharaan Provinsi Jambi Periode 2016

No.	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2015
1	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	17,014,900,490.00	18.879.493.124,00
2	Beban Pemeliharaan	18,032,272,629.00	19.288.020.486,79
Jumlah Beban Pemeliharaan		35,047,173,119.00	38.167.513.610,79

5.4.4.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Persediaan sebesar Rp131.171.508.761,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.73 Realisasi Beban Perjalanan Dinas Provinsi Jambi Periode 2016

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2015
1.	Beban Perjalanan Dinas	131.171.508.761,00	137.732.610.573,50
Jumlah Beban Perjalanan Dinas		131.171.508.761,00	137.732.610.573,50

5.4.4.6 Beban Hibah

Beban Hibah sebesar Rp631.123.824.900,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.74 Realisasi Beban Hibah Provinsi Jambi Periode 2016

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2015
1	Beban Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	2,596,400,000.00	500.000.000,00
2	Beban Hibah Kepada Kelompok Masyarakat	2,105,453,600.00	69.407.615.530,00
3	Beban Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	20,500,000,000.00	168.877.380.583,00
4	Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan dasar	605,921,971,300.00	446.718.197.500,00
5	Beban Hibah kepada TNI/POLDA	-	21.563.806.000,00
Jumlah		631,123,824,900.00	707.066.999.613,00

5.4.4.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp269.871.056.140,82 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.75 Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Provinsi Jambi Periode 2016

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2015
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	87.240.227.908,28	88.519.872.139,80
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	13.946.233.184,98	12.894.771.726,97
3.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	167.829.032.578,13	137.339.794.271,80
4.	Beban Penyusutan Aset Lainnya	7.488.000,00	
5.	Beban Penyusutan Amortisasi Aset Tidak Berwujud	848.074.469,43	1.472.611.136,09
Jumlah		269.871.056.140,82	240.227.049.274,66

Tabel 5.76 Realisasi Beban Penyusutan SKPD Provinsi Jambi Periode 2016

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan
1.	Dinas Pendidikan	8.666.297.221,37	(3.111.447.136,23)	144.965.967,09
2.	Dinas Kesehatan	1.318.957.092,11	285.460.428,16	75.425.356,38
3.	Rumah Sakit Daerah	22.691.421.222,35	1.976.667.505,32	86.893.778,07
4.	Rumah Sakit Jiwa	1.996.470.593,07	716.783.386,27	10.626.196,73
5.	Dinas Pekerjaan Umum	10.087.902.385,03	1.045.450.594,49	159.718.659.224,92
6.	Bappeda	1.080.944.467,80	102.553.318,98	21.909.258,34
7.	Dinas Perhubungan	2.244.894.713,51	508.998.968,64	4.732.205.636,62
8.	BLHD	1.229.166.960,97	109.344.754,80	12.760.950,00
9.	BPMP	204.345.185,70	13.255.760,00	400.000,00
10.	Badan Penanggulangan Bencana	1.456.205.553,89	31.088.064,17	7.378.544,17
11.	Dinas Sosnakertrans	1.041.177.326,95	5.558.014.782,72	4.089.197,82
12.	Dinas Koperasi	545.870.731,90	153.734.279,88	7.331.257,14

13.	Badan Penanaman Modal Daerah	262.872.764,14	40.244.924,87	0
14.	Dinas Kebudayaan	902.262.951,43	213.123.632,33	10.459.081,70
15.	Dispora	1.068.490.190,47	661.752.786,91	3.727.440,00
16.	Satpol PP	588.672.925,13	24.744.952,24	3.313.971,25
17.	Badan Kesbangpol	448.199.988,58	12.722.480,00	1.676.425,00
18.	Biro Pemerintahan	57.798.500,00	0	0
19.	Biro Hukum	55.711.600,00	0	0
20.	Biro Humas dan Protokol	(49.996.050,00)	0	372.750,00
21.	Biro APKS	140.519.994,74	0	0
22.	Biro APSDA	113.508.100,00	0	0
23.	Biro Kesramas	293.064.545,38	0	0
24.	Biro Organisasi	114.492.983,33	0	0
25.	Biro Umum	8.760.080.559,63	803.720.769,68	76.446.125,00
26.	Sekretariat DPRD	2.287.519.217,97	403.583.113,75	931.500,00
27.	BPKAD	1.551.993.177,81	873.407.106,49	995.000,00
28.	Balitbangda	369.493.022,80	0,00	0
29.	Inspektorat	473.451.961,53	66.102.348,77	499.250,00
30.	Kantor Perwakilan	1.037.309.729,55	909.854.120,54	6.833.000,00
31.	Dinas Pendapatan	2.169.610.292,60	547.837.992,51	27.578.283,76
32.	Sekretariat KORPRI	264.979.274,01	0,00	0
33.	Bandiklatda	1.380.941.933,79	337.993.066,43	29.180.582,83
34.	Badan Kepegawaian Daerah	310.833.792,06	9.356.458,03	1.239.550,00
35.	KPID	322.329.777,00	8.676.520,00	1.564.134,00
36.	Dinas Kominfo	2.053.128.945,23	0,00	0
37.	Badan Perpustakaan	692.471.896,67	51.040.350,00	14.868.888,00
38.	Badan Ketahanan Pangan	218.568.557,05	12.517.100,00	1.376.287,50
39.	Sekretariat Bakorluh	383.117.800,95	18.000.120,00	1.363.685,50
40.	Dinas Pertanian	2.003.423.876,78	454.091.930,76	74.623.757,87
41.	Dinas Perkebunan	1.039.753.539,42	45.395.720,00	1.727.911.644,83
42.	Dinas Peternakan	1.515.290.313,87	484.066.701,45	61.676.313,95
43.	Dinas Kehutanan	1.030.451.124,79	77.498.771,00	104.076.963,76
44.	Dinas ESDM	339.814.945,20	21.866.999,80	564.349.639,71
45.	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.426.676.277,05	292.136.545,20	197.092.635,29
46.	Dinas Perindag	1.049.735.944,67	186.593.967,02	3.230.300,00
	Jumlah	87.240.227.908,28	13.946.233.184,98	167.738.032.577,23

Tabel 5.77 Realisasi Beban Amortisasi per SKPD Provinsi Jambi Periode 2016

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Beban Amortisasi TA 2016	Beban Amortisasi TA 2015
1.	Dinas Pendidikan	0,00	480.000.000,00
2.	Dinas Kesehatan	2.926.000,00	0,00
3.	Rumah Sakit Daerah	14.740.000,00	29.480.000,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum	206.682.800,00	206.682.800,00
5.	Dinas Perhubungan	340.921.600,00	340.921.600,00
6.	Biro APKS	11.424.160,00	11.424.160,00
7.	BPKAD	7.488.000,00	7.488.000,00
8.	Dinas Kominfo	234.964.000,00	367.372.000,00
9.	Biro Umum	13.196.576,09	13.196.576,09
10.	Biro Hukum	7.386.000,00	16.046.000,00
	Jumlah	839.729.136,09	1.472.611.136,09

5.4.4.8 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang tahun 2016 sebesar Rp216.945.737,13 merupakan penyisihan piutang Provinsi Jambi yang terdapat pada empat SKPD, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.78 Rincian Beban Penyisihan Piutang Per SKPD Periode 2016

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Realisasi 2016	Realisasi 2015
1	RSUD (BLUD)	110.993.258,36	17.947.993,72
2	BPKAD	90.386.910,27	201.015.000,00
3	Kantor Perwakilan	(3.450.000,00)	42.800.000,00
4	BLHD	19.015.568,50	14.409.240,00
Jumlah		216.945.737,13	276.172.233,72

5.4.4.9 Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain Rp143.583.179,09 yang merupakan beban penyisihan dana bergulir pada Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.

5.4.4.10 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Jumlah Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi (SKPKD) sebesar Rp454.409.409.710,12 yang merupakan beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

5.4.4.11 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

Jumlah Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi (SKPKD) sebesar Rp0,00 yang merupakan beban transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

5.4.4.12 Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Jumlah Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi (SKPKD) sebesar Rp1.500.245.247,00 yang merupakan beban transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

5.4.5. SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

Jumlah Surplus untuk Tahun 2016 sebelum pos Luar Biasa sebesar **Rp767.841.600.318,14**.

5.4.6 POS LUAR BIASA

Jumlah Beban Luar Biasa untuk Tahun 2016 sebesar **Rp93.456.012,00**.

5.4.7. SURPLUS/DEFISIT-LO

Jumlah Surplus-LO untuk Tahun 2016 sebesar **Rp552.048.208.124,32**.

5.5 LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode Tahun 2016 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan non anggaran.

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

31 Desember 2016 **31 Desember 2015**
Rp1.024.493.058.877,95 **Rp512.265.941.760,94**

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.024.493.058.877,95 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas dari aktivitas operasi dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Arus kas bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp1.024.493.058.877,95 dan Rp512.265.941.760,94 berasal dari:

Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Tahun 2016	Tahun 2015
<i>ArusKasMasuk</i>		
Pendapatan Pajak Daerah	966.519.347.102,57	1.010.318.979.969,00
Pendapatan Retribusi Daerah	19.098.520.625,00	19.311.933.677,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	26.979.273.416,41	33.956.073.702,75
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	100.122.854.928,80	95.620.949.218,04
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	395.791.297.693,00	351.969.164.364,00
Dana Alokasi Umum	1.070.452.478.000,00	1.009.165.864.000,00
Dana Alokasi Khusus	81.644.852.458,00	57.944.770.000,00
Dana Penyesuaian	611.790.980.303,00	467.971.750.500,00
Pendapatan Hibah	1.401.600.000,00	1.430.247.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	3.273.801.204.526,78	3.047.689.732.430,79
<i>ArusKasKeluar</i>		
Belanja Pegawai	571.555.910.924,33	552.757.048.875,00
Belanja Barang	647.604.439.745,00	613.035.473.450,85
Subsidi	0,00	0,00
Hibah	629.018.371.300,00	781.555.569.595,00
Bantuan Sosial	0,00	0,00
Belanja Tak Terduga	93.456.012,00	1.046.110.000,00
Bagi Hasil Pajak	399.535.722.420,50	467.708.759.824,00
Belanja Bantuan Keuangan	0,00	118.100.000.000,00

Bantuan Keuangan Partai Politik	1.500.245.247,00	1.220.828.925,00
Jumlah Arus Kas Keluar	2.249.308.145.648,83	2.535.423.790.669,85
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	1.024.493.058.877,95	512.265.941.760,94

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

31 Desember 2016 **31 Desember 2014**
(Rp937.413.139.115,01) **(Rp780.027.678.761,89)**

Saldo Arus kas bersih aktivitas investasi per 31 Desember 2015 defisit sebesar (Rp937.413.139.115,01) Arus kas dari aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Arus kas dari aktivitas investasi berupa:

Arus kas bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar (Rp937.413.139.115,01) dan (Rp780.027.678.761,89) berasal dari:

Arus Kas dari Aktivitas Investasi	Tahun 2016	Tahun 2015
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Pelepasan Hak Atas Tanah	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	115.825.000,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	15.650.000,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	131.475.000,00	0,00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Tanah	35.137.090.000,00	14.930.238.570,00
Belanja Peralatan dan Mesin	76.909.913.057,80	75.442.858.258,83
Belanja Gedung dan Bangunan	106.425.067.817,18	142.583.504.495,91
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	717.103.508.077,03	544.230.077.337,15
Belanja Aset Tetap Lainnya	1.969.035.163,00	2.841.000.100,00
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	937.544.614.115,01	780.027.678.761,89
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(Rp937.413.139.115,01)	(780.027.678.761,89)

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

31 Desember 2016 **31 Desember 2015**
Rp0,00 **Rp0,00**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp0,00.

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

31 Desember 2016 **31 Desember 2015**
Rp1.960.820.827,99 **Rp1.933.099.602,24**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp1.960.820.827,99 dan sebesar Rp1.933.099.602,24 berasal dari:

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2016	Tahun 2015
<i>ArusKasMasuk</i>		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	171.730.996.674,00	168.618.988.316,00
Penerimaan Utang Pihak Ketiga	1.960.820.827,99	1.933.099.602,24,80
<i>JumlahArusKasMasuk</i>	<i>173.691.817.501,99</i>	<i>170.522.087.918,24</i>
<i>ArusKasKeluar</i>		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	171.730.996.674,00	168.618.988.316,00
<i>JumlahArusKasKeluar</i>	<i>171.730.996.674,00</i>	<i>168.618.988.316,00</i>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	1.960.820.827,99	1.933.099.602,24

Saldo Arus kas bersih aktivitas transitoris per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.960.820.827,99 mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah dan Penerimaan Utang Pihak Ketiga milik PT. WKS dan PT. PKP. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Taspen dan Askes. Arus kas dari aktivitas transitoris dan rincian saldo akhir arus kas adalah sebagai berikut.

5.5.4 Saldo Akhir Kas

31 Desember 2016 **31 Desember 2015**
Rp319.968.964.277,68 **Rp217.697.239.558,99**

Saldo Akhir Kas Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp319.968.964.277,68 dan sebesar Rp217.697.239.558,99 dapat dirinci sebagai berikut:

	Tahun 2016	Tahun 2015
Kenaikan/Penurunan Kas	Rp89.040.740.590,93	(Rp265.828.637.398,71)
Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp197.434.466.981,30	Rp463.263.104.380,01
Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp286.475.207.572,23	Rp197.434.466.981,30
Kas di BendaharaPenerimaan	Rp50.000,00	Rp24.730.200,00
Kas di Bendahara BLUD	Rp33.490.934.005,45	Rp20.238.042.377,69
SaldoAkhirKas	Rp319.968.964.277,68	Rp217.697.239.558,99

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan Ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Isi dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1 EKUITAS AWAL

Jumlah ekuitas awal Tahun 2016 sebesar Rp5.253.373.917.355,64 merupakan saldo akhir Tahun 2015.

5.6.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan senilaiRp786.945.778.768,23

5.6.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:

5.6.3.1 Koreksi ekuitas lainnya

Koreksi ekuitas lainnya tahun 2016 adalah sebesar Rp(23.027.672.686,63)yang terdiri dari:

a) Penyesuaian Nilai Aset Lancar **Rp25.810.016,91**

Pertambahan dan pengurangan penyesuaian Nilai Aset Lancar terdapat pada 9 SKPD sebagai berikut:

No	SKPD	Jumlah
1	Rumah Sakit Umum	(0,09)
3	BLHD	(59.998.600,00)
5	Sekretaris DPRD	581.817,00
6	BPKAD	67.615.400,00
7	SKPKD	16.851.400,00
9	Kantor Perwakilan	760.000,00
	Jumlah	25.810.016,91

b) Penyesuaian Nilai Aset Tetap (Rp22.951.021.215,72)

Pertambahan dan pengurangan penyesuaian Aset Tetap terdiri dari:

- (a) Pengurangan Aset Tetap karena nilai dibawah kapitalisasi sebesar Rp(7.944.041.771,69) dengan rincian sebagai berikut.

No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	(1.541.979.541,99)
2	Dinas Kesehatan	(150.482.000,00)
3	Rumah Sakit Umum	(991.588.489,70)
4	Rumah Sakit Jiwa	(142.858.500,00)
5	Dinas Perhubungan	(4.257.723.842,00)
6	BLHD	(7.631.000,00)
7	BPMD & PPT	(11.724.000,00)
8	Dispora	(1.496.000,00)
9	Satpol. PP	(4.104.000,00)
10	Badan Kesbangpol	(1.400.000,00)
11	Biro Umum	(493.333.600,00)
12	Sekretaris DPRD	(11.920.500,00)
13	BPKAD	(805.000)
14	Balitbangda	(40.312.000,00)
15	Inspektorat	(21.005.100,00)
16	KORPRI	(2.100.000,00)
17	Badan Diklat	(19.900.000,00)
18	KPID	(1.225.000,00)
19	Badan Perpustakaan Dan Arsip Provinsi Jambi	(35.200.000,00)
20	Dinas Pertanian	(32.768.198,00)
21	Dinas Kehutanan	(5.000.000,00)
22	Dinas ESDM	(15.120.000,00)
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	(111.289.000)
24	Disperindag	(43.076.000,00)
	Jumlah	(7.944.041.771,69)

(b) Pengurangan Aset Tetap karena pencatatan ganda sebesar Rp(6.637.436.000,00) pada Rumah Sakit Umum sebesar Rp(145.000.000,00) dan BPKAD sebesar Rp(6.492.436.000,00)

(c) Mutasi antar SKPD sebesar Rp(712.431.000,40) pada

No	SKPD	Jumlah
1	Dinas PekerjaanUmum	(788.896.000,00)
2	Bappeda	380.893.000,00
	BPMP	(130.000.000,00)
3	Biro Pemerintahan	40.000.000,00
4	Biro HumasdanProtokol	(621.150.000,00)
5	Biro Administrasi Pembangunan danKerjasama	66.263.294,74
6	Biro AdministrasiPerekonomiandanSumberDayaAlam	37.200.000,00
7	Biro Kesramas	(9.563.294,74)
8	Biro Organisasi	54.300.000,00
9	Biro Umum	(147.474.237,70)
10	BPKAD	408.003.000,00
11	BadanKepegawaian Daerah	(2.006.762,70)
	Jumlah	(712.431.000,40)

(d) Pengurangan Aset Tetap merupakan setoran pengembalian temuan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp(43.975.677,50);

(e) Penambahan Aset Tetap yang belum tercatat sebesar Rp4.334.570.359,00 pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;

(f) Pengurangan aset yang dihibahkan sebesar Rp(14.071.563.445,00) yaitu sebesar Rp(258.841.000,00) pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Rp(14.330.404.445,00) pada BPKAD;

(g) Pengurangan Aset Tetap berupa kendaraan yang menjadi Temuan Ganti Kerugian sebesar Rp(14.850.000) pada Sekretariat DPRD;

(h) Penambahan aset karena kesalahan aritmatika sebesar Rp254.364.000,00 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

(i) Pengurangan Aset Tetap karena tidak sesuai spesifikasi aset sebesar Rp(2.571.226,00)

(j) Reklasifikasi aset pada:

No	SKPD	Jumlah
1	DinasPendapatan Daerah	700.200.000,00
2	KPID	(46.035.500,00)
	Jumlah	654.164.500,00

(k) Pengurangan Aset Tetap berupa penghapusan Aset Tetap pada:

No	SKPD	Jumlah
1	Rumah Sakit Jiwa	(26.250.000,00)
2	Bappeda	(229.740.732,00)
	Jumlah	(255.990.732,00)

(l) Penambahan aset berupa hibah pada:

No	SKPD	Jumlah
1	Rumah Sakit Jiwa	56.591.488,00
2	Biro Umum	156.444.235,00
3	Sekretariat Bakorluh	8.000.000,00
4	Dinas Perkebunan	308.100.000,00
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.603.325.000,00
	Jumlah	2.132.460.723,00

(m) Pengurangan Aset Tetap karena merupakan bahan habis pakai sebesar Rp(6.118.000,00) pada Dinas Kelautan dan Perikanan;

(n) Penambahan Aset Tetap dari penetapan hasil penilaian sebesar Rp542.925.000,00 pada Biro Umum;

(o) Penambahan hewan ternak sebesar Rp792.628.689,87 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

(p) Pengeluaran belanja modal yang sebenarnya belanja barang dan jasa sebesar Rp(9.430.000,00)

(q) Penambahan Aset Tetap dari utang belanja modal sebesar Rp(1.963.726.635,00) pada Rumah Sakit Umum Raden Mattaher.

c) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Rp2.937.411.972,47)

Pertambahan dan pengurangan penyesuaian terdiri dari:

No	SKPD	Jumlah
1	Inspektorat	(496.319.300,55)
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	(2.441.092.671,92)
	Jumlah	(2.937.411.972,47)

d) Penyesuaian Aset Lainnya Rp(4.786.909.687,76)

Pertambahan dan pengurangan penyesuaian **Aset Lainnya** sebesar Rp(4.786.909.687,76) dengan rincian sebagai berikut:

(a) Pengurangan aset lainnya karena pelunasan temuan pemeriksaan sebesar Rp(34.266.077,30) yaitu pada Dinas Perhubungan sebesar Rp(3.642.752,00), dan Biro Umum sebesar Rp(30.623.325,30);

- (b) Penghapusan aset lainnya yang merupakan bagian lancar piutang jangka panjang (kemitraan BOT) sebesar Rp(2.050.000.000,00);
- (c) Penghapusan aset lainnya sesuai dengan SK Penghapusan sebesar Rp(3.498.811.803,49) pada:

No	SKPD	Jumlah
1	Badan Kesbangpol	(265.202.133,00)
2	Biro Hukum	(76.487.532,00)
3	Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama	(410.555.875,00)
4	Biro Organisasi	(106.354.238,00)
5	Sekretaris DPRD	(2.036.675.288,49)
6	BPMD dan PPT	(603.536.737,00)
	Jumlah	(3.498.811.803,49)

- (d) Reklasifikasi dari dan ke aset lainnya sebesar Rp(654.164.500,00) pada:

No	SKPD	Jumlah
1	DinasPendapatan	(1.371.900.000,00)
2	KPID	46.035.500,00
3	DInasPendapatan Daerah	671.700.000,00
	Jumlah	(654.164.500,00)

- (e) Mengurangi amortisasi aset tidak berwujud yang direklas ke aset rusak berat pada KPID sebesar Rp12.260.450,00;
- (f) Penambahan aset lainnya karena kurang catat atas hewak ternak bergulir pengadaan tahun 2010 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp112.500.000,00;
- (g) Penambahan aset lainnya yang berasal dari kekurangan volume belanja pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp1.325.572.243,03;
- e) **Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Rp230.582.940,48**
 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud sebesar Rp230.582.940,48 terdapat pada dinas pekerjaan umum.
- f) **Koreksi Nilai piutang Dana Bergulir Rp(10.180.021,29)**
dari Investasi Non Permanen

Koreksi nilai piutang dana bergulir dari investasi non permanen sebesar Rp10.180.021,29 berupa kenaikan nilai investasi bersih Dana KUPEM pada Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.

g) Koreksi Nilai Investasi Permanen Rp11.044.298.742,00

Koreksi nilai investasi permanen sebesar Rp11.044.298.742,00 berupa kenaikan/penurunan investasi permanen pada Bank Jambi dan PT JII berdasarkan metode ekuitas karena persentase kepemilikan lebih dari 20% dengan rincian sebagai berikut:

- a. PT Bank Jambi dengan persentasi kepemilikan 60% mengalami kenaikan sebesar Rp11.682.078.902,60;
- b. PT JII dengan persentase kepemilikan 99,55% mengalami penurunan sebesar Rp637.780.160,60.

h) Lain-lain Rp(3.663.201.531,36)

Koreksi lain-lain sebesar Rp(3.663.201.531,36) merupakan selisih nilai perhitungan dari buku besar koreksi ekuitas dengan nilai koreksi ekuitas lainnya *unaudited* yang tidak dapat dijelaskan oleh Pemerintah Provinsi Jambi.

5.6.4 EKUITAS AKHIR

Jumlah ekuitas akhir tahun 2016 adalah sebesar Rp6.017.292.023.437,23 dengan rincian sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal	Rp 5.253.373.917.355,64
2. Suplus/Defisit LO	Rp 786.945.778.768,23
3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	Rp (23.027.672.686,63)
4. Ekuitas Akhir	Rp 6.017.292.023.437,23

BAB VI

INFORMASI NON-KEUANGAN

6.1 Domisili dan Bentuk Hukum Entitas

Provinsi Jambi terletak di bagian tengah Pulau Sumatera, membentang dari pegunungan Bukit Barisan di darat, dataran rendah lahan kering di bagian tengah hingga perairan laut dengan Pulau Berhala di bagian timur. Kelengkapan bentuk bentang alam Provinsi Jambi ditandai pula oleh keberadaan Taman Nasional Kerinci Seblat di barat, Taman Nasional Bukit Tigapuluh, dan Taman Nasional Bukit Duabelas di bagian tengah serta lahan gambut dan Taman Nasional Berbak di bagian timur.

Dilihat dari aspek geografis, Provinsi Jambi mempunyai letak yang strategis karena langsung berhadapan dengan salah satu pusat pertumbuhan dunia “IMS-GT” (Indonesia, Malaysia, Singapura – *Growth Triangle*). Dengan posisi itu wilayah ini memiliki keunggulan komparatif jika dibandingkan dengan beberapa wilayah provinsi lain di Sumatera.

Sumber daya alam yang ada dan perlu dikembangkan secara optimal adalah sumber daya tambang migas, selain itu terdapat juga pertambangan batu bara serta berbagai jenis tambang lainnya.

Sumberdaya alam lain adalah tanah/lahan yang potensial untuk perkembangan pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan kehutanan. Dari 5.100.000 ha. luas daratan, seluas 2.179.440 ha (42,73%) adalah kawasan hutan dan kawasan pertanian, dan non pertanian seluas 2.920.560 ha (57,27%). Di samping itu terdapat pula daerah pesisir dan perairan laut seluas 12 mil dari garis pantai.

Penataan kelembagaan yang sesuai dengan konsep otonomi daerah mempunyai arti penting yang sangat strategis untuk meningkatkan kinerja aparatur. Perangkat daerah yang terdapat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, terdiri dari satu Sekretariat Daerah dengan sembilan Biro, satu Sekretariat DPRD, satu Sekretariat KORPRI, satu Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan, satu Inspektorat, enam belas dinas, 12 badan, tiga kantor, satu komisi, dan dua unit pelaksana teknis daerah.

6.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan-peraturan Daerah Provinsi Jambi yang diterbitkan dan perubahan-perubahannya, telah ditetapkan organisasi, kewenangan dan tugas dari unit-unit yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas gubernur yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat KORPRI, Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Komisi Penyiaran dan Informasi Daerah, 12 Badan, 17 Dinas, satu Kantor, satu UPTD, dua BUMD, 3 Badan Layanan Umum dengan rincian sebagai berikut.

1. Badan

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2) Badan Lingkungan Hidup Daerah
- 3) Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu
- 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 5) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 6) Badan Kepegawaian Daerah
- 7) Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah
- 8) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
- 9) Badan Ketahanan Pangan
- 10) Badan Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan
- 11) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 12) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

2. Dinas

- 1) Dinas Pendidikan
- 2) Dinas Kesehatan
- 3) Dinas Pekerjaan Umum
- 4) Dinas Perhubungan
- 5) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 6) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- 7) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- 8) Dinas Pemuda dan Olahraga
- 9) Dinas Pendapatan Daerah
- 10) Dinas Pertanian Tanaman Pangan
- 11) Dinas Perkebunan
- 12) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 13) Dinas Kehutanan
- 14) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
- 15) Dinas Kelautan dan Perikanan
- 16) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 17) Dinas Kominfo

3. Kantor

Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah

4. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yaitu Akademi Farmasi.
5. BUMD
 - 1) Bank Jambi
 - 2) PT Jambi Indoguna Internasional (PT JII)
6. Badan Layanan Umum Daerah.
 - 1) Akademi Analisis Kesehatan (AAK)
 - 2) Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jambi
 - 3) Rumah Sakit Daerah
 - 4) Rumah Sakit Jiwa
 - 5)

6.3. Penggantian Manajemen Pemerintah dalam Tahun 2016

Dalam TA 2016 tidak terdapat penggantian manajemen di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

6.4. Informasi Lainnya

Dalam TA 2016 tidak terdapat perubahan struktur organisasi.

BAB VII PENUTUP

Berdasarkan penjelasan dan rincian tersebut di atas dapat diambil simpulan penting bahwa:

- *Pada Laporan Realisasi Anggaran:* Target pendapatan yang ditetapkan tahun 2016 sebesar Rp3.433.921.466.750,82 telah direalisasi sebesar Rp3.394.849.942.890,08 atau sebesar 98,86%, dan pada sisi belanja dan transfer dianggarkan sebesar Rp3.611.831.804.717,49 terealisasi sebesar Rp3.294.484.968.672,84 atau sebesar 91,21%. Dari angka defisit APBD yang ditargetkan sebesar Rp177.910.910.337.966,67 dalam realisasinya terjadi defisit sebesar Rp100.310.903.390,70 atau sebesar 56,41,39%. Dengan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp177.910.910.337.966,67, maka terdapat SILPA sebesar Rp278.221.241.857,37;
- *Pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL):* Saldo Anggaran Lebih Tahun 2016 sebesar Rp278.221.241.857,37, ini berarti ada kenaikan sebesar Rp100.310.903.890,70 dibanding dengan saldo Anggaran Lebih Tahun 2015 sebesar Rp177.910.337.966,67. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2016 sebesar Rp177.910.910.337.966,67 dan terdapat saldo SAL Tahun 2015 yang tidak digunakan sebesar Rp278.221.241.857,37;
- *Dalam Neraca:* Posisi Aset pada akhir tahun 2016 sebesar Rp6.230.703.051.277,51 bila dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp5.390.176.322.973,96 naik sebesar 15,59%. Posisi Kewajiban pada akhir Tahun 2016 sebesar Rp213.411.027.840,28 bila dibandingkan dengan Tahun 2015 sebesar Rp136.802.405.616,32 naik sebesar 55,99%. Posisi Ekuitas pada akhir Tahun 2016 sebesar Rp6.017.292.023.437,23 bila dibandingkan dengan Tahun 2015 sebesar Rp5.253.373.917.355,64 naik sebesar 14,54%;
- *Pada Laporan Operasional (LO):* Pendapatan LO Tahun 2016 sebesar Rp3.492.147.141.678,24 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah LO sebesar Rp1.285.135.945.576,74, pendapatan transfer LO sebesar Rp2.159.679.608.454,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp47.331.587.647,50. Sedangkan Beban Tahun 2016 sebesar Rp2.705.107.906.898,02 yang terdiri dari Beban Operasi sebesar Rp2.244.857.751.940,90, Beban Transfer sebesar Rp460.250.154.957,12 sedangkan Surplus/Defisit Kegiatan Operasional surplus sebesar Rp787.039.234.780,23. Nilai Surplus Kegiatan Non Operasional adalah Nihil. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa sebesar Rp787.039.234.780,23. Nilai Pendapatan luar biasa adalah nihil, Beban Luar Biasa Rp93.456.012,00 sehingga Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa Defisit (Rp93.456.012,00) sehingga Surplus/Defisit LO sebesar Rp786.945.778.768,23

- *Pada Laporan Arus Kas: Saldo Arus Kas pada akhir Tahun 2016 sebesar Rp319.968.964.277,68 dibandingkan saldo arus kas pada akhir Tahun 2015 sebesar Rp217.697.239.558,99 sehingga terjadi kenaikan saldo akhir kas akhir tahun ini sebesar Rp102.271.724.718,69.*

- *Pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE): Ekuitas awal sebesar Rp5.253.373.917.355,64 Surplus/Defisit LO sebesar Rp786.945.778.768,23 dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan sebesar Rp23.027.672.686,63 sehingga Ekuitas Akhir sebesar Rp6.017.292.023.437,23.*

Jambi, Maret 2017

GUBERNUR JAMBI

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI